



DIREKTORAT JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU



# LAPORAN KINERJA

20  
24



DIREKTORAT JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

# LAPORAN KINERJA 2024



## **REVIEW**

### **SEKRETARIS DITJEN BIMAS HINDU**

Telah dilakukan review terhadap draft final laporan kinerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2024.

Adapun Informasi yang dibuat dalam laporan kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan penyajiannya sesuai dengan pedoman pelaporan kinerja.

Berdasarkan review ini, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 13 Februari 2024  
Sekretaris Ditjen Bimas Hindu



Ida Made Pidada Manuaba



LAPORAN KINERJA (LKj)  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TAHUN 2024

Pengarah : Prof. Dr. Drs I Nengah Duija, M.Si.  
(Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu)

Penanggung Jawab : Dr. Ida Made Pidada Manuaba, S.Ag., M.Si.  
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu)

Tim Penyusun:

I Made Bayu Andika, I Putu Indra Setiawan, I Kadek Sudarsana, I Nyoman Darmawan

Kontributor:


Sekretariat Ditjen Bimas Hindu: I.B.Kt.Drana Arimbawa, Komang Yusniawati, IGA. Andini  
Sucika, Ni Nyoman Muliartini, Makoto Daiwa Ambara, Dwi Arisetia  
Direktorat Pendidikan Hindu: Dewa Agung Raditya, I Putu Suhartama, Made Hermawati,  
Dewa Ayu Nyoman Kusumaningrat, Ni Wayan Juniarini, Ida Bagus Kade Putra Upadana, Roni  
Kriswanto, Ratnaningtyas Yoga Wijayanti, Ni Kompyang Sri Erawati, Gusti Made Andi, Ni  
Wayan Sukerti, Riski Basuki, I Made Sudhana, I Ketut Sumerta, Putu Agus Oka  
Mahendradatta, Putu Arya Dharma, Shifa Alawiyah. Ni Ketut Wiriani, Pande Putu Sri Ayu  
Weshimar, Maretha Manik Mintaningtyas  
Direktorat Urusan Agama Hindu: Indro Satmoko, Ni Wayan Pujiastuti, I Putu Alit Tinggal  
Yasa, Ida Bagus Agung Surya Damana, Ni Wayan Sandi Pera Pertiwi, Gusti Ngurah Panji,  
Surya Oktavianis


*Design cover*


I Nyoman Darmawan


Diterbitkan oleh:

Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu  
Kementerian Agama Republik Indonesia

 Jl. M.H. Thamrin No. 6 Lt. 14 Jakarta Pusat 10340

 (021) 3811504 3521324, 3811227

 bimashinduri

 bimashindu@kemenag.go.id

 @BimasHinduRI

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami menghaturkan Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Tahun Anggaran 2024. Laporan ini memberikan gambaran capaian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Bimas Hindu tahun 2024.

Laporan Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama. Pencapaian kinerja tahun 2024 merupakan pencapaian tahun kelima atau terakhir periode Renstra 2020-2024 dan sekaligus menjadi acuan untuk menetapkan target pada Renstra berikutnya.

Laporan Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Pencapaian dan kekurangan dalam laporan ini kiranya dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pejabat dan pegawai Ditjen Bimas Hindu.

Jakarta, 14 Februari 2025

Direktur Jenderal



I Nengah Duija

## Ringkasan Eksekutif

Visi Presiden dan Wakil Presiden Periode Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Kementerian Agama memiliki peran yang sangat strategis didalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Visi Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Renstra Ditjen Bimas Hindu 2020-2024 disusun merujuk pada Renstra Kementerian Agama 2020-2024 dan berpedoman pada RPJMN 2020-2024. Renstra Ditjen Bimas Hindu berisikan tujuan, arah kebijakan, dan strategi Ditjen Bimas Hindu selama 5 tahun mendatang yang fokus pada pencapaian visi dan misi Kementerian Agama 2020-2024. Guna mewujudkan visi Kementerian Agama, Ditjen Bimas Hindu menetapkan 17 Sasaran Program (SP) dan 36 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). SP tersebut terbagi menjadi SP aspek bidang agama dan bidang pendidikan Hindu serta dukungan manajemen.

Kinerja Ditjen Bimas Hindu diukur dengan membandingkan realisasi dan target yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap setiap indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian rerata sasaran program Ditjen Bimas Hindu sebesar 89,40% dengan kategori BAIK. Capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,03% dari tahun 2023 yang sebesar 94,43%. Hal tersebut terdapat jumlah hasil pengukuran IKSP yang kategori Kurang dengan capaian <50% meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah hasil pengukuran IKSP kategori Kurang tahun 2024 sebanyak 6 IKSP dan tahun 2023 sebanyak 4 IKSP. Hal ini juga mempengaruhi jumlah capaian sasaran program yang berkategori Sangat Baik dengan capaian >100-120% mengalami penurunan dari tahun 2023. Disamping itu terdapat blokir *Automatic Adjustmen* (AA) dari awal tahun 2024 yang pada akhirnya di revisi untuk menutupi kekurangan gaji pegawai.

Hasil pengukuran terhadap 17 SP dengan 36 IKSP diperoleh rerata dari 17 SP sebagai berikut 7 (tujuh) SP kategori sangat baik dengan capaian >100-120%, 6 (enam) SP kategori baik dengan capaian antara 80-100%, 2 (dua) SP kategori cukup dengan capaian antara 50-79,99%, 2 (dua) SP kategori kurang dengan capaian <50%.

Sasaran program yang menunjukkan rerata capaian kinerja sangat baik (>100-120%) adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program 7, yaitu Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif

- moderat, sebesar 113,50%
- 2) Sasaran Program 10, yaitu Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan sebesar 120,00%.
  - 3) Sasaran Program 11, yaitu Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi NSP sebesar 120,00%.
  - 4) Sasaran Program 12, Meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan sebesar 120,00%.
  - 5) Sasaran Program 15, yaitu Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima didunia kerja sebesar 120,00%.
  - 6) Sasaran Program 16, yaitu Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian sebesar 120,00%.
  - 7) Sasaran Program 17, yaitu Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel sebesar 119,57%

Sasaran program yang menunjukkan rerata capaian kinerja baik (80-100%) adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program 1, yaitu Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluh agama Hindu sebesar 86,81%
- 2) Sasaran Program 2, yaitu Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama sebesar 100,00%.
- 3) Sasaran Program 3, yaitu Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama sebesar 94,74%.
- 4) Sasaran Program 4, yaitu Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama sebesar 100,00%.
- 5) Sasaran Program 9, yaitu Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan sebesar 86,72%.
- 6) Sasaran Program 13, yaitu Menguatnya pendidikan karakter siswa sebesar 84,42%.

Sasaran program yang menunjukkan rerata capaian kinerja cukup (50-79,99%) adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program 5, yaitu Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan sebesar 70,83%
- 2) Sasaran Program 8, yaitu Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa sebesar 57,04%

Sasaran program yang menunjukkan rerata capaian kinerja kurang (< 50%) adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program 6, yaitu Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu sebesar 6,26%.
- 2) Sasaran Program 14, yaitu Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional sebesar 0,00%

Sedangkan hasil pengukuran atas 36 IKSP diperoleh hasil yakni 19 (sembilan belas) IKSP berkategori sangat baik dengan capaian >100-120%, 8 (delapan) IKSP berkategori baik dengan capaian antara 80-100%, 2 (dua) IKSP berkategori cukup dengan capaian antara 50-79,99%, 6 (enam) IKSP berkategori kurang dan 1 (satu) IKSP yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2024. Adapun 1 (satu) IKSP yang tidak dilakukan pengukuran yaitu (1) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Realisasi anggaran Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 sebesar Rp 474,108,392,893,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau 98,79% dari pagu anggaran sebesar Rp 479,903,401,000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus satu ribu rupiah) yang terdistribusi pada 124 satker. Persentase realisasi anggaran tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 yang mencapai 98,71%.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen Bimas Hindu TA 2024 sebesar 82,38 kategori Baik/4. NKA TA 2024 mengalami penurunan sebesar 10,01 dari tahun sebelumnya. Begitu juga NKA tahun 2024 paling rendah dibandingkan dengan NKA 4 tahun terakhir. NKA TA 2024 ini belum mencapai target NKA yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 sebesar 95,00. Hal tersebut disebabkan oleh (1) terdapat masalah pada penginputan laporan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) pada role Monev Sakti yang tidak dapat dilakukan karena ketidakterediaan IKP, sehingga Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tidak optimal khususnya variabel IKP (Efektifitas Unit Eselon I bobot 30%) memperoleh nilai 0 (Nol). Ketidakterediaan IKP pada rove Monev Sakti disebabkan kurang lengkapnya informasi kinerja pada aplikasi Renja Krisna khususnya tagging IKP pada "Unit Organisasi" dan Unit Organisasi yang terlibat". (2) Belum optimalnya perolehan dari penilaian Efisiensi khususnya variabel penggunaan SBK, yang disebabkan oleh belum semua Rincian Output pada Ditjen Bimas Hindu menggunakan SBK.

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
Ringkasan Eksekutif.....	3
Daftar Isi.....	6
Daftar Tabel.....	8
Daftar Grafik.....	10
Daftar Diagram.....	11
Daftar Gambar.....	12
Bab I Pendahuluan .....	13
A. <b>LATAR BELAKANG</b> .....	13
B. <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b> .....	13
C. <b>TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	13
D. <b>SUSUNAN ORGANISASI</b> .....	14
E. <b>SUMBER DAYA MANUSIA</b> .....	15
F. <b>ISU – ISU STRATEGIS</b> .....	18
Bab II Perencanaan Kinerja .....	21
A. <b>RENCANA STRATEGIS</b> .....	21
B. <b>PENETAPAN KINERJA</b> .....	33
C. <b>PERENCANAAN ANGGARAN</b> .....	37
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	41
A. <b>CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024</b> .....	41
B. <b>ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM</b> .....	51
Aspek Bidang Agama.....	51
1. SP.2.2 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu.....	51
2. SP.2.3. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu melalui pendekatan moderasi beragama .....	54
3. SP.2.4. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama.....	55
4. SP.2.5. Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama .....	56
5. SP.2.6. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan .....	57
6. SP.2.7. Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu .....	59
Aspek Bidang Pendidikan .....	60
7. SP.3.1. dan 5.1. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat .....	60
8. SP.3.2. Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa.....	63
9. SP.3.3 dan 5.2. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan.....	65
10. SP.4.1. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan .....	67
11. SP.3.4 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP .....	72
12. SP 3.5 dan 5.3 Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan.....	73
13. SP.3.6 Menguatnya pendidikan karakter siswa .....	77
14. SP.5.4 Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional.....	79
15. SP.5.6 Meningkatnya kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja .....	80

16. SP.5.5. Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian .....	83
Aspek Bidang Dukungan Manajemen .....	84
17. SP.1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel.....	84
<b>C. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>93</b>
<b>D. KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024 .....</b>	<b>102</b>
<b>E. CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN AGAMA .....</b>	<b>104</b>
<b>F. DUKUNGAN DITJEN BIMAS HINDU TERHADAP PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN ...</b>	<b>107</b>
<b>G. CAPAIAN KINERJA LAINNYA .....</b>	<b>111</b>
Bab IV Penutup.....	113
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>113</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>115</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024 .....	23
Tabel 2. Penetapan Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 .....	34
Tabel 3. Perbandingan Alokasi Anggaran dengan Target Anggaran Renstra 2024 .....	38
Tabel 4. Capaian Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 .....	42
Tabel 5. Perbandingan Capaian IKSP Berdasarkan Kategori Tahun 2020-2024 .....	46
Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2020-2024 .....	47
Tabel 7. SP 2.2 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu .....	52
Tabel 8. IKSP.2.2.1 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu .....	52
Tabel 9. IKSP.2.2.2 Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu .....	54
Tabel 10. IKSP.2.3.1 Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan .....	55
Tabel 11. IKSP.2.4.1 Tingkat moderasi beragama kelompok binaan .....	56
Tabel 12. IKSP.2.5.1 Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan .....	57
Tabel 13. Rerata Capaian SP Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan .....	57
Tabel 14. IKSP.2.6.1 Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital .....	58
Tabel 15. IKSP.2.6.2 Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran .....	59
Tabel 16. IKSP.2.7.1 Persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana .....	59
Tabel 17. SP 3.1 Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat .....	61
Tabel 18. IKSP.3.1.1 Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama .....	62
Tabel 19. IKSP.5.1.1 Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama .....	62
Tabel 20. IKSP.3.2.1 Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi .....	64
Tabel 21. IKSP.3.2.2 Rerata nilai asesmen siswa dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA .....	65
Tabel 22. IKSP.3.3.1 Persentase guru bersertifikat pendidik .....	66
Tabel 23. IKSP.5.2.1 Persentase dosen bersertifikat pendidik .....	66
Tabel 24. IKSP.5.2.2 Persentase dosen berkualifikasi S3 .....	67
Tabel 25. IKSP.4.1.1 Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman .....	68
Tabel 26. IKSP.4.1.2 Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman .....	69
Tabel 27. IKSP.4.1.3 Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman .....	70
Tabel 28. IKSP.4.1.4 Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman .....	71
Tabel 29. IKSP.4.1.5 Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH .....	72
Tabel 30. IKSP.3.4.1 Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang .....	73
Tabel 31. IKSP.3.5.1 Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP .....	74
Tabel 32. IKSP.5.3.1 Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul .....	75
Tabel 33. IKSP.3.5.2 Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan .....	76
Tabel 34. IKSP.5.3.2 Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan .....	77
Tabel 35. IKSP.3.6.1 Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik .....	79
Tabel 36. IKSP.5.4.1 Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional .....	80

Tabel 37. IKSP.5.6.1 Persentase PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan.....	81
Tabel 38. IKSP.5.6.2 Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKH.....	82
Tabel 39. IKSP.5.6.3 Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan....	83
Tabel 40. IKSP.11.16.1 Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional.....	84
Tabel 41. SP 1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel .....	85
Tabel 42. IKSP.1.6.1 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan .....	86
Tabel 43. Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi.....	86
Tabel 44. IKSP.1.6.2 Nilai PMPRB .....	88
Tabel 45. IKSP.1.6.3 Nilai SAKIP .....	90
Tabel 46. IKSP.1.6.4 Nilai Maturitas SPIP.....	91
Tabel 47. IKSP.1.6.5 Indeks Profesionalitas ASN .....	93
Tabel 48. Realisasi Alokasi Anggaran TA 2024.....	94
Tabel 49. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi Tahun 2020-2024.....	96
Tabel 50. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020-2024.....	96
Tabel 51. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Tahun 2020-2024.....	97
Tabel 52. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020-2024.....	97
Tabel 53. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024 .....	99
Tabel 54. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Sasaran Program (SP) Tahun 2024 .....	101
Tabel 55. NKA Ditjen Bimas Hindu Tahun 2020-2024 .....	103
Tabel 56. Realisasi Anggaran Moderasi Beragama Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 .....	105

## Daftar Grafik

Grafik 1. Sebaran Sumber Daya Manusia Aparatur pada Ditjen Bimas Hindu (Satker Pusat) berdasarkan Jabatan Tahun 2024.....	16
Grafik 2. Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur pada Satker PTKHN Tahun 2024.....	17
Grafik 3. Komposisi SDM Aparatur pada Satker Daerah Tahun 2024.....	18
Grafik 4. Komposisi Anggaran Berdasarkan Fungsi Tahun 2024.....	38
Grafik 5. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024.....	39
Grafik 6. Komposisi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2024.....	40
Grafik 7. Komposisi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2024.....	40
Grafik 8. Tren Nilai SAKIP Ditjen Bimas Hindu Tahun 2019-2024.....	90
Grafik 9. Tren Nilai Maturitas SPIP Ditjen Bimas Hindu Tahun 2019-2024.....	92
Grafik 10. Tren Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024.....	94
Grafik 11. Perbandingan Realisasi Anggaran Bulanan Terhadap Pagu Tahun 2020-2024.....	95
Grafik 12. NKA Ditjen Bimas Hindu Tahun 2020-2024.....	104
Grafik 13 Anggaran dan Target Volume PIP Tahun 2024.....	109
Grafik 14. Anggaran dan Target Volume KIP Kuliah Tahun 2024.....	109
Grafik 15. Anggaran dan Target Volume KIP Kuliah Tahun 2020-2024.....	110

## Daftar Diagram

Diagram 1. Struktur Organisasi .....	15
--------------------------------------	----



## Daftar Gambar

Gambar 1. Status Capaian Kinerja Ditjen Bimas Hindu.....	41
Gambar 2. Budget Tagging P3KE TA 2024.....	108

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- F. Isu-isu Strategis

# Bab I Pendahuluan

## A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2024 secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban tahun kelima atau terakhir pelaksanaan Renstra 2020-2024 Ditjen Bimas Hindu dan merujuk pada Renstra Kementerian Agama. Disamping itu, laporan ini menggambarkan capaian program Prioritas Nasional/Rencana Kerja Pemerintah, Proritas Kementerian Agama, dan Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2024.

Laporan Kinerja ini sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas Dirjen Bimas Hindu kepada Menteri Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya dan kebijakan sebagaimana yang telah diperjanjikan di tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah untuk melakukan evaluasi dan pengukuran atas pencapaian kinerja atas IKSP yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan juga pencapaian kinerja anggaran yang diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi penentuan kebijakan selanjutnya.

## C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai berikut :

1. Kedudukan
  - a. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama;
  - b. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dipimpin oleh Direktur

Jenderal

2. Tugas

Sesuai pasal 331 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi sesuai pasal 332 yakni:

- a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama serta pendidikan agama dan keagamaan Hindu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama serta pendidikan agama dan keagamaan Hindu;
- c. pembinaan penyelenggaraan urusan agama serta pendidikan agama dan keagamaan Hindu;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama serta pendidikan agama dan keagamaan Hindu;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama serta pendidikan agama dan keagamaan Hindu;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu berdasarkan PMA Nomor 25 Tahun 2024 pasal 333 terdiri atas :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
2. Direktorat Urusan Agama Hindu; dan
3. Direktorat Pendidikan Hindu.

Pasal 336 menyebutkan susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terdiri atas :

- a. Bagian Umum dan Barang Milik Negara; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Selanjutnya pasal 341 menyebutkan susunan organisasi Direktorat Urusan Agama Hindu terdiri atas :

- a. Subdirektorat Kelembagaan;
- b. Subdirektorat Penyuluhan;
- c. Subdirektorat Pemberdayaan Umat;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Dan pasal 351 menyebutkan susunan organisasi Direktorat Pendidikan Hindu terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pendidikan Dasar;
- b. Subdirektorat Pendidikan Menengah;
- c. Subdirektorat Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Lebih lanjut penjabaran organisasi dan tata kerja Ditjen Bimas Hindu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tergambar pada diagram 1 berikut ini:

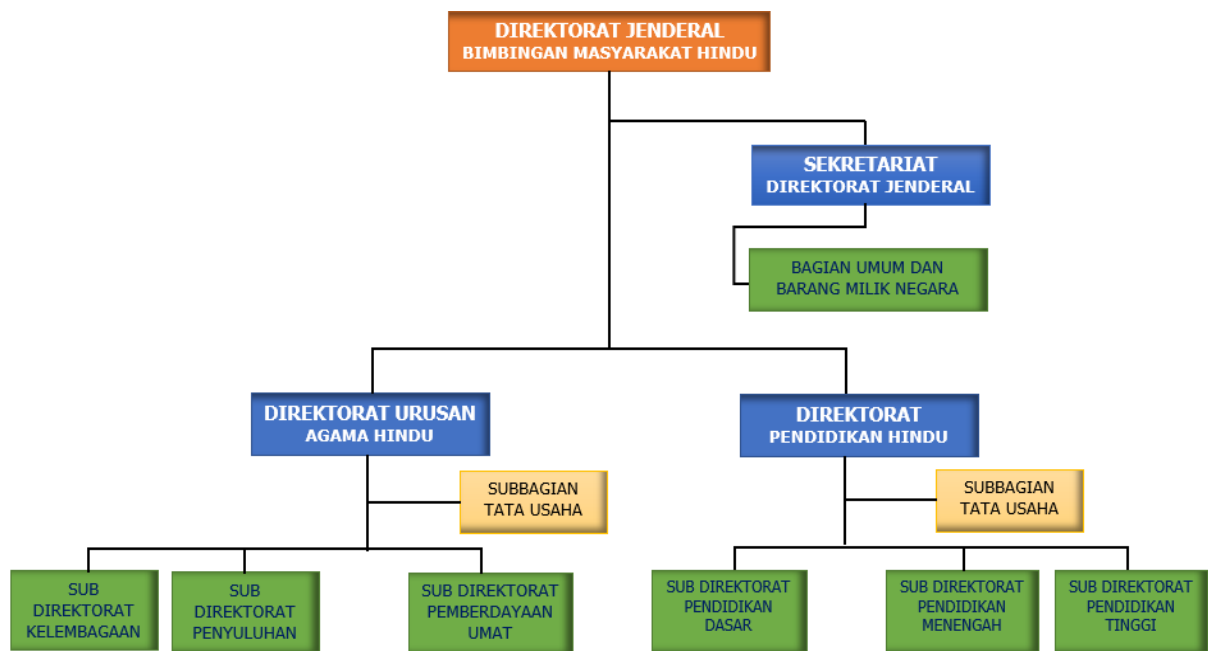


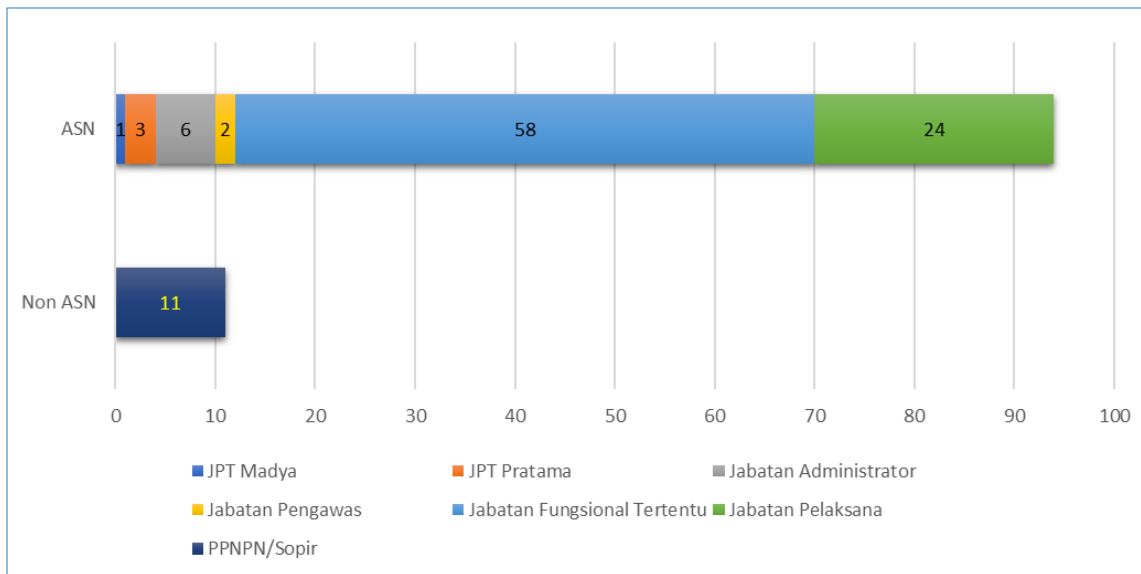
Diagram 1. Struktur Organisasi

## E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ditjen Bimas Hindu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 3.088 orang dengan status kepegawaian terdiri atas ASN dan Non ASN dari berbagai bidang keahlian seperti agama, hukum, ekonomi, pendidikan, manajemen, teknik dan sebagainya. Berdasarkan kewenangan, SDM tersebut tersebar pada Ditjen Bimas Hindu (Satker Pusat) sebanyak 105 orang, Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN) sebanyak 1201 orang, dan Satker Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebanyak 1765 orang. Adapun sebaran SDM berdasarkan kewenangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah seluruh SDM pada Ditjen Bimas Hindu (Satker Pusat) sebanyak 105 orang dengan status kepegawaian ASN yang terdiri atas PNS sebanyak 62 orang, PPPK sebanyak 32 orang dan Non ASN (PPNPN/sopir) sebanyak 11 orang. Adapun sebaran SDM tersebut berdasarkan jabatan yaitu (1) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, yang dijabat oleh 1 (satu) orang Direktur Jenderal; (2) JPT Pratama, yang dijabat oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Direktur; (3) Jabatan Administrator, yang dijabat oleh Kepala Bagian/Subdirektorat sebanyak 6 (enam)

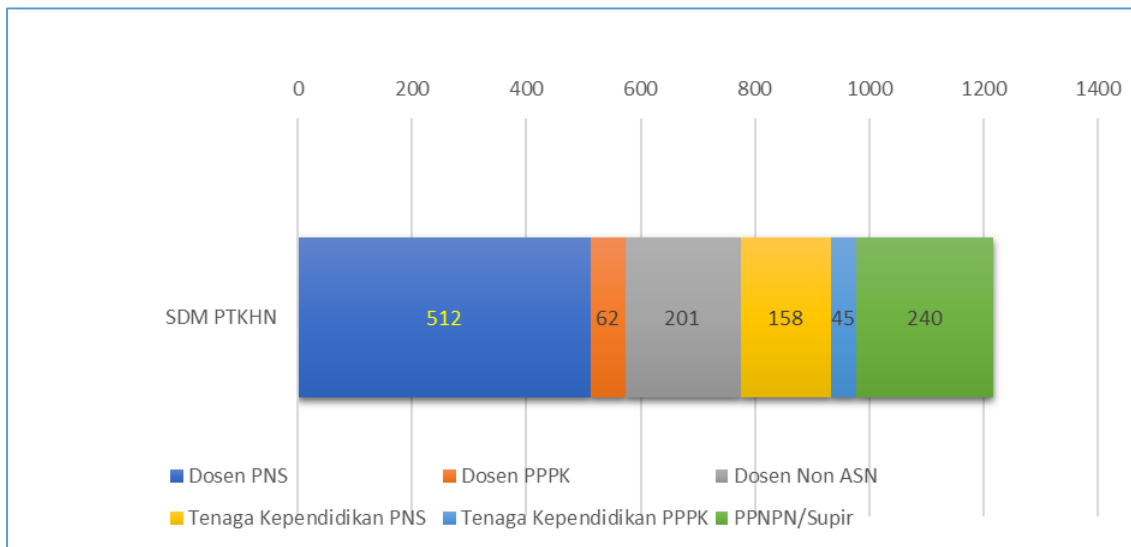
orang dan 1 (satu) Jabatan Subdirektorat masih belum terisi; (4) Jabatan Pengawas, yang dijabat oleh Kasubbag TU sebanyak 2 (dua) orang; (5) Jabatan Fungsional terdiri atas Asesor SDM, Analis SDM, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pengembang Teknologi Pendidikan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pranata Humas, Analis Hukum, Arsiparis, Pranata Keuangan APBN, Pranata Komputer dan lain sebagainya sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang; (6) Jabatan Pelaksana sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Lebih lanjut mengenai sebaran SDM Ditjen Bimas Hindu (Satker Pusat) berdasarkan jabatan, sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1. Sebaran Sumber Daya Manusia Aparatur pada Ditjen Bimas Hindu (Satker Pusat) berdasarkan Jabatan Tahun 2024

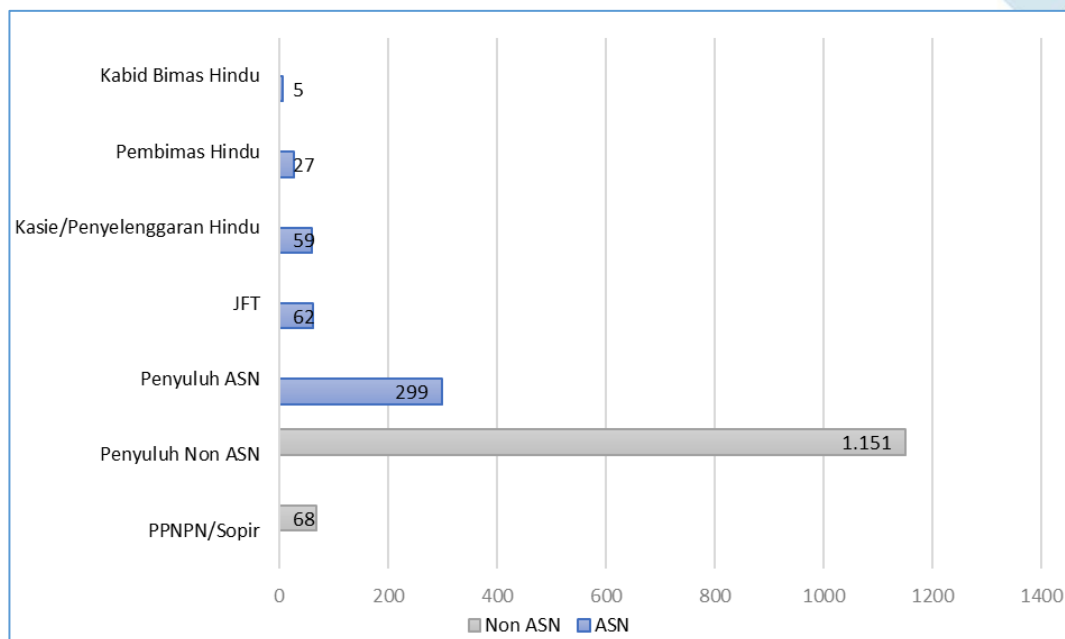
Dari data hasil Analisis Beban Kerja (ABK) Ditjen Bimas Hindu (Satker Pusat) berdasarkan KMA Nomor 605 Tahun 2020 ditetapkan ABK sebanyak 114 (seratus empat belas). Adapun data jumlah SDM yang berstatus PNS pada Ditjen Bimas Hindu (Satker Pusat) hingga akhir tahun 2024 sebanyak 62 orang dan PPPK sebanyak 32 orang, sehingga jumlah pegawai yang mengisi jabatan yang tersedia sebanyak 94 orang. Terdapat kekurangan jumlah SDM sesuai hasil ABK sebanyak 20 orang. Ketersediaan tenaga bantu PPNPN hingga saat ini sebanyak 7 orang diharapkan dapat mengatasi kekurangan jumlah pegawai, namun tetap mengalami kekurangan jumlah pegawai. Dari data tersebut, secara kuantitas ketersediaan SDM yang dimiliki oleh Ditjen Bimas Hindu saat ini masih belum mencukupi, dalam penempatan pegawai juga belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga tidak semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Untuk itu, Ditjen Bimas Hindu melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang memadai sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Selanjutnya jumlah seluruh SDM Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN) sebanyak 1.201 orang dengan status kepegawaian yakni ASN dan Non PNS. Adapun sebaran SDM PTKHN tersebut berdasarkan status kepegawaian yaitu (1) Dosen PNS sebanyak 512 orang, jumlah ini sudah termasuk 25 Guru Besar; (2) Dosen PPPK sebanyak 54 orang, dan Dosen Non ASN sebanyak 201 orang; (3) Tenaga Kependidikan PNS sebanyak 158 orang, tenaga kependidikan PPPK sebanyak 45 orang, dan PPNPN/Supir sebanyak 240 orang. Lebih lanjut mengenai sebaran SDM PTKHN berdasarkan jabatan, sebagaimana grafik berikut:



Grafik 2. Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur pada Satker PTKHN Tahun 2024

Berikutnya jumlah seluruh SDM Satker Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebanyak 1765 orang dengan status kepegawaian ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN. Adapun sebaran SDM Satker Daerah tersebut berdasarkan jabatan yaitu (1) Kabid Bimas Hindu, sebanyak 5 orang; (2) Pembimas Hindu, sebanyak 27 orang; (3) Kepala Seksi/Penyelenggaraan Hindu sebanyak 59 orang; (4) Penyuluh agama Hindu PNS sebanyak 138 orang; (5) Penyuluh agama Hindu PPPK sebanyak 161 orang, (6) Penyuluh agama Hindu Non PNS sebanyak 1.151 orang, (7) JFT sebanyak 62 orang, (8) Pelaksana sebanyak 78 orang, (9) Pengawas sebanyak 16 orang, dan (10) PPNPN/Supir sebanyak 85 orang. Lebih lanjut mengenai sebaran SDM Satker Daerah berdasarkan jabatan, sebagaimana grafik berikut:



Grafik 3. Komposisi SDM Aparatur pada Satker Daerah Tahun 2024

## F. ISU – ISU STRATEGIS

Ditjen Bimas Hindu senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Ditjen Bimas Hindu 2020-2024, baik dalam bidang urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan serta dukungan manajemen. Dalam upaya pencapaian sasaran program telah teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Ditjen Bimas Hindu dalam pelaksanaan Renstra Ditjen Bimas Hindu. Adapun permasalahan yang telah teridentifikasi sebagai berikut :

### 1) Aspek Bidang Urusan Agama Hindu

Permasalahan utama pada bidang Urusan Agama Hindu meliputi:

- a. Pemanfaatan Candi Prambanan sebagai destinasi religi dan tempat ibadah umat Hindu Indonesia dan dunia.
- b. Pembentukan BDDN pada tingkat provinsi, petunjuk teknis dan sosialisasi;
- c. Pengembangan ekonomi keumatan Hindu sebagai upaya untuk membangun kemandirian rumah ibadah dengan membentuk Badan Usaha Rumah Ibadah belum cukup regulasi dan master plan;
- d. Peningkatan kualitas tata kelola rumah ibadah, pengelolaan perpustakaan rumah ibadah dan program pensertifikatan tanah bangunan rumah ibadah belum cukup regulasi dan sosialisasi serta tindaklanjut;
- e. Peningkatan kompetensi dan karir penyuluh, standar kinerja penyuluh belum dapat diukur dan kelompok binaan belum optimal;
- f. Penyiar agama Hindu belum tersedia regulasi, standar kinerja penyiar

- agama, dan lingkup tugasnya;
- g. Percepatan transformasi layanan digital untuk mempermudah akses layanan umat Hindu, belum tersedia grand disain bidang agama, dan komitmen bersama untuk membangun;
  - h. Rasio penyuluh agama dengan kelompok binaan belum tercapai;
- 2) Aspek Bidang Pendidikan
- a. Pemenuhan indikator dan sarana prasarana menuju *world class university* UHN IGB Sugriwa, belum adanya kurikulum *Outcome Base Education (OBE)* sebagai pemenuhan reputasi internasional;
  - b. Keberlanjutan kerjasama internasional pada PTKH belum seluruhnya dimplementasikan kedalam tri dharma perguruan tinggi;
  - c. Kekurangan formasi guru agama Hindu pada satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Umum yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dan masyarakat telah mengajukan permohonan SDM guru agama Hindu kepada Pembimas/Kabid Hindu dan Ditjen Bimas Hindu setiap tahunnya dan meneruskan usul tersebut kepada Pemerintah Daerah, namun tidak semua Pemerintah Daerah mengalokasikan formasi guru. Penting diperhatikan adalah masih lemahnya dalam komunikasi, data, arah kebijakan juga belum fokus pada permasalahan, dan kurangnya peran ormas keagamaan Hindu;
  - d. Penerapan program PAUD dan Wajib Belajar 12 tahun yang merupakan peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan belum mengacu pada program Renstra;
  - e. Rasio guru terhadap peserta didik dan rombongan belajar belum ideal, kinerja pendidik belum maksimal, mutu lulusan masih rendah;
- 3) Aspek Bidang Dukungan Manajemen
- a. Jumlah SDM pada Bimbingan Masyarakat Hindu tahun 2024 masih kurang memadai dalam memberikan pelayanan;
  - b. Manajemen SDM belum mampu mengantisipasi kebutuhan SDM dan permasalahannya;

## **G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN**

Sistematika penyajian laporan kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan**

Pada Bab ini menguraikan secara singkat latar belakang penyusunan laporan, gambaran organisasi, aspek strategis dan isu strategis serta sistematika penyajian;

### **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini menyajikan secara ringkas tentang rencana strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja;

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

Mengurai dan menjelaskan capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja, capaian kinerja lainnya, dan capaian kinerja anggaran tahun 2024;

### **Bab IV – Penutup**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja
- C. Perencanaan Anggaran



**PENANDATANGANAN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**



## **PENYERAHAN DIPA TAHUN 2024**

## Bab II Perencanaan Kinerja

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2020-2024 (Renstra Ditjen Bimas Hindu) disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024. Renstra Ditjen Bimas Hindu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 127 Tahun 2020 Tentang Renstra Ditjen Bimas Hindu 2020-2024. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan target kinerja sesuai tugas dan fungsi Kementerian Agama khususnya dalam bidang urusan agama dan pendidikan Hindu serta mandatori kepada Ditjen Bimas Hindu dalam kurun 5 tahun.

Sesuai dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden bahwa hanya ada Visi Presiden dan Wakil Presiden. Tingkat Kementerian/Lembaga sebagai pendukung dan memberikan kontribusi mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan karakteristik bidangnya. Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”* Merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Agama menetapkan visi sebagai berikut:

#### 1. Visi Kementerian Agama

*“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”*

Terdapat 6 (enam) kata kunci di dalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Profesional**, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
- 2) **Andal**, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
- 3) **Saleh**, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
- 4) **Moderat**, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
- 5) **Cerdas**, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
- 6) **Unggul**, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, dapat dijelaskan bahwa Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang

memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.

Selanjutnya “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Lebih lanjut “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”

## 2. Misi Kementerian Agama

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
  - 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
  - 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
  - 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
  - 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
  - 6) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024, Kementerian Agama berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan khalik-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang pendidikan, Kementerian Agama terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu

pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien. sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.

### 3. Tujuan Kementerian Agama

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas, Kementerian Agama menetapkan Tujuan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
- 2) Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- 3) Peningkatkan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- 4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khasagama, pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas;
- 5) Peningkatan lulusan Pendidikan agama dan keagamaan yang produktif dan memilikidaya saing komparatif; dan
- 6) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive.

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama, Ditjen Bimas Hindu menetapkan Indikator Keberhasilan atas tujuan tersebut, dan 17 (tujuh belas) Sasaran Program dengan 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan,Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Peningkatan kualitas umat beragama menjalankan ibadah ritual dan sosial Indikator : Rasio penyuluh agama Hindu dengan kelompok sasaran yang	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu	Rasio penyuluh agama Hindu dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Hindu

	mendapatkan bimbingan agama Hindu.		Persentase frekuensi penyuluhan agama Hindu kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal
2	Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Indikator : Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran.	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat Hindu melalui pendekatan moderasi beragama	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan
		Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	Tingkat Moderasi beragama kelompok sasaran
		Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan
			Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat
		Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	
3	Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan. Indikator : Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literasi keagamaan	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital
		Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran
			Persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana
4	Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas. Indikator : Persentase peningkatan siswa pada Pratama/Adhy/Madyama/Utama Widya Pasraman dan Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH.	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama
			Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama

		Meningkatnya asesmen & kemampuan berfikir siswa	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi
			Rerata nilai asesmen kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika dan sains dalam PISA
		Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	Persentase guru bersertifikat pendidik
			Persentase dosen bersertifikat pendidik
			Persentase dosen berkualifikasi S3
		Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman
			Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman
			Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman
			Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman
			Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH
Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang		
Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP		
	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul		

			<p>Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan</p> <p>Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan</p>
		Menguatnya pendidikan karakter siswa	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik
5	<p>Peningkatan lulusan pendidikan agama dan keagamaan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif.</p> <p>Indikator :            Rerata IPK Kelulusan Mahasiswa (S1,S2,S3) dan Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan.</p>	Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional	Persentase PTKH yang memperoleh predikat reputasi internasional
		Meningkatnya kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja	<p>Persentase PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan</p> <p>Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKH :</p> <p>a. S1 b. S2 c. S3</p>
			Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional
6	<p>Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive.</p> <p>Indikator :</p>	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diselesaikan

	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).	yang efektif dan akuntabel	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			Nilai Maturitas SPIP
			Indeks Profesionalitas ASN

#### 4. Arah Kebijakan dan Strategi

Guna mendukung Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Agama, Ditjen Bimas Hindu menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang agama dan pendidikan dalam lima tahun ke depan. Adapun langkah strategis yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu. Adapun strateginya adalah:
  - a. Pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama Hindu sekaligus sebagai agen siar dharma dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat Hindu;
  - b. Peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat Hindu;
  - c. Peningkatan umat Hindu yang mengikuti ritual keagamaan di kelompok binaan penyuluh agama Hindu;
  - d. Penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai agama Hindu;
  - e. Pemberdayaan kelompok sasaran penyuluh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Hindu;
  - f. Peningkatan pembinaan pelayanan terhadap keluarga umat Hindu dalam mewujudkan keluarga sukhinah dengan nilai-nilai agama Hindu.
- 2) Peningkatan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu dalam rangka mewujudkan moderasi beragama. Strategi yang akan ditempuh:
  - a. Peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosialkeagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama Hindu yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
  - b. Peningkatan frekuensi forum dialog dengan tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi inter umat beragama Hindu;
  - c. Peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahandan penyelesaian konflik;
  - d. Peningkatan pembinaan kepada desa kerukunan inter umat beragama.
- 3) Peningkatan kualitas pembinaan moderasi beragama dalam mewujudkan

- moderasi beragama, hal tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:
- a. Peningkatan pembinaan kepada penyuluh agama Hindu yang berwawasan moderat sebagai garda depan di masyarakat yang memberikan penyuluhan agama kepada umat Hindu;
  - b. Peningkatan jumlah penyuluh melalui penyuluh agama Hindu non PNS;
  - c. Pemberian tunjangan kepada penyuluh agama non PNS di seluruh Indonesia;
  - d. Pemberian Diklat kepada penyuluh agama Hindu non PNS bekerjasama dengan Badan Diklat Kemenag dalam pelaksanaannya;
  - e. Penerbitan pedoman kepada penyuluh agama Hindu dalam pelaksanaan tugasnya.
- 4) Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya, yang difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- a. Pembinaan lembaga agama dan keagamaan sebagai media dalam memberikan pembinaan kepada umat Hindu, dimana lembaga agama dan keagamaan ini diharapkan mampu memberikan;
  - b. Pemberian bantuan operasional kepada lembaga agama dan keagamaan agar senantiasa dapat terus beroperasi untuk membantu pemerintah dalam memberikan pembinaan;
  - c. Pembinaan melalui kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama seperti Utsawa Dharmagita dan Festival Keagamaan Hindu.
- 5) Peningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Strategi yang akan dilakukan adalah:
- a. Digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi
  - b. Pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
  - c. Peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (frontline) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
  - d. Peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
  - e. Peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
  - f. Peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
  - g. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
  - h. Peningkatan dalam penyediaan rumah ibadah yang suci dan damai;

- i. Pembinaan kepada pengelola rumah ibadah dan pengelola perpustakaan rumah ibadah;
  - j. Peningkatan siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan diruang publik.
- 6) Peningkatan kualitas penerimaan dana keagamaan Hindu melalui lembaga ekonomi keagamaan Hindu yang dimanfaatkan untuk mendukung untuk pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan dicapai melalui strategi sebagai berikut:
- a. Penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat Hindu;
  - b. Meningkatnya pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana punia;
  - c. Meningkatnya pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan (dharma dana);
  - d. Peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
  - e. Peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan (dana punia) dilembaga dan rumah ibadah;
  - f. Peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan (dana punia) kepada masyarakat.
- 7) Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat pada setiap satuan pendidikan, guna meningkatkan rerata nilai ujian sekolah pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman dan rerata nilai ujian mata kuliah pada PTKH yang bermuatan moderasi, dicapai dengan strategi:
- a. Peningkatan kompetensi guru agama Hindu;
  - b. Peningkatan guru berkualifikasi S1/S2;
  - c. Penguatan dan pemberdayaan KKG/MGMP;
  - d. Pemberian Bantuan pada sekolah minggu/pasraman;
  - e. Penyempurnaan kurikulum agar bermuatan moderasi beragama;
  - f. Peningkatan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan pada PTKH.
- 8) Peningkatan kualitas asesmen dan kemampuan berfikir siswa, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kemampuan literasi, dan berfikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia. Strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:
- a. Menerapkan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir pada semua jenjang pendidikan tingkat sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman);
  - b. Penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah (kelas 1, 2 dan 3 pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman);

- c. Penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk basispeningkatan mutu;
  - d. Peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran;
  - e. Penyelenggaraan assesmen kompetensi untuk siswa (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman);
  - f. Peningkatan buku dan media pembelajaran yang disediakan;
  - g. Pemberian tunjangan berdasarkan kinerja kepada guru pada sekolah keagamaan di setiap satuan pendidikan (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman).
- 9) Peningkatan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan, dicapai dengan strategi:
- a. Peningkatan jumlah guru yang bersertifikat pendidik;
  - b. Peningkatan jumlah dosen yang bersertifikat pendidik;
  - c. Peningkatan jumlah guru agama Hindu pada sekolah umum maupun sekolahkeagamaan yang mengikuti PPG;
  - d. Peningkatan jumlah Guru PA Hindu Non PNS Penerima Tunjangan Profesi;
  - e. Pemberian beasiswa S2 untuk calon pengawas dan kepala sekolah keagamaan Hindu (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman);
  - f. Peningkatan jumlah dosen non PNS penerima tunjangan profesi dosen non PNS;
  - g. Peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi S3;
  - h. Peningkatan jumlah dosen yang menerima sertifikasi dosen;
  - i. Peningkatan jumlah dosen non PNS yang menerima tunjangan fungsional dosen non PNS;
  - j. Pembinaan kompetensi pada tenaga kependidikan di PTKH.
- 10) Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan, guna meningkatkan jumlah siswa pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman setiap tahunnya. Strategi yang akan ditempuh sebagai berikut:
- a. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk Pratama/Adhi/Madya/Utama Widya Pasraman;
  - b. PIP Tk Adhy/Madya/Utama Widya Pasraman;
  - c. Pembangunan Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman di daerah afirmasi/3T;
  - d. PIP Kuliah;
  - e. Pemberian Beasiswa Bidik Misi
  - f. Pemberian Beasiswa Prodi Langka;
  - g. Pemberian Beasiswa Mahasiswa Miskin;
  - h. Pemberian Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);

- i. BOPTN (Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri).
- 11) Peningkatan jumlah guru yang memenuhi SNP per jenjang di setiap daerah dicapaidengan strategi:
- a. Data guru agama Hindu yang akurat;
  - b. Data sebaran umat Hindu/peserta didik yang akurat;
  - c. Peningkatan kompetensi guru;
  - d. Peningkatan sebaran akses pendidikan setiap satuan pendidikan;
  - e. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah daerah;
  - f. Pemenuhan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi minimal.
- 12) Peningkatan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan guna peningkatan jumlah sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) yang memenuhi standar nasional pendidikan serta peningkatan jumlah PTKH yang mendapatkan akreditasi. Strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:
- a. Bantuan sarana dan prasarana pendidikan agar sekolah dan PTKH memenuhi SPM sarana dan prasarana;
  - b. Peningkatan penjaminan mutu pada sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) sesuai dengan SNP;
  - c. Peningkatan jumlah sekolah (Adhi Widya/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) yang telah mendapatkan akreditasi;
  - d. Penerapan metode pembelajaran daring pada sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman);
  - e. Peningkatan jumlah siswa (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) yang mengikuti kompetensi nasional maupun internasional;
  - f. Implementasi Merdeka Belajar di sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman);
  - g. Peningkatan penjaminan mutu pada PTKH;
  - h. Peningkatan jumlah PTKH yang telah mendapatkan akreditasi minimal A;
  - i. Penerapan metode pembelajaran daring pada PTKH;
  - j. Pelaksanaan PPG pada LPTK;
  - k. Peningkatan jumlah mahasiswa PTKH yang mengikuti kompetensi nasional maupun internasional;
  - l. Implementasi Kampus Merdeka pada PTKH.
- 13) Penguatan pendidikan karakter siswa akan dicapai dengan strategi sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan program pendidikan karakter di sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) seperti

- Pasraman kilat dan Jambore Pasraman;
- b. Peningkatan jumlah sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman) yang Ramah Anak;
  - c. Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di sekolah (Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman).
- 14) Peningkatan kualitas PTKH yang bereputasi internasional. Adapun strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:
- a. Peningkatan jumlah PTKH yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional;
  - b. Peningkatan PTKH yang melakukan kolaborasi Internasional;
  - c. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri.
- 15) Peningkatan kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja (kerjasama PTKH dengan industri) akan dicapai melalui strategi sebagai berikut:
- a. Peningkatan pembinaan kepada peserta didik;
  - b. Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat;
  - c. Peningkatan program magang;
  - d. Peningkatan ekstrakurikuler di PTKH dalam rangka meningkatkan skill.
- 16) Peningkatan kualitas pemanfaatan penelitian, melalui peningkatan jumlah jurnal ilmiah pada PTKH yang terakreditasi nasional. Strategi yang akan ditempuh sebagai berikut:
- a. Peningkatan jumlah hasil penelitian PTKH yang memperoleh HAKI;
  - b. Peningkatan jumlah hasil penelitian PTKH yang menghasilkan hak paten.
- 17) Peningkatan kualitas tata kelola organisasi Ditjen Bimas Hindu yang efektif, transparan dan akuntabel, dengan meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan, peningkatan nilai PMPRB, peningkatan nilai SAKIP, peningkatan nilai maturitas SPIP dan peningkatan Indeks Profesionalitas ASN serta peningkatan kualitas administrasi pendidikan keagamaan akan dicapai dengan strategi sebagai berikut:
- a. Peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan jaman;
  - b. Peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid, reliabel, uptodate, dan terdigitalisasi;
  - c. Pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
  - d. Peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
  - e. Penguatan *public campaign/maintstreaming*/pengarusutamaan RB secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB;
  - f. Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis rencana strategis;
  - g. Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar

- akuntansi pemerintah;
- h. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
  - i. Peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
  - j. Peningkatan layanan tanggap darurat;
  - k. Penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan road map peningkatan kompetensinya;
  - l. Peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
  - m. Restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
  - n. Penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
  - o. Peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
  - p. Peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
  - q. Penguatan pengawasan internal berbasis kinerja;
  - r. Peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.

## **B. PENETAPAN KINERJA**

Penetapan Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 yang berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan komitmen dari pimpinan yang berisikan tekad dan janji kinerja dalam kurun waktu satu tahun tertentu yang disajikan dengan jelas dan dapat diukur serta mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai bentuk penerima tugas dengan pemberi tugas. Hal ini juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan atas pencapaian dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penetapan Kinerja Ditjen Bimas Hindu berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Reviu Atas Pelaporan Kinerja pada Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. Penetapan Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024

No	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Target
<b>Bidang Agama</b>			
1	Meningktanya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu	1. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu	1:5
		2. Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu	90,00%
2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama	1. Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	100,00%
3	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1. Tingkat moderasi beragama kelompok binaan	95,00
4	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1. Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%
5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1. Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	80,00%
		2. Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	100,00%
6	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu	1. Persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana	90,00%
<b>Bidang Pendidikan</b>			
7	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1. Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama	7,00
		2. Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama	7,00

8	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berfikir siswa	1. Rerata Nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi	Literasi : 430 Numerasi : 390
		2. Rerata Nilai asesmen kemampuan berfikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA	Membaca: 430 Matematika: 390 Sains: 400
9	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	1. Persentase guru bersertifikat pendidik	80,00%
		2. Persentase dosen bersertifikat pendidik	70,00%
		3. Persentase dosen berkualifikasi S3	30,00%
10	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	1. Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman	10,00%
		2. Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman	7,00%
		3. Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman	5,00%
		4. Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman	5,00%
		5. Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH	10,00%
11	Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	1. Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP perjenjang	8,00%
12	Meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	1. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP	10,00%
		2. Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul	15,00%
		3. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	10,00%
		4. Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	70,00%

13	Menguatnya Pendidikan karakter siswa	1. Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik	90,00%
14	Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional	1. Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional	5,00%
15	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima didunia kerja	1. Persentase PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	30,00%
		2. Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKH	
		a. S1	3,25
		b. S2	3,25
		c. S3	3,50
		3. Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan	12 Bulan
16	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	1. Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	22,50%
<b>Bidang Manajemen</b>			
17	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel	1. Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	85,00%
		2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80,04
		3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80,05
		4. Nilai Maturitas SPIP	2,04
		5. Indeks Profesionalitas ASN	80,00

Penetapan Kinerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 diimplementasikan dalam 2 fungsi dengan dukungan 5 program. Menurut fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi agama yang memuat kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan pelayanan kehidupan beragama dan menguatkan peran

lembaga keagamaan yang didukung tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel serta mewujudkan pemahaman dan persepsi umat mengenai kerukunan antar umat beragama. Disamping itu, melaksanakan tugas teknis lainnya memuat kegiatan peningkatan pelaksanaan dukungan manajerial dan kualitas pelayanan administrasi serta pelaksanaan tugas teknis lainnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah penyiapan regulasi atau produk hukum, penataan organisasi, pengelolaan perencanaan dan penganggaran, SDM, keuangan, data, sistem informasi dan hubungan masyarakat, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporan Ditjen Bimas Hindu

2. Aspek bidang pendidikan Hindu memuat kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan dan pembinaan pendidikan Hindu, peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi Hindu serta penyelenggaraan administrasi dan perkantoran Pendidikan Bimas Hindu.

### C. PERENCANAAN ANGGARAN

Guna mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, Ditjen Bimas Hindu memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp480.272.138.000,-** (empat ratus delapan puluh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Nomor SP DIPA-025.07-0/2024 tanggal 23 Nopember 2023. Alokasi pagu tahun 2024 lebih tinggi dari alokasi pagu Dipa Induk tahun 2023 yang hanya sebesar **Rp452.782.469.000,-** (empat ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024 terus berlanjut sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 23 Desember 2023. Adapun besaran anggaran Ditjen Bimas Hindu yang terkena dampak kebijakan tersebut sebesar **RP49.094.159.000,-** (empat puluh sembilan miliar sembilan puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau 10,22% dari pagu anggaran. Disamping terdampak blokir AA masih terdapat blokir reguler akibat kekurangan data dukung sebesar **RP427.700.000,-** (empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga total anggaran yang diblokir sebesar **RP49.521.859.000,-** (empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Pada tri wulan keempat Menteri Keuangan Republik Indonesia menyetujui relaksasi *automatic adjustment* tahun anggaran 2024 melalui surat Nomor : S-399/MK.2/2024 tanggal 19 November 2024. Selanjutnya Ditjen Bimas Hindu melakukan revisi pemotongan seluruh anggaran yang terblokir guna menutupi kekurangan belanja pegawai dilingkungan Ditjen Bimas Hindu dan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Dampak dinamika tersebut, anggaran Ditjen Bimas Hindu mengalami penurunan sebesar **Rp368.737.000,-** (tiga ratus enam puluh

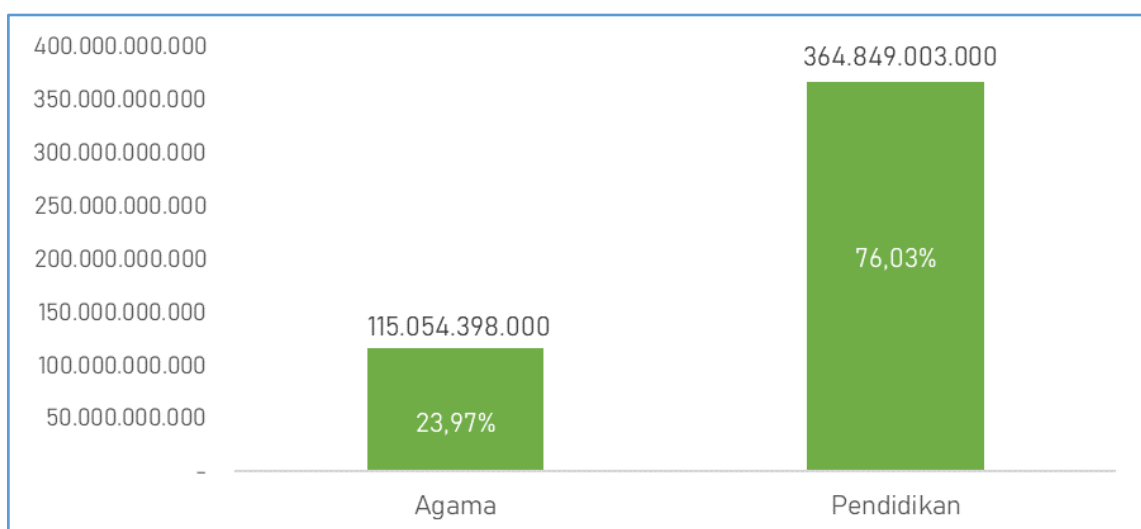
delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Adapun pagu Akhir Ditjen Bimas Hindu menjadi sebesar **Rp479.903.401.000,-** (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus satu ribu rupiah).

Alokasi anggaran tahun 2024 masih sangat jauh dari target usulan anggaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Bimas Hindu 2020-2024. Dari tahun pertama hingga tahun kelima (tahun 2024), alokasi anggaran ini belum pernah mencapai target anggaran yang ditetapkan dalam Renstra. Adapun alokasi anggaran tahun 2024 dalam Renstra Ditjen Bimas Hindu 2020-2024 sebesar Rp1.145.892.000.000 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Bila dibandingkan dengan dengan pagu akhir Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 terdapat kekurangan sebesar 58,12% atau Rp665.988.599.000 dari target alokasi anggaran pada Renstra. Secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Alokasi Anggaran dengan Target Anggaran Renstra 2024

Target Anggaran Renstra Tahun 2024	Alokasi Awal TA 2024	Pagu Akhir TA 2024	Selisih (A-C)	% (D/A*100%)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.145.892.000.000	480.272.138.000	479.903.401.000	-665.988.599.000	-58,12%

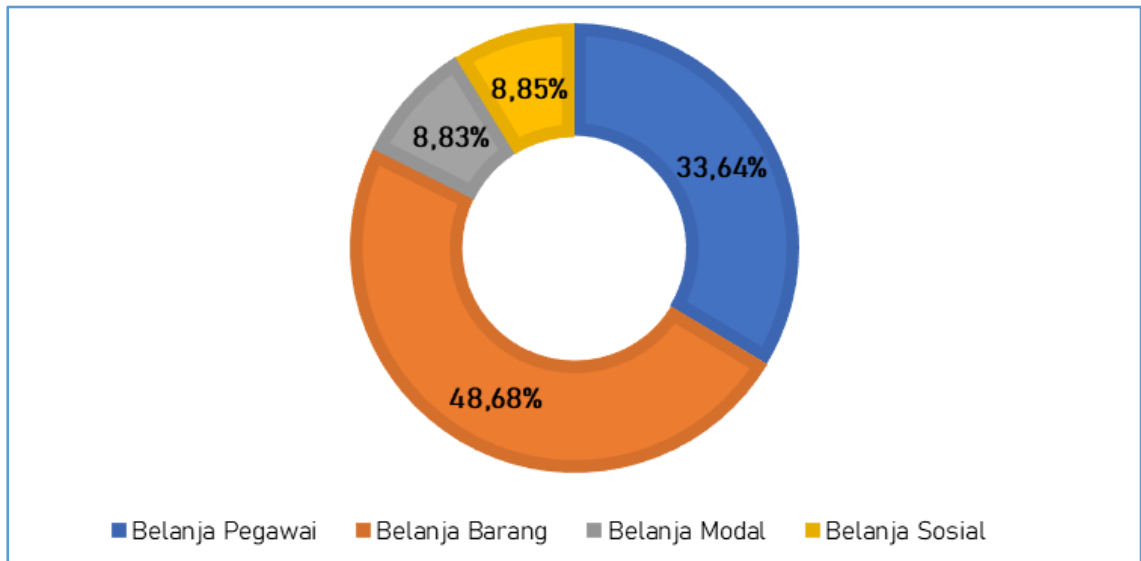
Anggaran Ditjen Bimas Hindu terdiri dari fungsi agama dan fungsi pendidikan. Adapun komposisi anggaran fungsi agama sebesar Rp115.054.398.000,- atau 23,97% dari jumlah pagu. Sedangkan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp364.849.003.000,- atau 76,03% dari jumlah pagu. Adapun secara rinci anggaran Ditjen Bimas Hindu berdasarkan fungsi TA 2024 sebagaimana grafik berikut:



Grafik 4. Komposisi Anggaran Berdasarkan Fungsi Tahun 2024

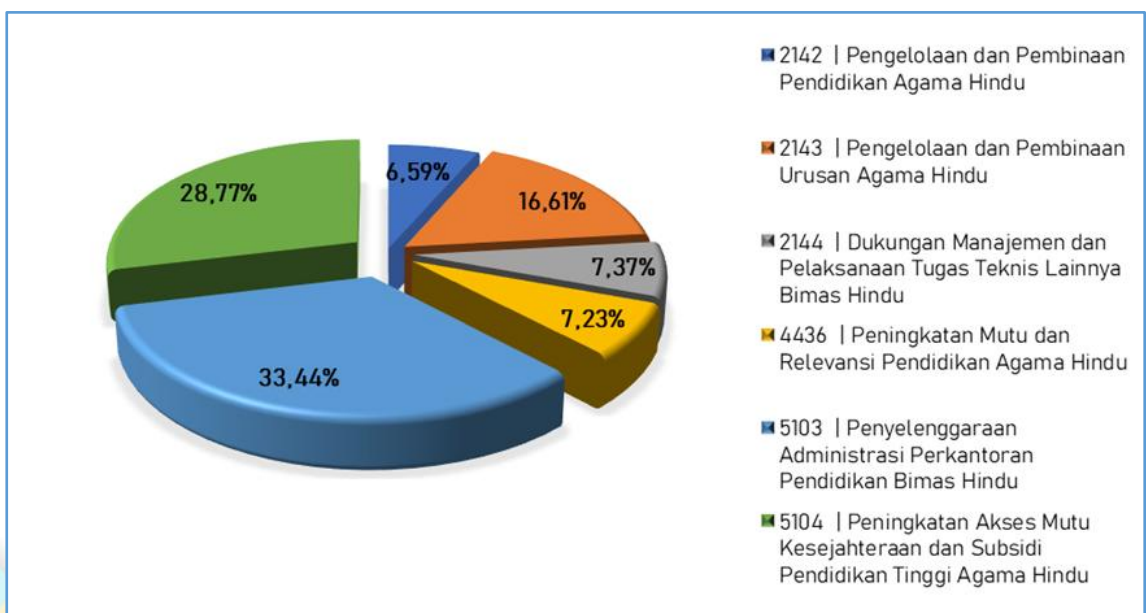
Berdasarkan jenis belanja, komposisi anggaran Ditjen Bimas Hindu terdiri dari 4

(empat) jenis belanja yaitu (1) belanja pegawai, (2) belanja barang, (3) belanja modal, dan (4) belanja Bantuan Sosial (Bansos). Alokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp161.450.241.000,- atau 33,64% dari jumlah pagu keseluruhan. Anggaran belanja barang sebesar Rp233.598.851.000,- atau 48,68%. Selanjutnya anggaran belanja modal sebesar Rp42.364.259.000,- atau 8,83% dan anggaran Bansos sebesar Rp42.490.050.000,- atau 8,85%. Secara rinci anggaran Ditjen Bimas Hindu berdasarkan jenis belanja TA 2024 sebagaimana grafik berikut:



Grafik 5. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024

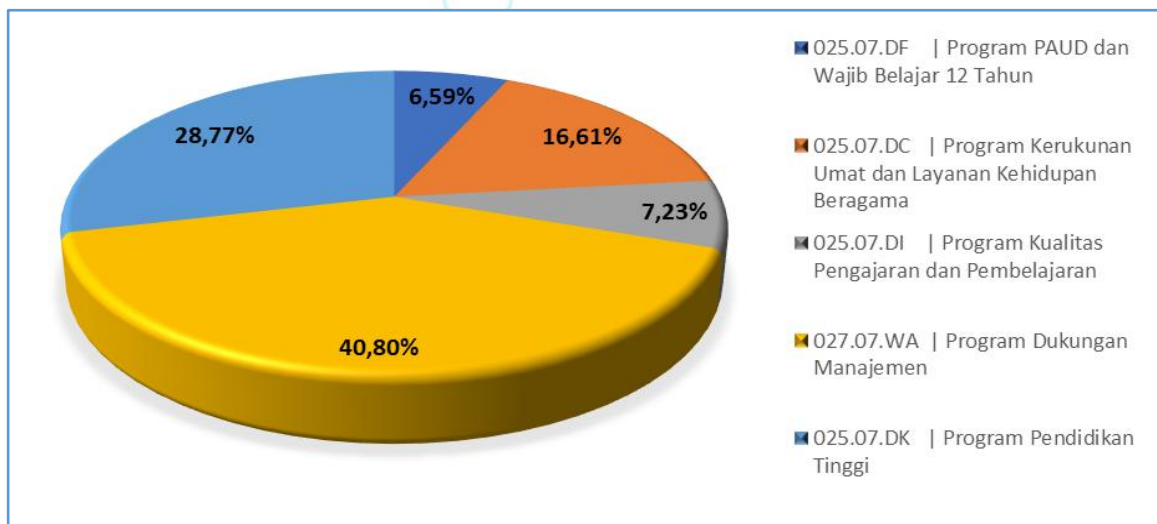
Komposisi anggaran Ditjen Bimas Hindu berdasarkan kegiatan terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu (1) kegiatan 2142 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu sebesar Rp31.624.455.000,- atau 6,59%, (2) kegiatan 2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu sebesar Rp79.701.078.000,- atau 16,61%, (3) kegiatan 4436 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama



Hindu sebesar Rp35.353.320.000,- atau 7,37%, (4) kegiatan 2144 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu sebesar Rp34.716.458.000,- atau 7,23%, (5) kegiatan 5103 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu anggaran sebesar Rp160.456.738.000,- atau 33,44%, dan (6) kegiatan 5104 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu sebesar Rp138.051.352.000,- atau 28,77% dari jumlah pagu anggaran tahun 2024. Anggaran kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu memiliki alokasi yang paling besar dibandingkan dengan kegiatan yang lainnya. Adapun lebih detilnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 6. Komposisi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2024

Komposisi anggaran Ditjen Bimas Hindu berdasarkan program terdiri dari 5 (lima) program yaitu (1) 025.07.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama sebesar Rp79.701.078.000,- atau 16,61%. Selanjutnya (2) 025.07.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun sebesar Rp31.624.455.000,- atau 6,59%. (3) 025.07.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp34.716.458.000,- atau 7,23%, lebih lanjut (4) 025.07.DK Program Pendidikan Tinggi sebesar Rp138.051.352.000,- atau 28,77%, dan (5) 025.07.WA Program Dukungan Manajemen sebesar Rp195.810.058.000,- atau 40,80% dari jumlah pagu anggaran. Secara rinci anggaran Ditjen Bimas Hindu berdasarkan program TA 2024 sebagaimana grafik berikut



Grafik 7. Komposisi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2024



**RAKERNAS  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT HINDU  
TAHUN 2024**

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Tahun 2024
- B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program
- C. Realisasi Anggaran
- D. Kinerja Anggaran Tahun 2024
- E. Capaian Program Prioritas Kementerian Agama
- F. Dukungan Ditjen Bimas Hindu Terhadap Program Prioritas Presiden
- G. Capaian Kinerja Lainnya



**UTSAWA DHARMA GITA  
TINGKAT NASIONAL KE XV  
TAHUN 2024**

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu dilakukan dengan cara membandingkan antara terget (rencana) dan realisasi IKSP pada masing-masing SP guna menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan. Adapun formula perhitungan persentase capaian Indikator Kinerja yang akan digunakan yakni:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \left( \text{Target} - \left( \frac{\text{Realisasi} - \text{target}}{\text{Target}} \right) \right) \times 100\%$$

Berdasarkan KMA 94 Tahun 2021, nilai batas atas capaian kinerja sebesar 120% dan batas bawah 0%. Capaian kinerja yang melebihi 120% dan kurang dari 0% akan disertai penjelasan lebih rinci. Adapun status capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 ditunjukkan dengan warna Biru, Hijau, Kuning, dan Merah seperti pada gambar berikut:

> 100 - 120 Sangat Baik	80 - 100 Baik	50 - 79,99 Cukup	< 50 Kurang
----------------------------	------------------	---------------------	----------------

Gambar 1. Status Capaian Kinerja Ditjen Bimas Hindu

Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran program Ditjen Bimas Hindu berdasarkan pengukuran indikator kinerja tahun 2024 sebesar **89,40%** kategori **Baik**. Nilai capaian kinerja tahun 2024 lebih rendah dari rata-rata nilai kinerja tahun 2023 yang sebesar **94,43%** sama-sama kategori **Baik**. Penurunan capaian ini disebabkan terdapat jumlah hasil pengukuran IKSP yang kategori Kurang dengan capaian <50% meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah hasil pengukuran IKSP kategori Kurang tahun 2024 sebanyak 6 IKSP dan tahun 2023 sebanyak 4 IKSP. Hal ini juga mempengaruhi jumlah capaian sasaran program yang berkategori Sangat Baik dengan capaian >100-120% mengalami penurunan dari tahun 2023. Nilai capaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Capaian Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
<b>Aspek Bidang Agama</b>					<b>76,44%</b>	<b>Cukup</b>
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu	1. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu	1:5	1:8	62,50%	Cukup
		2. Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu	90,00%	100,00 %	111,11%	Sangat Baik
<b>Rerata Capaian Sasaran 1</b>					<b>86,81%</b>	<b>Baik</b>
2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama	1. Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	100,00%	100,00 %	100,00%	Baik
<b>Rerata Capaian Sasaran 2</b>					<b>100,00%</b>	<b>Baik</b>
3	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1. Tingkat moderasi beragama kelompok binaan	95,00	90,00	94,74%	Baik
<b>Rerata Capaian Sasaran 3</b>					<b>94,74%</b>	<b>Baik</b>
4	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1. Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100,00%	100,00 %	100,00%	Baik
<b>Rerata Capaian Sasaran 4</b>					<b>100,00%</b>	<b>Baik</b>
5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1. Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	80,00%	33,33 %	41,67%	Kurang
		2. Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai	100,00%	100,00 %	100,00%	Baik

		dengan sasaran					
<b>Rerata Capaian Sasaran 5</b>					<b>70,83%</b>	<b>Cukup</b>	
6	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu	1. Persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana	90,00%	5,64%	6,26%	Kurang	
<b>Rerata Capaian Sasaran 6</b>					<b>6,26%</b>	<b>Kurang</b>	
<b>Aspek Bidang Pendidikan</b>					<b>94,17%</b>	<b>Baik</b>	
7	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1. Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama	7,00	7,30	104,29%	Sangat Baik	
		2. Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama	7,00	8,59	122,71%	Sangat Baik	
<b>Rerata Capaian Sasaran 7</b>					<b>113,50%</b>	<b>Sangat Baik</b>	
8	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berfikir siswa	1. Rerata Nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi			114,08%	Sangat Baik	
		Literasi	420	473,5	110,12%		
		Numerasi	390	460,4	118,05%		
		2. Rerata Nilai asesmen kemampuan berfikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA					Kurang
		membaca	430	0,00	0,00%		
		matematika	390	0,00	0,00%		
sains	400	0,00	0,00%				
<b>Rerata Capaian Sasaran 8</b>					<b>57,04%</b>	<b>Cukup</b>	
9	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	1. Persentase guru bersertifikat pendidik	80,00%	41,35%	51,69%	Cukup	
		2. Persentase dosen bersertifikat pendidik	70,00%	84,50 %	120,72%	Sangat Baik	
		3. Persentase dosen berkualifikasi S3	30,00%	26,32 %	87,74%	Baik	
<b>Rerata Capaian Sasaran 9</b>					<b>86,72%</b>	<b>Baik</b>	

10	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	1. Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman	10,00%	30,10%	301,03%	Sangat Baik
		2. Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman	7,00%	18,08%	258,24%	Sangat Baik
		3. Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman	5,00%	10,69%	213,79%	Sangat Baik
		4. Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman	5,00%	0,00%	0,00%	Kurang
		5. Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH	10,00%	3,52%	35,18%	Kurang
<b>Rerata Capaian Sasaran 10</b>					<b>120,00%</b>	<b>Sangat Baik</b>
11	Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	1. Persentase propinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP perjenjang	8,00%	31,58%	394,74%	Sangat Baik
<b>Rerata Capaian Sasaran 11</b>					<b>120,00%</b>	<b>Sangat Baik</b>
12	Meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	1. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP	10,00%	46,15%	461,54%	Sangat Baik
		2. Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul	15,00%	12,96%	86,42%	Baik
		3. Persentase Adhi Widya Pasraman/ Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	10,00%	46,15%	461,54%	Sangat Baik
		4. Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	70,00%	100%	142,86%	Sangat Baik

<b>Rerata Capaian Sasaran 12</b>						<b>120,00%</b>	<b>Sangat Baik</b>
13	Menguatnya Pendidikan karakter siswa	1. Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik	90,00%	75,97%	84,42%		Baik
<b>Rerata Capaian Sasaran 13</b>						<b>84,42%</b>	<b>Baik</b>
14	Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional	1. Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional	5,00%	0,00%	0,00%		Kurang
<b>Rerata Capaian Sasaran 14</b>						<b>0,00%</b>	<b>Kurang</b>
15	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima didunia kerja	1. Persentase PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	30,00%	71,43%	238,10%		Sangat Baik
		2. Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKH			112,50%		Sangat Baik
		-S1	3,25	3,55	109,23%		
		-S2	3,25	3,82	117,54%		
		-S3	3,50	3,76	107,43%		
3. Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan	12 Bulan	4 Bulan	300,00%		Sangat Baik		
<b>Rerata Capaian Sasaran 15</b>						<b>120,00%</b>	<b>Sangat Baik</b>
16	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	1. Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	22,50%	36,07 %	160,29%		Sangat Baik
<b>Rerata Capaian Sasaran 16</b>						<b>120,00%</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Aspek Bidang Dukungan Manajemen</b>						<b>116,06%</b>	<b>Sangat Baik</b>
17	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel	1. Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	85,00%	100,00 %	117,65%		Sangat Baik
		2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80,04	N/A	N/A		N/A
		3. Nilai Sistem	80,05	83,60	104,43%		Sangat

	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				Baik
	4. Nilai Maturitas SPIP	2,04	3,202	156,96%	Sangat Baik
	5. Indeks Profesionalitas ASN	80,00	79,4	99,25%	Baik
<b>Rerata Capaian Sasaran 17</b>				<b>119,57%</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2024</b>				<b>89,40%</b>	<b>Baik</b>

Dari tabel capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu tersebut diatas bahwa rerata capaian kinerja pada tahun 2024 diperoleh dari rerata capaian 17 SP dengan hasil pengukuran 36 IKSP. Adapun nilai capaian 17 SP tersebut dengan rincian sebagai berikut yakni 7 (tujuh) SP berkategori Sangat Baik dengan capaian >100-120%, jumlah capaian SP kategori ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yang berjumlah 10 SP. Selanjutnya terdapat 6 (enam) SP berkategori Baik dengan capaian antara 80-100%, jumlah capaian SP kategori ini bertambah dari tahun 2023 yang berjumlah 4 SP. Lebih lanjut terdapat 2 (dua) SP berkategori Cukup dengan capaian antara 50-79,99%, jumlah capaian SP kategori ini bertambah dari tahun 2023 yang hanya berjumlah 1 SP. Kemudian terdapat 2 (dua) SP berkategori Kurang dengan capaian <50%, jumlah capaian SP kategori ini sama dengan tahun 2023. Sedangkan hasil pengukuran dari 36 IKSP terdiri atas 19 (sembilan belas) IKSP berkategori Sangat Baik dengan capaian >100-120%, 8 (delapan) IKSP berkategori Baik dengan capaian antara 80-100%, 2 (dua) IKSP berkategori Cukup dengan capaian antara 50-79,99%, 6 (enam) IKSP berkategori Kurang dengan capaian <50% dan 1 IKSP Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang belum dapat hasil pengukurannya disebabkan adanya kebijakan perubahan evaluasi reformasi birokrasi. Berikut tabel capaian IKSP berdasarkan kategori 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Capaian IKSP Berdasarkan Kategori Tahun 2020-2024

IKSP berdasarkan Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat Baik (>100-120%)	25	22	23	18	19
Baik (80-100%)	2	7	8	8	8
Cukup (50-79,99%)	1	3	2	4	2
Kurang (<50%)	3	3	2	4	6
N/A	5	1	1	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

Jumlah IKSP memperoleh kategori Sangat Baik dengan capaian >100-120% tahun 2024 sebanyak 19 (Sembilan belas) IKSP. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang hanya 18 (delapan belas) IKSP, namun masih lebih sedikit dari

tahun 2020, 2021, dan 2022. Selanjutnya jumlah IKSP berkategori Baik dengan capaian antara 80-100% tahun 2024 sebanyak 8 (delapan) IKSP. Jumlah ini sama dengan jumlah tahun 2023 dan 2022, dan lebih banyak dari jumlah tahun 2021 dan 2020 yang masing-masing sebanyak 7 (tujuh) IKSP dan 2 (dua) IKSP. Jumlah IKSP berkategori Cukup dengan capaian antara 50-79,99% pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) IKSP. Jumlah ini lebih sedikit dari tahun 2023 yang sebanyak 4 (empat) IKSP. Sedangkan jumlah IKSP berkategori Kurang dengan capaian <50% tahun 2024 sebanyak 6 (enam) IKSP. Jumlah IKSP kategori kurang di tahun 2024 ini paling banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2024 terdapat IKSP yang hasil pengukurannya belum tersedia dikarenakan terdapat perubahan kebijakan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi atau kategori NA (*Not Available*) sebanyak 1 (satu) IKSP, sedangkan tahun 2023 sebanyak 2 (dua) IKSP, tahun 2022 dan 2021 sama-sama 1 (satu) IKSP dan tahun 2020 sebanyak 5 (lima) IKSP.

Lebih lanjut rata-rata capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran IKSP pada tahun 2024 paling rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan meningkatnya jumlah IKSP kategori Kurang dengan capaian <50%. Sebagai contoh IKSP Rerata Nilai asesmen kemampuan berfikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA, IKSP Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman, dan IKSP Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional hasilnya nol. Untuk lebih detail berikut perbandingan capaian hasil pengukuran IKSP tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Bidang Agama</b>					<b>65,48%</b>			<b>78,52%</b>			<b>89,28%</b>			<b>83,07%</b>			<b>76,44%</b>
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu	1. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu	01:13	01:13	100,00%	01:11	01:13	84,62%	01:10	01:13	01:08	01:08	01:08	100,00%	01:05	01:08	62,50%
		2. Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu	70%	65,00%	92,86%	75,00%	75,00%	100,00%	80%	99,58%	85%	85%	100%	117,65%	90%	100%	111,11%

2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama	1. Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
3	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1. Tingkat moderasi beragama kelompok binaan	70	-	-	80	82	102,50%	85	85	90	90	90	100,00%	95	90	94,74%
4	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	1. Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%	100%	75,00%	75,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1. Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	NA	NA	NA	20%	15,00%	75,00%	40%	100%	60%	60%	33,33%	55,56%	80%	33,33%	41,67%
		2. Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	50%	0,00%	0,00%	70%	63,00%	90,00%	80%	77%	90%	90%	100%	111,11%	100%	100%	100,00%
6	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu	1. Persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana	70%	0,03%	0,04%	80%	0,81%	1,01%	90%	0,96%	90%	90%	5,63%	6,26%	90%	5,64%	6,26%
<b>Bidang Pendidikan</b>					<b>113,77%</b>			<b>111,35%</b>			<b>107,00%</b>		<b>99,08%</b>			<b>94,17%</b>	
1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1. Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Mad yama Widya Pasraman /Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama	7	8,28	118,00%	7	8,1	115,71%	7	8,1	115,71%	7	7	100,00%	7	7,30	104,29%
		2. Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama	7	8,5		7	8,5	120,00%	7	8,4	120,00%	7	8,72	124,57%	7	8,59	122,71%
2	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan	1. Rerata Nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi	NA	NA	NA	Literasi : 390 Numerasi : 345	-	95,00%	Literasi : 400 Numerasi : 360	Literasi : 505,8 Numerasi : 391,2	114,33%	Literasi : 420 Numerasi : 390	Literasi : 473,5 Numerasi : 460,4	115,39%	Literasi : 420 Numerasi : 390	Literasi : 473,5 Numerasi : 390	114,08%

an berfikir siswa																		460,4
	2. Rerata Nilai asesmen kemampuan berfikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA	NA	NA	NA	Membaca : 390 Matematika : 345 Sains : 370	-	100,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mem baca : 430 Mate matika : 390 Sains : 400	0	0,00%	
3 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	1. Persentase guru bersertifikat pendidik	60%	82,00%	120,00%	65%	76,69%	117,98%	70%	54,03%	77,18%	75%	57,76%	77,01%	80%	41,35%	51,69%		
	2. Persentase dosen bersertifikat pendidik	50%	50,51%	101,02%	55%	56,83%	103,33%	60%	77,13%	120,00%	65%	83,89%	129,06%	70%	84,50%	120,72%		
	3. Persentase dosen berkualifikasi S3	18%	18,80%	104,44%	20%	20,90%	104,50%	22%	21,87%	99,41%	25%	23,91%	95,64%	30%	26,32%	87,74%		
4 Meningkatkan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	1. Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman	3%	33,00%	120,00%	5%	2,83%	56,60%	5%	22,03%	120,00%	10%	18%	180,00%	10%	30,10%	301,03%		
	2. Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman	3%	40,00%	120,00%	5%	51,46%	120,00%	5%	24,88%	120,00%	7%	13,84%	197,71%	7%	18,08%	258,24%		
	3. Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman	2%	61,00%	120,00%	3%	30,88%	120,00%	4%	47,49%	120,00%	5%	2,32%	46,40%	5%	10,69%	213,79%		
	4. Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman	2%	10,00%	120,00%	3%	41,04%	120,00%	4%	23,61%	120,00%	5%	0%	0,00%	5%	0%	0,00%		
	5. Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH	3%	9,09%	120,00%	5%	26,41%	120,00%	5%	4,70%	93,91%	10%	15,56%	155,60%	10%	3,52%	35,18%		
5 Meningkatkan jumlah guru yang memenuhi SNP	1. Persentase propinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP perjenjang	5%	82,00%	120,00%	6%	82,00%	120,00%	7%	55,88%	120,00%	7%	44,12%	630,29%	8%	31,58%	394,74%		
6 Meningkatkan standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	1. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP	5	53,00%	120,00%	5%	19,00%	120,00%	7%	23,81%	120,00%	7%	45,45%	649,29%	10%	46,15%	461,54%		
	2. Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul	9,50%	9,76%	102,74%	10%	8,54%	85,40%	12%	7,69%	64,10%	13%	9,35%	71,92%	15%	12,96%	86,42%		
	3. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan	5%	73,33%	120,00%	5%	19,00%	120,00%	7%	42,86%	120,00%	7%	45,45%	649,29%	10%	46,15%	461,54%		

	Manajemen Kelembagaan																
	4. Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	30%	100,00 %	120,00%	40%	100,00 %	120,00%	50%	100%	120,00%	60%	100%	166,67 %	70%	100%	142,86%	
7	Menguatnya Pendidikan karakter siswa	1. Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Mad yama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik	70%	100,00 %	120,00%	80%	100,00 %	120,00%	80%	100%	120,00%	80%	53,31%	66,64%	90%	75,97 %	84,42%
8	Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional	1. Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional	NA	NA	NA	NA	NA	5%	0,00%	0,00%	5%	0%	0,00%	5%	0%	0,00%	
9	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	1. Persentase PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	10%	7,69%	76,90%	15%	30,77%	120,00%	20%	50,00%	120,00%	25%	78,57 %	314,28 %	30%	71,43 %	238,10%
		2. Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKH			106,63%			111,11%			109,44%			108,88 %			111,40%
		a. S1	3,02	3,2		3,03	3,45		3,1	3,27		3,15	3,27		3,25	3,55	
		b. S2	3,23	3,5		3,25	3,53		3,25	3,7		3,25	3,7		3,25	3,82	
		c. S3	3,41	3,6		3,41	3,78		3,45	3,76		3,45	3,76		3,50	3,76	
	3. Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan	24 Bulan	12 Bulan	120,00%	24 Bulan	12 Bulan	120,00%	24 Bulan	4 Bulan	120,00%	12 Bulan	4,89 Bulan	120,00 %	12 Bulan	4 Bulan	120,00%	
10	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	1. Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	12,50 %	21,51%	120,00%	15%	43,75 %	120,00%	17,50%	30,85%	120,00%	20%	33,61%	168,05 %	22,50 %	36,07 %	160,29%
<b>Bidang Manajemen</b>				<b>109,40%</b>			<b>107,28%</b>			<b>108,73%</b>			<b>116,06%</b>			<b>119,57%</b>	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan	1. Persentase tindakan lanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	70%	81,75%	116,79%	75%	89,71%	119,61%	75%	93,24%	120,00%	80%	97,45 %	121,81%	85%	100,00%	117,65%

Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80	78,71	98,39%	80,01	79,85	99,80%	80,02	84,16	105,17%	80,03	N/A	N/A	80,04	N/A	N/A
	3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80	81,94	102,43%	80,01	82,74	103,41%	80,03	83,01	103,72%	80,04	83,71	104,59%	80,05	83,6	104,43%
	4. Nilai Maturitas SPIP	1,99	3,20	120,00%	2	3,36	120,00%	2,01	3,89	120,00%	2,03	3,20	157,64%	2,04	3,202	156,96%
	5. Indeks Profesionalitas ASN	NA	NA	NA	71	66,45	93,59%	74	70,135	94,78%	76	60,97	80,22%	80	79,4	99,25%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Per Tahun</b>				<b>96,22%</b>			<b>96,09%</b>			<b>101,67%</b>			<b>94,43%</b>			<b>89,430</b>

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

Analisis capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 untuk setiap SP pada aspek bidang agama, bidang Pendidikan dan bidang dukungan manajemen diukur dengan realisasi masing-masing IKSP. Realisasi IKSP, menggambarkan capaian, permasalahan, hambatan, peluang dalam rangka mempertahankan peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan. Analisis untuk setiap capaian SP dari IKSP masing-masing aspek dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Aspek Bidang Agama

Ditjen Bimas Hindu mendukung 3 (tiga) tujuan Kementerian Agama pada aspek bidang agama yaitu (1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, (2) Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, (3) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Ditjen Bimas Hindu menetapkan 6 (enam) SP dengan 8 (delapan) IKSP. Adapun capaian kinerja SP berdasarkan hasil pengukuran IKSP pada aspek bidang agama tahun 2024 mencapai mencapai **76,44%** kategori **Cukup**. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2023 yang mencapai **83,07%** kategori **Baik**. Hal tersebut disebabkan terdapat 3 (tiga) SP yang capaiannya mengalami penurunan pada tahun 2024 ini. Penjelasan SP dan IKSP pada aspek bidang agama sebagai berikut:

#### 1. SP.2.2 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu

SP Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu memiliki 2 (dua) IKSP sebagai ukuran keberhasilan. (1) IKSP Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu, dan (2) IKSP Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu. Rata-rata capaian kinerja SP ini sebesar **86,81%** kategori **Baik**. Rincian capaian SP Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. SP 2.2 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu	1. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu	01:05	01:08	62,50%	Cukup
		2. Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu	90,00%	100,00%	111,11%	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 1					86,81%	Baik

Formula pengukuran capaian SP Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu dikatakan meningkat jika perbandingan rasio penyuluh dengan jumlah kelompok sasaran semakin kecil. Begitu juga frekuensi bimbingan kepada kelompok sasaran penyuluh semakin meningkat. Berdasarkan formula pengukuran tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

**IKSP.2.2.1**

**Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu**

IKSP Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu yang diukur dengan membandingkan jumlah Penyuluh Agama Hindu (PAH) dengan kelompok sasaran binaan.

Hasil pengukuran IKSP rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu tahun 2024 terealisasi sebesar 1:8 atau 62,50% dari target 1:5 dengan kategori Cukup. Dapat dijelaskan bahwa 1 (satu) orang penyuluh membina 8 (delapan) kelompok sasaran binaan. Capaian IKSP tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023 yang juga terealisasi 1:8, Hasil pengukuran IKSP tahun 2024 belum mencapai target renstra, yang mana terdapat kekurangan indeks sebesar 0,375 atau 37,50%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8. IKSP.2.2.1 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		01:13	01:11	01:10	01:08	01:05	0,375
Realisasi (%)	01:15	01:13	01:13	01:13	01:08	01:08	-
		100,00%	84,62%	76,92%	100,00%	62,50%	37,50%

Ketercapaian realisasi IKSP rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran

yang mendapat bimbingan agama Hindu tahun 2024 kategori Cukup. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan rasionya ini dengan menambah jumlah penyuluh agama Hindu seperti mengusulkan formasi PAH Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun terdapat permasalahan mengenai keterisian formasi PAH tersebut di beberapa wilayah misalnya terdapat formasi PAH PNS/PPPK, namun tidak ada yang melamar, di lain sisi terdapat pelamar pada formasi tersebut namun pelamar tidak memenuhi syarat atau tidak lolos seleksi ujian PNS/PPPK sehingga formasi tersebut pada akhirnya tidak terisi. Sedangkan PAH Non ASN yang telah memiliki pengabdian kemudian tidak lolos seleksi PNS/PPPK diharapkan dapat diperjuangkan untuk mengisi formasi yang tidak terisi, sehingga hal ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan rasio jumlah PAH dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu. Disamping hal tersebut di atas, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan kedepannya yaitu: (1) mengoptimalkan jumlah kelompok binaan dengan sebaran umat Hindu yang tidak merata, (2) memperjelas regulasi mengenai rasio penyuluh, (3) menyusun kurikulum penyuluhan, dan (4) menyusun standar kinerja penyuluh.

Jumlah penyuluh agama Hindu hingga akhir tahun 2024 sebanyak 1.450 orang. Yang terdiri atas penyuluh agama Hindu PNS sebanyak 138 orang, PPPK sebanyak 161 orang dan Non ASN sebanyak 1.151 orang.

#### **IKSP.2.2.2**

#### **Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu**

IKSP Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu merupakan indikator kedua untuk menilai meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu. IKSP ini diukur dengan membandingkan jumlah penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu dengan jumlah penyuluhan agama kepada kelompok sasaran.

Hasil pengukuran IKSP Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu tahun 2024 terealisasi sebesar 100,00% atau 111,11% dari target 90,00% dengan kategori Sangat Baik. Realisasi ini masih sama dengan tahun 2023 yang juga sebesar 100,00%. Hasil pengukuran IKSP tahun 2024 telah melampaui target renstra dan terdapat kelebihan indeks sebesar 10,00% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 9. IKSP.2.2.2 Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Hindu

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	10,00%
Realisasi	70,00%	65,00%	75,00%	99,58%	100,00%	100,00%	(Telah melampaui target)
(%)		92,86%	100,00%	124,48% (120,00%)	117,65%	111,11%	11,11%

Ketercapaian IKSP Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok binaan yang memenuhi standar minimal Hindu tahun 2024 kategori Sangat Baik. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan para PAH dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Pedoman Penyuluh Agama Hindu Nomor 85 Tahun 2023 bahwa penyuluh PNS dan Non PNS melaksanakan tugas sebanyak 8 kali sebulan. Disamping itu, PAH juga telah melakukan pembinaan melalui media sosial yang mudah diakses oleh umat Hindu. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam melaksanakan tugas penyuluhan yang disebabkan sebaran kelompok binaan dan PAH yang tidak merata, sarana penyuluhan belum memadai, anggaran untuk pembiayaan penyuluhan di daerah terpencil masih sangat terbatas. Atas dasar tersebut, leading sektor khususnya yang menangani bidang penyuluhan agama secara rutin melakukan monitoring kinerja PAH, melakukan identifikasi sebaran kelompok binaan dan PAH sehingga seluruh kelompok binaan dapat dijangkau oleh PAH.

## 2. SP.2.3. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu melalui pendekatan moderasi beragama

SP Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Hindu melalui pendekatan moderasi beragama memiliki satu IKSP. IKSP tersebut yaitu persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan. Adapun rata-rata capaian kinerja SP ini sebesar 100,00% dengan kategori Baik. Adapun capaian kinerja SP tersebut dijelaskan melalui IKSP sebagai berikut:

### IKSP.2.3.1 Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan

IKSP Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan diukur dengan membandingkan jumlah konflik intra umat beragama yang diselesaikan dengan jumlah konflik intra umat beragama yang masuk dan diterima oleh Ditjen Bimas Hindu. Hasil pengukuran IKSP Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan tahun 2024 sebesar 100,00% dari target 100,00% dengan kategori Baik. Hasil pengukuran tahun 2024 masih sama dengan hasil pengukuran pada tahun 2023 yang juga 100,00%. Hal tersebut disebabkan belum ada kasus konflik yang masuk dan diterima oleh Ditjen Bimas Hindu tahun 2024.

Capaian hasil pengukuran IKSP ini telah mencapai target renstra 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 10. IKSP 2.3.1 Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	(Telah mencapai target)
(%)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00

Ketercapaian IKSP Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan didukung dengan adanya pencegahan dini kasus konflik intra umat beragama. Pencegahan tersebut melalui penyelenggaraan aktivitas pembinaan yang melibatkan lembaga agama dan keagamaan, ormas keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh umat Hindu dengan penguatan moderasi beragama. IKSP ini dicapai melalui output lembaga agama dan keagamaan yang dibina.

### 3. SP.2.4. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama

SP Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama memiliki 1 (satu) IKSP. Adapun IKSP tersebut yakni Tingkat moderasi beragama kelompok binaan. Pengukuran IKSP dilakukan oleh penyuluh dengan panduan nasional. Adapun rata-rata capaian kinerja SP ini sebesar 94,74% dengan kategori Baik. Lebih lanjut mengenai capaian kinerja SP Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dijelaskan sebagai berikut:

#### IKSP.2.4.1

#### Tingkat moderasi beragama kelompok binaan (diukur oleh penyuluh dengan panduan nasional)

IKSP Tingkat moderasi beragama kelompok binaan diukur dengan survei internal yang dilakukan oleh Subdit Penyuluhan dengan menggunakan angket. Sampel dipilih secara acak. Adapun hasil pengukuran IKSP Tingkat moderasi beragama kelompok binaan tahun 2024 diperoleh sebesar 90,00 atau 94,74% dari target 95,00 dengan kategori Baik. Hasil pengukuran ini sama dengan hasil pengukuran tahun 2023 yang juga sebesar 90,00 (survei dilakukan oleh Subdit Penyuluhan). Capaian IKSP ini belum mencapai target renstra 2024, yang mana terdapat kekurangan indeks sebesar 5,00 atau 5,26%, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 11. IKSP.2.4.1 Tingkat moderasi beragama kelompok binaan

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	5,00
Realisasi	70,00	0,00	82,00	85,00	90,00	90,00	-
(%)		0,00%	102,50%	100,00%	100,00%	94,74%	5,26%

SP Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama yang diukur melalui IKSP Tingkat moderasi beragama kelompok binaan telah didukung dengan KMA Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama. Hal ini mewajibkan PAH PNS dilingkungan Kementerian Agama memperoleh Penguatan Moderasi Beragama (PMB) level penggerak. PAH PNS yang telah memperoleh PMB diharapkan dapat memberikan PMB kepada kelompok binaan. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam implementasi dan penerapan kurikulum moderasi beragama (model, modul, modal). Begitu juga dalam rencana kerja dan anggaran MB belum diwadahi oleh RO khusus MB.

#### 4. SP.2.5. Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

SP Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama memiliki 1 (satu) IKSP. IKSP tersebut yakni Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan. Adapun rata-rata capaian kinerja SP ini sebesar 100,00% dengan kategori Baik. Lebih lanjut mengenai capaian SP Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama sebagai berikut:

##### **IKSP.2.5.1 Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan**

IKSP Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan diukur dengan cara membandingkan antara jumlah kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan dengan jumlah kasus konflik budaya dan agama. Adapun hasil pengukuran IKSP Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100,00% atau mencapai 100,00% dari target 100,00% dengan kategori Baik. Hasil pengukuran tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023 yang juga terealisasi sebesar 100,00%. Capaian pada tahun 2024 telah mencapai target Renstra, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. IKSP.2.5.1 Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Realisasi (%)	100,00%	100,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	(Telah mencapai target)
		100,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IKSP Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan telah mencapai target. Namun demikian, pembinaan terhadap umat Hindu melalui aktivitas output event keagamaan dan seni budaya bernafaskan agama, dan lembaga budaya bernafaskan agama yang dibina terus dilakukan. Hal tersebut sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik budaya dan agama.

### 5. SP.2.6. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan

SP Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan memiliki dua IKSP sebagai ukuran keberhasilan. IKSP tersebut yaitu (1) Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital, dan (2) Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran. Rata-rata capaian kinerja SP ini sebesar 70,83% kategori Cukup. Rincian capaian SP Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13. Rerata Capaian SP Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1. Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	80,00%	33,33%	41,67%	Kurang
		2. Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	100,00%	100,00%	100,00%	Baik
Rerata Capaian Sasaran 5					70,83%	Cukup

Formula pengukuran SP ini dikatakan meningkat jika semakin banyak layanan administrasi keagamaan yang digitalisasi, Begitu juga semakin banyak kitab suci dan buku keagamaan yang terdistribusi tepat sasaran. Lebih lanjut mengenai capaian SP Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan sebagai berikut:

### **IKSP.2.6.1 Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital**

IKSP Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital diukur dengan membandingkan jumlah layanan administrasi keagamaan secara digital dengan jumlah layanan administrasi keagamaan. Hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 33,33% atau 41,67% dari target 80,00% kategori Kurang. Capaian kinerja ini diperoleh dari hasil realisasi 1 layanan yang telah digitalisasi dari 3 layanan administrasi keagamaan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023 yang sebesar 33,33%. Capaian IKSP ini belum mencapai target renstra tahun 2024, yang mana masih terdapat kekurangan indeks sebesar 46,67%, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 14. IKSP.2.6.1 Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		NA	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	46,67%
Realisasi	NA	NA	15,00%	100,00%	33,33%	33,33%	-
(%)		NA	75,00%	250,00% (120,00%)	55,55%	41,66%	58,34%

Terdapat 3 (tiga) daftar standar pelayanan dibidang urusan agama Hindu yakni (1) standar pelayanan penerbitan tanda daftar lembaga/yayasan keagamaan Hindu, (2) standar pelayanan penerbitan tanda daftar rumah ibadah, dan (3) standar pelayanan pendaftaran bimbingan dan konseling pra nikah bagi remaja dan calon pengantin Hindu. Dari tiga standar pelayanan tersebut baru terdapat 1 pelayanan yaitu standar pelayanan penerbitan tanda daftar rumah ibadah yang telah melaksanakan digitalisasi melalui google form. Disamping itu terdapat juga digitalisasi kitab suci Bhagawadgita dan Sarasamuscaya yang dapat diakses oleh umat Hindu melalui Pusaka. Ketidaktercapaian IKSP ini disebabkan masih kurangnya komitmen dalam melakukan digitalisasi terhadap pelayanan yang ada.

### **IKSP.2.6.2 Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran**

IKSP Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran diukur dengan membandingkan jumlah kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai sasaran dengan jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan. Hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 100,00% atau mencapai 100,00% dari target 100,00% dengan kategori Baik. Realisasi tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023 yang juga sebesar 100,00%. Hasil pengukuran IKSP tahun 2024 telah mencapai target renstra, sebagaimana tersaji pada tabel

berikut:

Tabel 15. IKSP.2.6.2 Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		50,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	0,00%
Realisasi	43,00%	0,00%	63,00%	77,00%	100,00%	100,00%	(Telah mencapai target)
(%)		0,00%	90,00%	96,25%	111,11%	100,00%	0,00%

## 6. SP.2.7. Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu

SP Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu diukur dengan 1 (satu) IKSP. IKSP tersebut yakni Persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana. Rata-rata capaian kinerja SP ini sebesar 6,26% atau kategori Kurang. Formula pengukuran SP Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu dikatakan meningkat jika jumlah partisipasi umat Hindu berdana punia melalui Lembaga Pengelola Dana Punia (LPDP) bertambah. Lebih lanjut mengenai SP ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

### IKSP.2.7.1 Persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana

IKSP Peningkatan persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana diukur dengan membandingkan jumlah partisipasi umat beragama dalam dharma dana dengan jumlah umat Hindu yang layak berdana punia. Hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 5,64% atau mencapai 6,26% dari target 90,00% dengan kategori Kurang. Realisasi tahun 2024 meningkat 0,01% dari tahun 2023 yang sebesar 5,63%. Hasil pengukuran tahun 2024 belum mencapai target renstra, yang mana terdapat kekurangan indeks sebesar 84,36% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 16. IKSP.2.7.1 Persentase partisipasi umat beragama dalam dharma dana

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		70,00%	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	84,36%
Realisasi	NA	0,03%	0,81%	0,96%	5,63%	5,64%	-
(%)		0,04%	1,01%	1,07%	6,26%	6,26%	93,74%

Target pada tahun 2024 belum tercapai disebabkan masih minimnya jumlah umat berpartisipasi dalam dana punia melalui lembaga pengelolaan dana punia. Namun demikian telah ada peningkatan jumlah partisipasi umat dari tahun sebelumnya.

Hal tersebut disebabkan telah terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Punia. Dana Punia merupakan sumbangan keagamaan yang wajib ditunaikan oleh masyarakat Hindu sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran dharma. Pengelolaan Dana Punia adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Dana Punia. Lembaga Pengelola Dana Punia (LPDP) Lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan Dana Punia dan dana keagamaan Hindu lainnya. Hingga saat ini baru terdapat 1 (satu) LPDP yakni Yayasan Badan Dharma Dana Nasional (YBDDN). Adapun jumlah partisipasi umat dalam dana punia pada tahun 2023 sebanyak 182.680 orang dari target jumlah umat Hindu usia produktif sebanyak 3.240.790 orang. Guna meningkatkan jumlah partisipasi umat berdana punia perlu melakukan sosialisasi secara masif terhadap PMA Nomor 4 Tahun 2023 secara langsung maupun melalui media massa, media sosial dan sebagainya.

### **Aspek Bidang Pendidikan**

Aspek bidang pendidikan memiliki 2 (dua) tujuan yaitu (1) peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas, (2) peningkatan lulusan pendidikan agama dan keagamaan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Ditjen Bimas Hindu menetapkan 10 (sepuluh) SP yang di ukur melalui 23 (dua puluh tiga) IKSP. Adapun rata-rata capaian kinerja SP berdasarkan hasil pengukuran IKSP pada aspek bidang pendidikan tahun 2024 sebesar **94,17%** kategori Baik. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2023 mencapai **98,08%** begitu juga dari tahun 2022 sebesar **107,00%**. Penjelasan SP yang diukur melalui IKSP pada aspek bidang pendidikan sebagai berikut:

#### **7. SP.3.1. dan 5.1. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat**

SP Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat diukur dengan 2 (dua) IKSP sebagai ukuran keberhasilan. IKSP tersebut yakni rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama, dan Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama. Rata-rata capaian kinerja SP ini pada tahun 2024 sebesar 7,95 atau 113,50% dari target 7. Capaian SP ini lebih baik dari tahun 2023 yang mencapai 7,86 atau 112,29% dari target 7. Adapun lebih rinci capaian kinerja SP ini sebagai berikut:

Tabel 17. SP 3.1 Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
7	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1. Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama WidyaPasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama	7	7,30	104,29%	Sangat Baik
		2. Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama	7	8,59	122,71%	Sangat Baik
Rerata Capaian Sasaran 7					113,50%	Sangat Baik

Formula pengukuran capaian SP Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat dikatakan meningkat jika rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama WidyaPasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama semakin tinggi. Begitu juga rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama semakin tinggi. Berdasarkan formula pengukuran tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

**IKSP.3.1.1 Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama**

IKSP rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama merupakan salah satu ukuran untuk menilai menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat. Pada tahun 2024 nilai ini diperoleh dari hasil asesmen nasional berbasis komputer yang diselenggarakan oleh pusat asesmen pendidikan Kemdikbudristek khususnya pada dimensi iklim kebinekaan. Yang mana iklim kebinekaan menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya dan mengenai komitmen kebangsaan. Realisasi IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 7,30 atau 104,29% dari target 7,00 kategori Sangat Baik. Realisasi nilai ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 yang sebesar 7,00 atau 100,00% dari target 7,00. Hasil pengukuran ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks 0,30 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 18. IKSP.3.1.1 Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/UtamaWidya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,30
Realisasi	7,00	8,28	8,10	8,10	7,00	7,30	(Telah melampaui target)
(%)		118,29%	115,71%	115,71%	100,00%	104,29%	4,29%

Capaian IKSP ini telah melampaui target, namun demikian belum semua satuan pendidikan mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Hal tersebut disebabkan (1) namun belum semua satuan pendidikan memenuhi syarat untuk mengikuti asesmen nasional berbasis komputer seperti misalnya satuan pendidikan jenjang Adhi Widya belum memiliki siswa kelas V, begitu juga untuk jenjang Madyama Widya belum terdapat kelas VIII untuk dijadikan sampel. (2) sarana dan prasarana satuan pendidikan belum memadai seperti ketersediaan komputer dan jaringan internet. Ditjen Bimas Hindu telah memberikan bantuan untuk pengembangan teknologi pembelajaran yang diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut.

#### IKSP.5.1.1

#### Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama

IKSP rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama merupakan salah satu ukuran untuk menilai menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat. Realisasi IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 8,59 atau 122,71% dari target 7,00, namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120%. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 0,32 atau 1,86% dari realisasi tahun 2023 yang sebesar 8,72. Hasil pengukuran ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks 1,59 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19. IKSP.5.1.1 Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	1,59
Realisasi	7,00	8,50	8,50	8,40	8,72	8,59	(Telah melampaui target)
(%)		121,43% (120,00%)	121,43% (120,00%)	120,00%	124,57% (120,00%)	122,71% (120,00%)	22,71%

Capaian tahun 2024 telah melampaui target renstra, namun hasil tersebut hanya

bersumber dari PTKH dan belum ada data dari PTU. Hal tersebut disebabkan terdapat kesulitan memperoleh data dosen dan mahasiswa pada PTU. Telah dilakukan upaya pendataan dosen dan mahasiswa beragama Hindu pada PTU melalui surat namun belum memperoleh hasil. Lebih lanjut perlu dilakukan kajian yang lebih dalam mengenai penerapan kurikulum MB khususnya pada PTU yang dapat digunakan sebagai bahan penetapan target yang rasional berdasarkan data yang valid.

#### **8. SP.3.2. Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa**

SP Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa diukur dengan dua indikator yakni rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi, dan rerata nilai asesmen siswa dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA. Capaian SP ini tahun 2024 sebesar 57,04% kategori Cukup. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 115,39% kategori Sangat Baik. Hasil ini diperoleh dari rata-rata hasil pengukuran 2 (dua) IKSP yaitu rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi dan rerata nilai asesmen siswa dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA. Penurunan capaian SP ini disebabkan karena pada tahun 2023 IKSP rerata nilai asesmen siswa dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA tidak terdapat target dan tidak menjadi pembagi dalam perhitungan capaian SP. Namun pada tahun 2024 IKSP ini telah memiliki target tapi belum terdapat hasil asesmen siswa dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA karena Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman tidak menjadi sampel asesmen PISA dan sudah menjadi pembagi dalam pengukuran SP ini. Guna meningkatkan capaian SP ini telah dilaksanakan pemberian penghargaan bagi guru agama Hindu berprestasi tahun 2024. Lebih lanjut mengenai SP ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

##### **IKSP.3.2**

#### **Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi**

IKSP rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi, merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa. Hasil pengukuran IKSP tahun 2024 diperoleh dari Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 2022. Rata-rata hasil pengukuran literasi dan numerasi dari ANBK tersebut dikonversi dengan menggunakan rentang pengukuran PISA sehingga diperoleh hasil yang setara dengan pengukuran PISA. Adapun nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi diperoleh sebesar 473,5 atau 110,12% dari target 430 kategori level 3 dengan rentang >481 - 553. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mampu menyelesaikan tugas-tugas

membaca dengan kompleksitas sedang, seperti menemukan beragam informasi, membuat tautan antara berbagai bagian teks, dan menghubungkannya dengan pengetahuan sehari-hari yang sudah dikenal. Sedangkan untuk numerasi diperoleh sebesar 460,4 atau 118,05% dari target 390 kategori level 2 dengan rentang >408 – 481. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana dari wacana dengan kompleksitas sedang, seperti mencari informasi langsung, membuat kesimpulan tingkat rendah dari berbagai genre wacana, mengetahui definisi dari bagian tertentu dari teks, serta menggunakan beberapa pengetahuan umum yang terkait untuk memahami wacana. Hasil pengukuran IKSP bidang literasi dan numerasi telah melampaui target renstra 2024 dengan kelebihan indeks secara berurutan sebesar 43,50 dan 70,40. Lebih detail capaian rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 20. IKSP.3.2.1 Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target Literasi		NA	390	400	420	430	43,50
Realisasi	NA	NA	0,00	505,8	473,5	473,5	(Telah melampaui target)
(%)		NA	0,00%	126,45%	112,74%	110,12%	10,12%
Target Numerasi		NA	345	360	390	390	70,40
Realisasi	NA	NA	0,00	391,2	460,4	460,4	(Telah melampaui target)
(%)		NA	0,00%	108,67%	118,05%	118,05%	18,05%

### IKSP.3.2.2

### Rerata nilai asesmen siswa dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA

IKSP rerata nilai asesmen siswa dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA, merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa. Pada tahun 2024 belum terdapat hasil pengukuran IKSP bidang membaca, matematika, sains dalam PISA sehingga capaiannya sebesar 0,00% kategori Kurang. Rendahnya hasil tersebut disebabkan karena satuan pendidikan Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman tidak menjadi sampel pengukuran PISA, begitu juga masih terbatasnya pengetahuan maupun informasi untuk menjadi sampel pengukuran PISA, dan selanjutnya sudah terdapat target pada renstra 2024. Sehingga untuk IKSP ini belum mencapai target renstra 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 21. IKSP.3.2.2 Rerata nilai asesmen siswa dalam kemampuan berpikirdi bidang membaca, matematika, sains dalam PISA

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target membaca		NA	390	NA	NA	430	430
Realisasi membaca	NA	NA	0,00	NA	NA	0,00	-
(%)		NA	0,00%	NA	NA	0,00%	100,00%
Target Matematika		NA	345	NA	NA	390	390
Realisasi Matematika	NA	NA	0,00	NA	NA	0,00	-
(%)		NA	0,00%	NA	NA	0,00%	100,00%
Target Sains		NA	370	NA	NA	400	400
Realisasi Sains	NA	NA	0,00	NA	NA	0,00	-
(%)		NA	0,00%	NA	NA	0,00%	100,00%

### 9. SP.3.3 dan 5.2. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan

SP Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan memiliki 3 (tiga) IKSP. Ketiga IKSP tersebut yakni (1) persentase guru bersertifikat pendidik, (2) persentase dosen bersertifikat pendidik, dan (3) persentase dosen berkualifikasi S3, dengan capaian rata-rata sebesar 86,72% atau kategori Baik. Capaian SP ini lebih rendah dari capaian tahun 2023 yang mencapai 100,57% atau kategori Sangat Baik. Meningkatnya persentase guru, dosen bersertifikat pendidik, dan dosen berkualifikasi S3 sama-sama dapat dikaitkan dengan meningkatnya kompetensi dan kelayakan seorang guru dan dosen dalam proses mengajar, dan akan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan disebuah lembaga pendidikan yakni sekolah dan perguruan tinggi. Adapun penjelasan masing-masing IKSP tersebut sebagai berikut:

#### IKSP.3.3.1 Persentase guru bersertifikat pendidik

IKSP persentase guru bersertifikat pendidik merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan. IKSP ini diukur dengan membandingkan jumlah guru agama Hindu yang bersertifikat dengan jumlah guru agama Hindu. Hasil pengukuran IKSP persentase guru bersertifikat pendidik tahun 2024 sebesar 41,35% atau 51,69% dari target 80,00% kategori Cukup. Capaian IKSP ini mengalami penurunan sebesar 16,41% dari realisasi tahun 2023 yang sebesar 57,76%. Hasil pengukuran IKSP ini belum mencapai target renstra 2024 dengan kekurangan indeks sebesar 38,65% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 22. IKSP.3.3.1 Persentase guru bersertifikat pendidik

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	38,65%
Realisasi	52,00%	82,00%	76,69%	54,03%	57,76%	41,35%	-
(%)		136,67% (120,00%)	117,98%	77,19%	77,01%	51,69%	48,31%

Penurunan hasil pengukuran IKSP ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni (1) Jumlah guru agama Hindu yang terdaftar pada aplikasi Simpatika meningkat seiring kebijakan Ditjen Bimas Hindu akan menuntaskan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru agama Hindu yang belum bersertifikat dan terdaftar pada Simpatika. (2) Jumlah guru agama Hindu yang bersertifikat makin berkurang disebabkan meningkatnya jumlah guru yang pensiun, promosi/mutasi, meninggal dan lain sebagainya terdata sebanyak 382 orang. Adapun jumlah guru agama Hindu yang terdaftar pada Simpatika per 7 Januari 2025 sebanyak 8.172 orang. Dengan rincian sebanyak 3.379 telah bersertifikat dan sebanyak 4.793 orang belum bersertifikat. Untuk itu perlu menyiapkan anggaran untuk PPG dan menambah Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) sehingga dapat mengakomodir kebijakan terkait penuntasan PPG.

#### IKSP.5.2.1 Persentase dosen bersertifikat pendidik

SP persentase dosen bersertifikat pendidik merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan. IKSP ini diukur dengan membandingkan jumlah dosen yang memiliki sertifikat dengan jumlah dosen secara keseluruhan. Adapun hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 84,50% atau 120,72% dari target 70,00%, namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120,00%. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,61% dari tahun 2023 sebesar 83,89%. Realisasi IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks sebesar 14,50% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 23. IKSP.5.2.1 Persentase dosen bersertifikat pendidik

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	14,50%
Realisasi	42,00%	50,51%	56,83%	77,13%	83,89%	84,50%	(Telah melampaui target)
(%)		101,02%	103,33%	128,55% (120,00%)	129,06% (120,00%)	120,72% (120,00%)	20,72%

Kenaikan realisasi IKSP ini disebabkan adanya dosen yang pensiun sebanyak 5 orang sehingga jumlah dosen pada PTKH hingga akhir tahun 2024 berkurang dari tahun sebelumnya. Jumlah ini menjadi pembagi yang mempengaruhi hasil pengukuran. Adapun jumlah dosen PTKH sebanyak 684 orang. Jumlah dosen yang bersertifikat hingga akhir tahun 2024 sebanyak 578 orang sedangkan jumlah dosen yang belum bersertifikat sebanyak 111 orang. Upaya peningkatan kualitas dosen harus terus dilakukan dan perlu penuntasan dosen yang belum bersertifikat guna menjaga kualitas mutu dari perguruan tinggi.

### IKSP.5.2.2 Persentase dosen berkualifikasi S3

IKSP persentase dosen berkualifikasi S3 merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan tingkat perguruan tinggi. IKSP ini diukur dengan membandingkan jumlah dosen yang berkualifikasi S3 dengan jumlah dosen secara keseluruhan. Adapun hasil pengukuran IKSP tahun 2024 sebesar 26,32% atau 87,74% dari target 30,00% dengan kategori Baik. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 2,41% dari realisasi tahun 2023 yang sebesar 23,91%. Realisasi tahun ini belum mencapai target renstra 2024 yang mana terdapat kekurangan indeks 3,68%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 24. IKSP.5.2.2 Persentase dosen berkualifikasi S3

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		18,00%	20,00%	22,00%	25,00%	30,00%	3,68%
Realisasi	17,00%	18,80%	20,90%	21,87%	23,91%	26,32%	-
(%)		104,44%	104,50%	99,41%	95,64%	87,74%	12,26%

Kenaikan realisasi KSP ini didukung oleh bertambahnya jumlah dosen yang berkualifikasi S3. Data dosen yang berkualifikasi S3 hingga akhir tahun 2024 sebanyak 204 orang dari jumlah dosen sebanyak 775 orang. Jumlah dosen berkualifikasi S3 bertambah 17 orang dari tahun 2023 yang sebanyak 187 orang. Masih terdapat 571 orang yang belum berkualifikasi S3. Upaya yang telah dilakukan yakni memotivasi, memberikan informasi, dan akses kepada seluruh dosen untuk melanjutkan ke jenjang S3 melalui jalur Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) yang merupakan skema beasiswa prestisius kolaborasi dari LPDP dan Kementerian Agama. Namun demikian, perlu memfasilitasi dosen dalam peningkatan kompetensi agar dapat lolos seleksi BIB.

## 10. SP.4.1. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

SP Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan memiliki 5

(lima) IKSP sebagai ukuran keberhasilan. IKSP tersebut yaitu (1) Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman, (2) Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman, (3) Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman, (4) Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman, dan (5) Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH. Capaian kinerja SP ini sebesar 120,00% kategori Sangat Baik. Capaian ini meningkat 4,06% dari capaian tahun sebelumnya. Peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman, Adhi Widya Pasraman, Madyama Widya Pasraman, Utama Widya Pasraman, dan mahasiswa pada PTKH, dapat dikaitkan dengan minat, kepercayaan orang tua siswa terhadap pembelajaran yang berbasis agama, dan mutu lulusan PTKH yang mampu bersaing di dunia kerja. Adapun capaian pengukuran SP dijelaskan IKSP sebagai berikut:

**IKSP.4.1.1**    **Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman**

IKSP persentase siswa pada Pratama Widya Pasraman merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan. IKSP ini diukur membandingkan selisih siswa pada pratama widya pasraman tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah siswa pada pratama widya pasraman tahun berjalan. Hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 30,10% atau 301,03% dari target 10,00%, namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120,00%. Relisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 12,10% dari tahun 2023 yang sebesar 18,00%. Realisasi IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks 20,10%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 25. IKSP.4.1.1 Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		3,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,10%
Realisasi	2,00%	30,00%	2,83%	25,03%	18,00%	30,10%	(Telah melampaui target)
(%)		1000,00% (120,00%)	56,60%	500,60% (120,00%)	180,00% (120,00%)	301,03% (120,00%)	201,03%

Meningkatnya capaian IKSP ini di dukung oleh peningkatan jumlah siswa dan jumlah satuan pendidikan Pratama Widya Pasraman dari tahun sebelumnya. Adapun peningkatan jumlah siswa sebanyak 671 orang dan penambahan jumlah satuan pendidikan sebanyak 3 lembaga. Sehingga jumlah siswa Pratama Widya Pasraman hingga akhir tahun 2024 berdasarkan data yang bersumber dari Emis sebanyak 2.229 orang dan jumlah satuan Pendidikan sebanyak 88 lembaga.

Namun demikian upaya branding Pratama Widya Pasraman terus ditingkatkan guna meningkatkan partisipasi siswa.

#### **IKSP.4.1.2** Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman

IKSP persentase siswa pada Adhi Widya Pasraman merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan tingkat Adhi Widya. IKSP ini diukur membandingkan selisih siswa pada adhi widya pasraman tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah siswa pada adhi widya pasraman tahun berjalan. Hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 18,08% atau 258,24% dari target 7,00% kategori Sangat Baik, namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120,00%. Realisasi tahun ini mengalami kenaikan sebesar 4,24% dari tahun 2023 yang sebesar 13,84%. Realisasi IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks sebesar 11,08%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 26. IKSP.4.1.2 Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		3,00%	5,00%	5,00%	7,00%	7,00%	11,08%
Realisasi	1,00%	40,00%	51,46%	24,88%	13,84%	18,08%	(Telah melampaui target)
(%)		1333,33% (120,00%)	1029,20% (120,00%)	497,60% (120,00%)	197,71% (120,00%)	258,24% (120,00%)	158,24%

Meningkatnya capaian IKSP ini di dukung oleh peningkatan jumlah siswa dan jumlah satuan pendidikan Adhi Widya Pasraman dari tahun sebelumnya. Adapun peningkatan jumlah siswa sebanyak 141 orang dan penambahan jumlah satuan pendidikan sebanyak 1 lembaga. Sehingga jumlah siswa Adhi Widya Pasraman hingga akhir tahun 2024 berdasarkan data yang bersumber dari Emis sebanyak 780 orang dan jumlah satuan Pendidikan sebanyak 13 lembaga. Namun demikian upaya branding Adhi Widya Pasraman terus ditingkatkan guna meningkatkan partisipasi siswa.

#### **IKSP.4.1.3** Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman

IKSP persentase siswa pada Madyama Widya Pasraman merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan tingkat Madyama Widya. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan selisih siswa pada madyama widya pasraman tahun berjalan

dengan tahun sebelumnya dengan jumlah siswa pada madyama widya pasraman tahun berjalan. Hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 10,69% atau 213,79% dari target 5,00% kategori Sangat Baik, namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120,00%. Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 8,37% dari tahun 2023 yang sebesar 2,32%. Realisasi IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks sebesar 5,69%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 27. IKSP.4.1.3 Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	5,00%	5,69%
Realisasi	1,00%	61,00%	30,88%	47,49%	2,32%	10,69%	(Telah melampaui target)
(%)		3050,00% (120,00%)	1029,33% (120,00%)	1187,25% (120,00%)	46,40%	213,79% (120,00%)	113,79%

Meningkatnya capaian IKSP ini di dukung oleh peningkatan jumlah siswa dan jumlah satuan pendidikan Madyam Widya Pasraman dari tahun sebelumnya. Adapun peningkatan jumlah siswa sebanyak 31 orang dan penambahan jumlah satuan pendidikan sebanyak 3 lembaga. Sehingga jumlah siswa Madyama Widya Pasraman hingga akhir tahun 2024 berdasarkan data yang bersumber dari Emis sebanyak 290 orang dan jumlah satuan Pendidikan sebanyak 8 lembaga. Namun demikian upaya branding Madyama Widya Pasraman terus ditingkatkan guna meningkatkan partisipasi siswa

#### **IKSP.4.1.4 Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman**

IKSP persentase siswa pada Utama Widya Pasraman merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan selisih jumlah siswa pada utama widya pasraman tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dengan jumlah siswa pada utama widya pasraman tahun berjalan. Hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 0,00% dari target 5,00% kategori Kurang. Realisasi tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Realisasi IKSP ini belum mencapai target renstra tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 28. IKSP.4.1.4 Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Realisasi	1,00%	10,00%	41,04%	23,61%	0,00%	0,00%	-
(%)		500,00% (120,00%)	1368,00% (120,00%)	590,25% (120,00%)	0,00%	0,00%	100,00%

Ketidaktercapaian IKSP ini disebabkan menurunnya jumlah siswa pada Utama Widya Pasraman. Adapun penurunan jumlah peserta didik tahun 2024 dari tahun sebelumnya sebanyak 87 orang. Jumlah siswa Utama Widya Pasraman tahun 2024 sebanyak 384 orang dari 5 satuan pendidikan. Penurunan jumlah siswa disebabkan satuan pendidikan Utama Widya Pasraman saat ini masih berbasis masyarakat, belum ada satuan pendidikan yang negeri. Begitu juga lulusan Utama Widya Pasraman kesulitan diterima pada perguruan tinggi umum dan cenderung diterima pada perguruan tinggi keagamaan. Hal ini mengurangi minat peserta didik untuk bersekolah pada Utama Widya Pasraman. Upaya yang telah dilakukan yakni memberikan bantuan sarana prasarana, peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan kompetensi guru melalui orientasi pengembangan keprofesian berkelanjutan, workshop pengembangan teknologi pembelajaran, penguatan pendidikan karakter bagi guru agama Hindu. Perlu melakukan reviu kembali terhadap kualitas hasil pendidikan, kualitas guru, sarana dan prasarana penunjang, kurikulum agar memenuhi syarat minimal 8 SNP.

#### IKSP.4.1.5

#### Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH

IKSP persentase mahasiswa pada PTKH merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan selisih mahasiswa pada PTKH tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dengan jumlah mahasiswa pada PTKH tahun berjalan. Hasil pengukuran IKSP ini tahun 2024 sebesar 3,52% atau 35,18% dari target 10,00% kategori Kurang. Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,04% dari tahun 2023 yang raelisasi sebesar 15,56%. Realisasi IKSP ini belum mencapai target renstra tahun 2024 dengan kekurangan indeks sebesar 6,48%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 29. IKSP.4.1.5 Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		3,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	6,48%
Realisasi	2,00%	9,09%	26,41%	4,70%	15,56%	3,52%	-
(%)		303,00% (120,00%)	528,20% (120,00%)	94,00%	155,60% (120,00%)	35,18%	64,82%

Penurunan capaian IKSP tahun 2024 sejalan dengan penurunan jumlah partisipasi mahasiswa yang melanjutkan pendidikan pada PTKH dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun jumlah mahasiswa pada PTKH sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 12.365 orang, mengalami kenaikan sebanyak 435 orang dari tahun 2023 yang sebanyak 11.930 orang dari 14 PTKH. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan oleh Ditjen Bimas Hindu untuk meningkatkan kualitas lulusan dan jumlah partisipasi mahasiswa seperti peningkatan sarana prasarana pada PTKH, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, pengabdian masyarakat, peningkatan status PTKH, peningkatan akreditasi prodi dan institusi dan kerjasama Internasional.

#### 11. SP.3.4 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP

SP Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP memiliki 1 (satu) IKSP sebagai ukuran keberhasilan. IKSP tersebut yakni persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang. Capaian kinerja SP ini sebesar 394,74% kategori Sangat Baik, namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120,00% sehingga ditulis 120,00%. Peningkatan persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang, dapat diartikan bahwa peningkatan jumlah guru dan jumlah provinsi yang memenuhi standar minimal kompetensi guru per jenjang dalam mengajar dan mendidixiswa menjadi unggul dan mampu bersaing. Lebih lanjut mengenai capaian SP ini sebagai berikut:

##### IKSP.3.4.1

#### Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang

IKSP persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan jumlah provinsi yang guru agama dan pendidikan keagamaan Hindu memenuhi SNP per jenjang dengan jumlah provinsi di Indonesia. Hasil pengukuran IKSP ini tahun 2024 sebesar 31,58% atau 394,74% dari target 8,00% kategori Sangat Baik. Namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120,00%. Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar

12,54% dari tahun 2023 yang sebesar 44,12%. Realisasi IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks sebesar 23,58%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 30. IKSP.3.4.1 Persentase Provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		5,00%	6,00%	7,00%	7,00%	8,00%	23,58%
Realisasi	3,00%	82,00%	82,00%	55,88%	44,12%	31,58%	(Telah melampaui target)
(%)		1640,00% (120,00%)	1366,67% (120,00%)	798,29% (120,00%)	630,29% (120,00%)	394,74% (120,00%)	294,74%

Ketercapaian IKSP ini disebabkan terdapat 12 provinsi dengan jumlah guru agama Hindu yang memenuhi SNP per jenjang dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Namun demikian masih sebagian besar provinsi belum memiliki guru agama Hindu yang memenuhi SNP per jenjang. Upaya yang telah dilakukan yakni mengusulkan formasi guru agama Hindu pada masing-masing provinsi, melakukan pendataan guru agama Hindu melalui sistem terintegrasi seperti Simpatika dan Emis, melakukan peningkatan kompetensi dan memfasilitasi guru agama Hindu untuk mengikuti PPG.

## 12. SP 3.5 dan 5.3 Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

SP Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan memiliki 4 (empat) IKSP sebagai ukuran keberhasilan. IKSP tersebut yakni (1) persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP, (2) persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul, (3) persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan, dan (4) persentase PTKH yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan. Capaian kinerja SP ini pada tahun 2024 sebesar 288,09% kategori Sangat Baik, namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120,00% sehingga ditulis 120,00%. Capaian tahun 2024 ini lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 384,29%. Lebih lanjut mengenai capaian SP Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai berikut:

**IKSP.3.5.1****Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP**

IKSP persentase pada Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan jumlah Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP dengan jumlah Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman. Hasil pengukuran IKSP ini tahun 2023 sebesar 46,15% atau 461,54% dari target 10,00% kategori Sangat Baik. Namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120,00% sehingga ditulis 120,00%. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,70% dari tahun 2023 yang sebesar 45,45%. Realisasi IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks 36,15%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 31. IKSP.3.5.1 Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		5,00%	5,00%	7,00%	7,00%	10,00%	36,15%
Realisasi	3,00%	53,00%	19,00%	23,81%	45,45%	46,15%	(Telah melampaui target)
(%)		1060,00% (120,00%)	380,00% (120,00%)	340,14% (120,00%)	649,29% (120,00%)	461,54% (120,00%)	361,54%

Ketercapaian IKSP ini pada tahun 2024 disebabkan bertambahnya jumlah satuan Pendidikan Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SNP. Dalam hal ini, terakreditasinya satuan pendidikan diartikan telah memenuhi 8 SNP. Adapun 8 SNP tersebut meliputi (1) Standar Isi. Berhubungan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, (2) Standar Proses. Berhubungan dengan proses pelaksanaan pembelajaran (3) Standar Kompetensi Lulusan. Berhubungan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berhubungan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, (5) Standar Sarana dan Prasarana. Berhubungan dengan infrastruktur institusi pendidikan (6) Standar Pengelolaan. Berhubungan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan. (7) Standar Pembiayaan Pendidikan. Berhubungan dengan anggaran sekolah, (8) Standar Penilaian Pendidikan. Berhubungan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik.

Hingga akhir tahun 2024 jumlah Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman yang

terakreditasi sebanyak 12 dari 26 satuan pendidikan. Jumlah Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman terakreditasi mengalami kenaikan sebanyak 2 satuan pendidikan dari tahun sebelumnya yang sebanyak 10 dari 22 satuan pendidikan. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan jumlah pasraman yang terakreditasi seperti pembinaan dan pendampingan persiapan akreditasi, pemberian bantuan sarana prasarana, BOS, PIP, Kurikulum dan bahan ajar yang dikembangkan.

### **IKSP.5.3.1 Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul**

IKSP persentase persentase pada Prodi yang terakreditasi A/Unggul merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan pada perguruan tinggi. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan jumlah prodi yang terakreditasi A/Unggul dengan jumlah prodi dari semua PTKH. Hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 12,96% atau 86,42% dari target 15,00% kategori Baik. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,61% dari tahun 2023 yang sebesar 9,35%. Realisasi IKSP ini belum mencapai target renstra tahun 2024 dengan kekurangan indeks sebesar 2,04%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 32. IKSP.5.3.1 Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		9,50%	10,00%	12,00%	13,00%	15,00%	2,04%
Realisasi	9,40%	9,76%	8,54%	7,69%	9,35%	12,96%	-
(%)		102,74%	85,40%	64,08%	71,92%	86,42%	13,58%

Ketidaktercapaian IKSP persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul tahun 2024 disebabkan bertambahnya jumlah prodi pada PTKH. Begitu juga jumlah prodi yang memperoleh akreditasi A/Unggul masih rendah walaupun pada tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah prodi yang memperoleh akreditasi A/Unggul dibanding tahun sebelumnya. Disamping itu, untuk prodi baru sangat sulit memperoleh akreditasi Baik Sekali atau pun Unggul karena terdapat poin penilaian mengenai lulusan, hal tersebut tentunya sulit dipenuhi. Jumlah prodi yang terakreditasi A/Unggul sebanyak 14 prodi dari jumlah seluruhnya sebanyak 108 prodi.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan prodi terakreditasi A/Unggul seperti (1) melaksanakan klinik akreditasi untuk prodi yang akan akreditasi, (2) monitoring dan evaluasi penjaminan mutu ke seluruh PTKH, (3) melakukan studi banding ke perguruan tinggi yang akreditasi institusi telah Unggul.

**IKSP.3.5.2****Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan**

IKSP Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan jenjang Adhi, Madyama, dan Utama Widya. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan jumlah Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan dengan jumlah Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman. Hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 46,15% atau 461,54% dari target 10,00% kategori Sangat Baik. Namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120,00% sehingga ditulis 120,00%. Realisasi IKSP ini mengalami kenaikan 0,70% dari tahun 2023 yang sebesar 45,45%. Realisasi IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks 36,15%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 33. IKSP.3.5.2 Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		5,00%	5,00%	7,00%	7,00%	10,00%	36,15%
Realisasi	3,00%	73,33%	19,00%	42,86%	45,45%	46,15%	(Telah melampaui target)
(%)		1466,60%	380,00%	612,29%	649,29%	461,54% (120,00%)	361,54%

Ketercapaian IKSP ini pada tahun 2024 disebabkan bertambahnya jumlah Adhi /Madyama/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan. Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman dikatakan telah melaksanakan sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan diartikan telah terakreditasi. Data menunjukkan bahwa sebanyak 12 Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman telah terakreditasi dari 26 satuan Pendidikan. Namun demikian sebagian besar Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman belum terakreditasi. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan seperti pembinaan dan pendampingan persiapan akreditasi, pemberian bantuan sarana prasarana, BOS, PIP, Kurikulum dan bahan ajar yang dikembangkan.

**IKSP.5.3.2****Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan**

IKSP Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan jumlah PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan dengan jumlah PTKH. Hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 100,00% atau 142,86% dari target 70,00% kategori Sangat Baik. Namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120,00% sehingga ditulis 120,00%. Realisasi tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023 sebesar 100,00%. Realisasi IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks 30,00%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 34. IKSP.5.3.2 Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan manajemen kelembagaan

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	30,00%
Realisasi	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	(Telah melampaui target)
(%)		333,33% (120,00%)	250,00% (120,00%)	200,00% (120,00%)	166,67% (120,00%)	142,86% (120,00%)	42,86%

Ketercapaian IKSP ini disebabkan karena seluruh PTKH telah melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan. Adapun jumlah PTKH seluruhnya sebanyak 14 lembaga terdiri dari 5 PTKH Negeri dan 9 PTKH Swasta. Namun demikian, monitoring dan evaluasi kualitas Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada seluruh PTKH terus dilaksanakan, agar semua LPM melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sehingga kualitas mutu PTKH dapat terus meningkat.

### 13. SP.3.6 Menguatnya pendidikan karakter siswa

SP Menguatnya pendidikan karakter siswa memiliki 1 (satu) IKSP sebagai ukuran keberhasilan. IKSP tersebut yakni Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik. Capaian kinerja SP ini sebesar 84,42% kategori Baik. Capaian tahun ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai 66,64% kategori Cukup. Peningkatan persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh

nilai karakter minimal baik dapat diartikan adanya kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong-royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, serta kemandirian. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia merupakan penerapan ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan pada manusia, alam, dan negara. Gotong-royong merupakan keinginan dan pengalaman terlibat secara sukarela dalam kegiatan yang menunjukkan kepedulian untuk kebaikan bersama. Lebih lanjut kreativitas merupakan kesenangan dan pengalaman menghasilkan hal yang baru dan berguna. Kemudian nalar kritis merupakan kemauan dan kebiasaan mengambil keputusan secara logis berdasarkan berbagai bukti dan sudut pandang yang beragam. Kebinekaan global merupakan ketertarikan terhadap budaya yang berbeda, kepedulian terhadap isu-isu global, serta dukungan terhadap kesetaraan gender, agama, dan budaya. Kemandirian merupakan kemauan dan kebiasaan mengelola perasaan, pikiran, dan tindakan demi mencapai tujuan pembelajaran. Lebih lanjut mengenai capaian SP Menguatnya pendidikan karakter siswa sebagai berikut

#### IKSP.3.6.1

**Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik**

IKSP Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik merupakan salah satu ukuran untuk menilai kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan jumlah siswa Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik berdasarkan hasil anbk dengan jumlah siswa Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman yang mengikuti anbk. Hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 75,97% atau 84,42% dari target 90,00% dengan kategori Baik. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 22,66% dari tahun 2023 yang sebesar 53,31%. Realisasi IKSP ini belum mencapai target renstra tahun 2024 dengan kekurangan indeks sebesar 14,03%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 35. IKSP.3.6.1 Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/UtamaWidya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		70,00%	80,00%	80,00%	80,00%	90,00%	14,03%
Realisasi	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	53,31%	75,97%	-
(%)		142,86% (120,00%)	125,00% (120,00%)	125,00% (120,00%)	66,64%	84,42%	15,58%

Ketidaktercapaian IKSP ini disebabkan karena belum semua siswa Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman memperoleh nilai karakter minimal baik pada asesmen nasional berbasis komputer yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Selanjutnya belum semua satuan pendidikan mengikuti anbk karena beberapa faktor seperti masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung anbk (komputer, jaringan internet), belum semua satuan pendidikan mempunyai kelas V dan VIII yang dijadikan sampel anbk. Adapun data siswa Adhi/Madyama/Utama Widya Pasraman sebanyak 1.454 orang dari 26 satuan pendidikan. Sedangkan jumlah siswa yang mengikuti anbk sebanyak 308 orang dari 16 satuan pendidikan, yang mana hanya 234 orang yang memperoleh nilai karakter minimal baik. Upaya yang telah dilakukan yaitu pemberian bantuan untuk pengembangan teknologi pembelajaran, bantuan sarana prasarana, bantuan operasional sekolah, peningkatan kompetensi guru.

#### 14. SP.5.4 Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional

SP Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional memiliki 1 (satu) IKSP sebagai ukuran keberhasilan. IKSP tersebut yakni Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional. Capaian kinerja SP ini sebesar 0,00% dari target 5,00% kategori Kurang. Lebih lanjut mengenai capaian SP Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional sebagai berikut:

##### IKSP.5.4.1

#### Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional

IKSP Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan jumlah PTKH yang memperoleh predikat reputasi internasional terhadap jumlah PTKH. Hasil pengukuran IKSP ini tahun 2024 belum ada PTKH yang memiliki reputasi internasional. Termasuk pemenuhan terhadap pengungkit reputasi internasional seperti jumlah mahasiswa asing yang kuliah di PTKH belum ada. Realisasi IKSP ini belum mencapai target renstra tahun 2024 dengan kekurangan indeks 5,00%,

sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 36. IKSP.5.4.1 Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		NA	NA	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Realisasi	NA	NA	NA	0,00%	0,00%	0,00%	-
(%)		NA	NA	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

### 15. SP.5.6 Meningkatnya kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja

SP Meningkatnya kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja memiliki 3 (tiga) IKSP sebagai ukuran keberhasilan. IKSP tersebut yakni (1) Persentase PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan; (2) Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKH, dan (3) Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan. Capaian kinerja SP Meningkatnya kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja sebesar 181,05% kategori Sangat Baik. Namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120% sehingga ditulis 120,00%. Lebih lanjut mengenai capaian SP Meningkatnya kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja sebagai berikut:

#### IKSP.5.6.1

#### Persentase PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan

IKSP persentase PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan jumlah PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan dengan jumlah PTKH. Hasil pengukuran IKSP ini tahun 2024 sebesar 71,43% atau 238,10% dari 30,00% kategori Sangat Baik. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,14% dari tahun 2023 yang sebesar 78,57%. Realisasi IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks sebesar 41,43%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 37. IKSP.5.6.1 Persentase PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	41,43%
Realisasi	10,00%	7,69%	30,77%	50,00%	78,57%	71,43%	(Telah melampaui target)
(%)		76,90%	205,13% (120,00%)	250,00% (120,00%)	314,28% (120,00%)	238,10% (120,00%)	138,10%

Ketercapaian IKSP ini didukung oleh jumlah PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri. Terdapat 10 dari 14 PTKH yang telah melaksanakan kerjasama dengan dunia kerja/industri. Jumlah PTKH yang melaksanakan kerjasama ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebanyak 11 PTKH. Disamping kerjasama dengan dunia industri terdapat upaya yang telah dilakukan yang mendukung seperti peningkatan layanan bidang pendidikan tinggi, diklat entrepreneurship bagi mahasiswa, program merdeka belajar kampus merdeka guna mempersiapkan mahasiswa agar dapat menjadi pribadi yang tangguh, sesuai dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan.

#### IKSP.5.6.2 Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTK

IKSP Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelulusan mahasiswa PTKH merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan jumlah nilai IPK mahasiswa PTKH disetiap jenjang S1, S2 dan S3 dengan jumlah mahasiswa PTKH disetiap jenjang S1, S2 dan S3. Rerata hasil pengukuran IKSP IPK jenjang S1, S2 dan S3 tahun 2024 sebesar 111,40%. Realisasi rerata IKSP 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,52% dari tahun 2023 yang sebesar 108,88%. Adapun rincian nilai IPK mahasiswa per jenjang yakni untuk jenjang S1 sebesar 3,55 atau 109,23% dari target 3,25. Untuk S2 sebesar 3,82 atau 117,54% dari target 3,25. Sedangkan S3 tercapai sebesar 3,76 atau 107,43% dari target 3,50. Capaian IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks jenjang S1 sebesar 0,3, jenjang S2 sebesar 0,57, dan jenjang S3 sebesar 0,26, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 38. IKSP.5.6.2 Rerata nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKH

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target IPK S1		3,02	3,03	3,10	3,15	3,25	0,3
Realisasi IPK S1	NA	3,2	3,45	3,27	3,27	3,55	(Telah melampaui target)
(%)		105,96%	113,86%	105,48%	103,81%	109,23%	9,23%
Target IPK S2		3,23	3,25	3,25	3,25	3,25	0,57
Realisasi IPK S2	NA	3,5	3,53	3,70	3,70	3,82	(Telah melampaui target)
(%)		108,36%	108,62%	113,85%	113,85%	117,54%	17,54%
Target IPK S3		3,41	3,41	3,45	3,45	3,50	0,26
Realisasi IPK S3	NA	3,6	3,78	3,76	3,76	3,76	(Telah melampaui target)
(%)		105,57%	110,85%	108,99%	108,99%	107,43%	7,43%

IKSP ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam renstra. Terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan seperti peningkatan kompetensi dosen, peningkatan layanan bidang pendidikan tinggi, pengabdian masyarakat, program merdeka belajar kampus merdeka. Begitu juga PTKH senantiasa membantu mahasiswa mempertahankan nilai dan meningkatkan prestasi akademiknya.

### IKSP.5.6.3

### Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan

IKSP Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja. IKSP ini diukur rata-rata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan. Hasil pengukuran IKSP ini tahun 2024 sebesar 4 bulan atau 300,00% dari target 12 bulan. Namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120,00% sehingga ditulis 120,00%. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,89 bulan dari tahun 2023 yang sebesar 4,89 bulan. Realisasi IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks 8 bulan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 39. IKSP.5.6.3 Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		24	24	24	12	12	8
Realisasi	24	12	12	4	4,89	4	(Telah melampaui target)
(%)		200,00% (120,00%)	200,00% (120,00%)	600,00% (120,00%)	245,40% (120,00%)	300,00% (120,00%)	150,00%

Ketercapaian IKSP ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah lulusan PTKH yang memperoleh pekerjaan setelah lulus. Namun pekerjaan yang diperoleh oleh mahasiswa belum diklasifikasi apakah pekerjaannya tersebut sesuai jurusan/prodinya yang diambil atau tidak. Begitu juga jumlah gaji yang diperoleh telah memenuhi kebutuhannya atau tidak, dan sebagainya. Untuk memperoleh informasi pekerjaan mahasiswa setelah kelulusan, PTKH melakukan *tracerstudy* yang ditujukan kepada mahasiswa yang telah lulus.

#### 16. SP.5.5. Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian

SP Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian memiliki 1 (satu) IKSP sebagai ukuran keberhasilan. IKSP tersebut yakni Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional. Capaian kinerja SP ini sebesar 168,05% kategori Sangat Baik. Namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120% sehingga ditulis 120,00%. Lebih lanjut mengenai capaian SP ini sebagai berikut:

##### IKSP.5.5.1 Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional

IKSP persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional merupakan salah satu ukuran untuk menilai meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian. IKSP ini diukur dengan cara membandingkan jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dengan jumlah jurnal ilmiah yang masuk. Hasil pengukuran IKSP ini pada tahun 2024 sebesar 36,07% atau 160,29% dari target 22,50% kategori Sangat Baik. Namun berdasarkan KMA 94 tahun 2021 disebutkan bahwa batas maksimal capaian kinerja sebesar 120,00% sehingga ditulis 120,00%. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,46% dari tahun 2023 yang sebesar 33,61%. Realisasi IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks 2,46%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 40. IKSP.11.16.1 Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		12,50%	15,00%	17,50%	20,00%	22,50%	12,75%
Realisasi	10,00%	21,52%	43,75%	30,85%	33,61%	35,25%	(Telah melampaui target)
(%)		172,16% (120,00%)	291,67% (120,00%)	176,29% (120,00%)	168,05% (120,00%)	156,67% (120,00%)	56,67%

Ketercapaian IKSP ini disebabkan bertambahnya jurnal yang memperoleh akreditasi nasional pada tahun 2024. Terdapat 44 jurnal yang terakreditasi nasional dari 122 jurnal yang ada. Jumlah jurnal terakreditasi nasional ini meningkat sebanyak 4 jurnal dari tahun sebelumnya yang hanya 40 jurnal yang terakreditasi nasional dari 119 jurnal. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional seperti pelatihan pengelolaan jurnal, pemberian honorarium penulis pada jurnal, dan pelatihan menulis artikel pada jurnal ilmiah.

### Aspek Bidang Dukungan Manajemen

Ditjen Bimas Hindu mempunyai 1 (satu) tujuan pada bidang dukungan manajemen sesuai dengan tujuan Kementerian Agama yaitu (1) Peningkatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsive. Guna mewujudkan tujuan aspek bidang dukungan manajemen, Ditjen Bimas Hindu menetapkan 1 (satu) SP dengan 5 (lima) IKSP. Adapun capaian kinerja pada aspek bidang dukungan manajemen tahun 2023 sebesar **116,06%** kategori Sangat Baik. Capaian ini lebih baik dari tahun 2022 sebesar **108,73%** dan tahun 2021 yang sebesar **107,28%**. Penjelasan SP dan IKSP pada aspek bidang dukungan manajemen sebagai berikut:

#### 17. SP.1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel

SP Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel memiliki 5 (lima) IKSP sebagai ukuran keberhasilan. Kelima IKSP tersebut yaitu (1) Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan, (2) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), (3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (4) Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan (5) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun capaian kinerja SP ini sebesar 119,57%. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 116,06%. Rincian capaian kinerja SP Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 41. SP 1.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
17	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1. Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	85,00%	100,00%	117,65%	Sangat Baik
		2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80,04	N/A	N/A	N/A
		3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80,05	83,6	104,43%	Sangat Baik
		4. Nilai Maturitas SPIP	2,04	3,202	156,96%	Sangat Baik
		5. Indeks Profesionalitas ASN	80	79,4	99,25%	Sangat Baik
<b>Rerata Capaian Sasaran 17</b>					<b>119,57%</b>	<b>Sangat Baik</b>

Formula pengukuran SP meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel dikatakan meningkat bila meningkatnya penyelesaian hasil pengawasan, meningkatnya nilai pelaksanaan reformasi birokrasi, begitu juga meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, nilai maturitas pengawasan internal dan indeks profesionalisme ASN. Lebih rinci mengenai hasil pengukuran IKSP atas SP meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel sebagai berikut:

#### **IKSP.1.6.1** Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan

IKSP Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan merupakan salah satu ukuran untuk menilai tata kelola organisasi Ditjen Bimas Hindu yang efektif dan akuntabel. IKSP ini diukur dengan membandingkan jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan oleh Ditjen Bimas Hindu, dengan jumlah hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini merupakan temuan/hasil audit dari instansi/lembaga yang berkompeten baik eksternal maupun internal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama. Temuan/hasil audit ini dinyatakan selesai ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas apabila telah ditunjukkan bukti-bukti yang memadai, misalnya temuan kelebihan bayar dibuktikan dengan bukti setor ke kas negara. Hasil pengukuran atas IKSP ini pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100,00% atau 117,65% dari target 85,00% kategori Sangat Baik. Realisasi IKSP tahun 2024 mengalami kenaikan 2,55% dari tahun 2023 yang sebesar 97,45%. Realisasi IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks sebesar 15,00%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 42. IKSP.1.6.1 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		70,00%	75,00%	75,00%	80,00%	85,00%	15,00%
Realisasi	63,45%	81,75%	89,71%	93,24%	97,45%	100,00%	(Telah melampaui target)
(%)		116,79%	119,61%	124,32% (120,00%)	121,81% (120,00%)	117,65% (120,00%)	17,65%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pada pasal 43 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Lebih lanjut pasal 46 menyebutkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. Terdapat 4 (empat) jenis temuan pada Ditjen Bimas Hindu yang diselesaikan hingga akhir tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA). Adapun sisa temuan Ditjen Bimas Hindu tersebut sebesar Rp103.755.454,17. Secara detail berikut tabel sisa temuan Ditjen Bimas Hindu hingga tahun 2024:

Tabel 43. Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi

No	Uraian Temuan	Rekomendasi BPK RI	Status Tindak Lanjut
1	Kelebihan Pembayaran Uang Makan (LKKA-2015)	Memproses Kelebihan Pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara	Masih terdapat saldo yang masih harus di selesaikan sebesar Rp.2.211.000,00,-
2	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap atas bantuan penelitian pada Ditjen Bimas Hindu (LKKA-2018)	Memproses Kelebihan Pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara	Masih terdapat saldo yang masih harus di selesaikan sebesar Rp. 17.253.954,17,-
3	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang (LKKA-2021)	Memproses Kelebihan Pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara	Masih terdapat saldo yang masih harus diselesaikan sebesar Rp. 67.342.500,00,-
4	LKKA 2023	Memproses Kelebihan Pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara	16.948.000

Guna mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut diatas Ditjen Bimas Hindu menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tim Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Selanjutnya beberapa strategi yang dilakukan oleh tim seperti (1) mengidentifikasi semua temuan yang belum ditindaklanjuti, (2) melakukan analisis terhadap setiap temuan untuk memahami penyebab utama dan dampaknya, (3) menyusun Rencana Aksi menetapkan langkah-langkah spesifik, tanggung jawab, dan target waktu, (4) Menetapkan prioritas temuan yang akan di selesaikan, (5) melakukan koordinasi yang intensif dengan APIP dan pihak terkait, (6) melaksanakan rencana aksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, (7) melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan tindak lanjut (8) melakukan pelaporan secara berkala kepada pimpinan dan pendokumentasian setiap aktivitas dan dokumen pendukung penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Adapun hasil tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp103.755.454,17 atau 100,00% dari jumlah sisa temuan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan pada Tahun 2024

No	Tahun	LHP	Saldo awal yang harus diselesaikan	Tindak Lanjut		Sisa Saldo	
				Nilai	%	Nilai	%
1	2016	LKKA 2015	2.211.000	2.211.000	100,00	0,00	0,00
2	2019	LKKA 2018	17.253.954,17	17.253.954,17	100,00	0,00	0,00
3	2022	LKKA 2021	67.342.500	67.342.500	100,00	0,00	0,00
4	2024	LKKA 2023	16.948.000	16.948.000	100,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>103.755.454,17</b>	<b>103.755.454,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **IKSP.1.6.2 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)**

IKSP Nilai PMPRB merupakan indikator kedua sebagai ukuran untuk menilai tata kelola organisasi Ditjen Bimas Hindu yang efektif dan akuntabel. Berdasarkan Renstra Ditjen Bimas Hindu 2022-2024, IKSP ini diukur menggunakan instrumen yang telah dirumuskan oleh Itjen Kementerian Agama. Berdasarkan buku manual penerapan PMPRB Tahun 2012 bahwa model PMPRB meliputi 2 (dua) komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen Pengungkit merupakan seluruh aspek internal organisasi instansi pemerintah yang melaksanakan berbagai upaya manajemen guna mewujudkan output dan *outcome* bagi masyarakat/pengguna layanan, SDM Aparaturnya, dan bagi komunitas lokal, nasional dan internasional, serta mewujudkan kinerja yang menjadi tujuannya. Komponen Pengungkit dalam model PMPRB terdiri dari 5 (lima) kriteria yaitu kepemimpinan, perencanaan strategis, SDM Aparatur, kemitraan dan sumber daya, dan proses. Sedangkan komponen hasil merupakan output dan/atau *outcome* yang dihasilkan komponen pengungkit, yang tidak hanya dirasakan oleh pihak eksternal tetapi juga pihak internal organisasi. Komponen hasil, dalam

model PMPRB, dibagi ke dalam 4 (empat) kriteria, yaitu hasil pada masyarakat/pengguna layanan, hasil pada SDM Aparatur, hasil pada komunitas lokal, nasional, dan internasional, serta hasil kinerja utama.

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-2274/SJ.B-IV/OT.003/3/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi yang menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dihentikan, sehingga mulai tahun 2023 hingga saat ini tidak lagi dilakukan kegiatan PMPRB baik pada tingkat Kementerian maupun tingkat Unit Eselon I Kementerian Agama.

Beberapa upaya yang dilakukan selama dihentikannya evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bimas Hindu, guna meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel seperti (1) Internalisasi anti Gratifikasi, (2) Penilaian Pendahuluan Satker ZI pada PTKHN, (3) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, (4) Pendampingan Evaluasi Penilaian Pendahuluan Satker ZI, (5) Tindak Lanjut proses Perubahan Status STHD Klaten menjadi STAHN Jawa Dwipa (RPMA Pendirian, SOTK, Statuta), (6) Kepatuhan LHKAN (LHKPN & SPT satker Bimas Hindu dan PTKHN), (7) Pemenuhan dokumen E-SAKIP Reviu Menpan, (8) Identifikasi dan analisis rencana pemberian layanan Bimas Hindu pada KUA, (9) Pelaporan Kinerja Organisasi Ditjen Bimas Hindu melalui SIPKA, (10) Menyusun Renaksi RB Tematik, (11) Menyusun Renaksi TL rekomendasi SPI dan menyusun mitigasi resiko praktek KKN pada Kementerian Agama.

Adapun hasil PMPRB pada tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 44. IKSP.1.6.2 Nilai PMPRB

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		80,00	80,01	80,02	80,03	80,04	4,12
Realisasi	79,36	78,71	79,85	84,16	N/A	N/A	(Telah melampaui target)
(%)		98,39%	99,80%	105,17%	N/A	N/A	5,15%

Sebagai informasi bahwa tren capaian nilai PMPRB Ditjen Bimas Hindu relatif meningkat setelah mengalami penurunan pada tahun 2020. Adapun capaian nilai PMPRB tahun 2019 sebesar 79,36, tahun 2020 sebesar 78,71, tahun 2021 sebesar 79,85 dan tahun 2022 sebesar 84,16. Nilai PMPRB tahun 2022 paling tinggi

dibandingkan dengan dengan tahun-tahun sebelumnya.

### **IKSP.1.6.3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

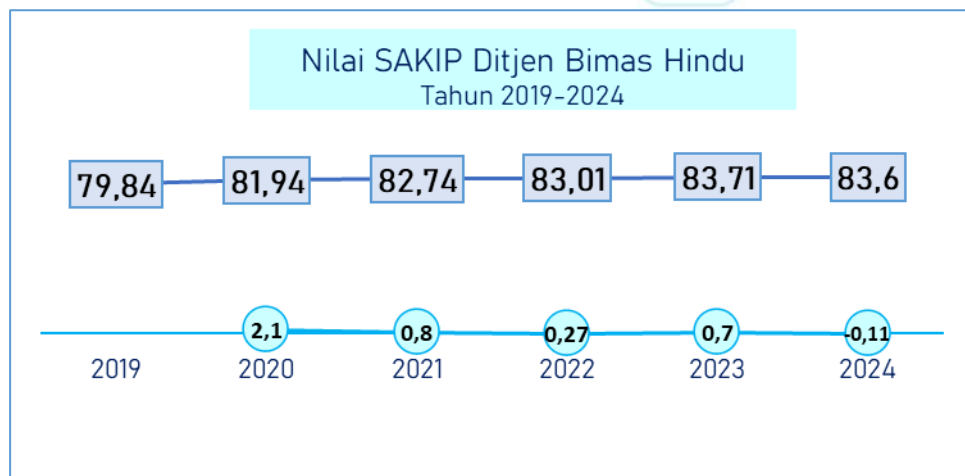
IKSP nilai SAKIP merupakan indikator ketiga sebagai ukuran untuk menilai tata kelola organisasi Ditjen Bimas Hindu yang efektif dan akuntabel. IKSP ini diukur dengan instrumen yang telah dirumuskan oleh Itjen Kementerian Agama sesuai dengan Renstra 2020-2024. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kinerja dimaksud adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) rencana strategis, (2) perjanjian kinerja, (3) pengukuran kinerja, (4) pengelolaan data kinerja, (5) pelaporan kinerja, dan (6) revidi dan evaluasi kinerja. Lebih lanjut secara teknis pelaksanaan SAKIP diatur dalam Permenpan RB Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Secara umum, pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Secara khusus bertujuan (1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, (2) menilai tingkat implementasi SAKIP, (3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja, (4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan (5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Realisasi hasil pengukuran IKSP Nilai SAKIP Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 untuk periode penilaian tahun 2023 sebesar 83,60 atau 104,43% dari target 80,05 dengan kategori Sangat Baik. Nilai AKIP tahun 2024 lebih rendah dari nilai tahun 2023 yang terealisasi sebesar 83,71. Nilai AKIP tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,11 dari tahun 2023. Penurunan tersebut pada aspek pengukuran kinerja dan aspek pelaporan kinerja. Namun demikian hasil pengukuran IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024, dengan kelebihan indeks sebesar 3,55, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 45. IKSP.1.6.3 Nilai SAKIP

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		80,00	80,01	80,03	80,04	80,05	3,55
Realisasi	79,84	81,94	82,74	83,01	83,71	83,60	(Telah melampaui target)
(%)		102,43%	103,41%	103,72%	104,59%	104,43%	4,43%

Tren capaian nilai SAKIP Ditjen Bimas Hindu relatif meningkat dari tahun 2019-2023. Adapun capaian nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 79,84, tahun 2020 sebesar 81,94, tahun 2021 sebesar 82,74, tahun 2022 sebesar 83,01, tahun 2023 sebesar 83,71 dan tahun 2024 sebesar 83,60. Nilai SAKIP pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,1 dari tahun 2019, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,8 dari tahun 2020, tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,27 dari tahun 2021, tahun 2023 mengalami kenaikan 0,7 dari tahun sebelumnya, dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,11, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Grafik 8. Tren Nilai SAKIP Ditjen Bimas Hindu Tahun 2019-2024

Capaian pada tahun 2024 sebesar **83,60** mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun telah melampaui target renstra. Capaian ini memperoleh predikat **A** atau **Memuaskan** pada interval skor **>80 - 90**. Artinya terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Terdapat faktor pendukung tercapainya target nilai SAKIP Ditjen Bimas Hindu yaitu seluruh ASN mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan atas pelaksanaan anggaran. Begitu juga melaksanakan secara rutin

melaksanakan evaluasi secara berkala secara berjenjang. Disamping itu, terdapat juga faktor penghambat yakni capaian kinerja belum dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*, masih terdapat IKSP yang belum tercapai secara maksimal, hasil evaluasi belum ditindaklanjuti secara maksimal.

#### IKSP.1.6.4 Nilai Maturitas SPIP

IKSP nilai maturitas SPIP merupakan indikator keempat sebagai ukuran penilaian tata kelola organisasi Ditjen Bimas Hindu yang efektif dan akuntabel. IKSP ini diukur menggunakan instrumen yang telah dirumuskan oleh Itjen Kementerian Agama sesuai dengan Renstra 2020-2024. Penilai SPIP difokuskan pada penilaian kualitas perencanaan, penilaian struktur dan proses (unsur SPIP), penilaian 4 (empat) tujuan SPIP. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP menyebutkan bahwa SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur SPIP terdiri atas: (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) kegiatan pengendalian, (d) informasi dan komunikasi, dan (e) pemantauan pengendalian intern. Berdasarkan Perka BPKP No 5 Tahun 2021 bahwasanya Nilai Maturitas SPIP diterbitkan untuk Instansi bukan perunit kerja sehingga Nilai Maturitas SPIP Kementerian Agama menjadi Nilai Maturitas SPIP seluruh unit.

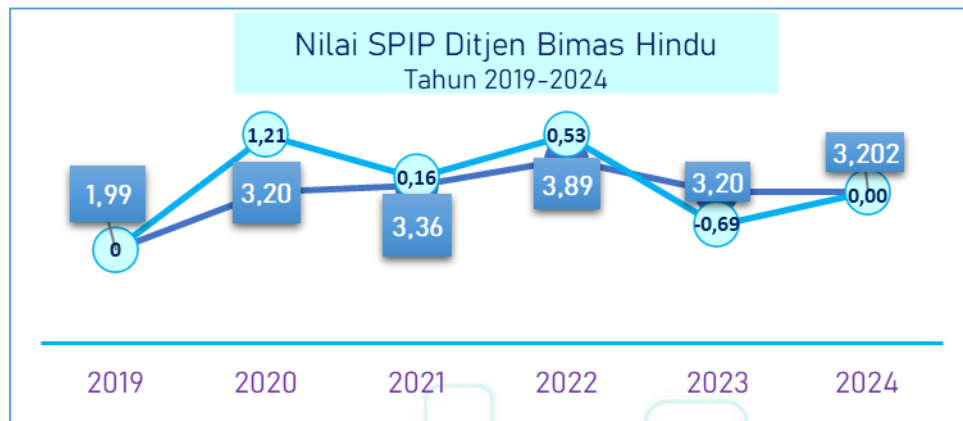
Realisasi nilai maturitas SPIP tahun 2024 sebesar 3,202 atau 156,96% dari target 2,04. Nilai maturitas SPIP tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya. Nilai IKSP ini telah melampaui target renstra tahun 2024 dengan kelebihan indeks sebesar 1,162, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 46. IKSP.1.6.4 Nilai Maturitas SPIP

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang sudah dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		1,99	2,00	2,01	2,03	2,04	1.162
Realisasi	1,99	3,20	3,36	3,89	3,20	3,202	(Telah melampaui target)
(%)		160,80% (120,00%)	168,00% (120,00%)	193,53% (120,00%)	157,64% (120,00%)	156,96% (120,00%)	56,96%

Tren capaian nilai maturitas SPIP Ditjen Bimas Hindu relatif meningkat dari tahun 2019-2024. Adapun capaian nilai maturitas SPIP tahun 2019 sebesar 1,99, tahun 2020 sebesar 3,20, tahun 2021 sebesar 3,36, tahun 2022 sebesar 3,89, tahun 2023 sebesar 3,20 dan tahun 2024 sebesar 3,202. Nilai maturitas SPIP pada tahun 2020

mengalami kenaikan sebesar 1,21 dari tahun 2019, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,16 dari tahun 2020, tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,53 dari tahun 2021, tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -0,69, dan tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023. Kenaikan tahun 2020 paling tinggi dibandingkan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Grafik 9. Tren Nilai Maturitas SPIP Ditjen Bimas Hindu Tahun 2019-2024

Capaian pada tahun 2024 sebesar 3,202 melampaui target renstra 2024. Capaian ini termasuk dalam level maturitas SPIP **Level 3** atau **Terdefinisi** pada interval skor  $3,0 \leq \text{skor} < 4,0$ . Hal ini menandakan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Ditjen Bimas Hindu telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, telah melakukan pelaporan keuangan dan pengelolaan aset dengan baik, berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan, melakukan pengelolaan kinerja secara baik dengan melakukan mitigasi risiko dan melakukan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, melakukan bimbingan teknis mitigasi resiko, menindaklanjuti rekomendasi maturitas SPIP, menyusun daftar resiko, pelaporan kinerja melalui SIPKA dan E SAKIP Reviu Menpan, kepatuhan pelaporan LHKPN dan menindaklanjuti rekomendasi satuan pengawas internal. Kedepan perlu (1) menetapkan kebijakan teknis tentang pengawasan Intern dilingkungan Ditjen Bimas Hindu, (2) mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya, (3) melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan, (4) menindaklanjuti dari proses evaluasi.

## IKSP.1.6.5 Indeks Profesionalitas ASN

IKSP Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan indikator kelima sebagai ukuran penilaian tata kelola organisasi Ditjen Bimas Hindu yang efektif dan akuntabel. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. IKSP Indeks Profesionalisme ASN diukur menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh BKN sesuai dengan renstra 2020-2024. Data IP ASN diperoleh dari aplikasi My ASN yang di olah. Terdapat 4 dimensi yang di ukur untuk memperoleh nilai IP ASN yakni (1) hasil penilaian kinerja, (2) riwayat hukuman disiplin, (3) kompetensi, (4) kualifikasi. Hasil pengukuran IP ASN Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 yang diperoleh sebesar 79,4 atau 99,25% dari target 80,00. Nilai IP ASN tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 18,43 dari tahun 2023 yang sebesar 60,97. Capaian IKSP nilai IP ASN ini belum mencapai target renstra 2024 dengan kekurangan indeks 0,60, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 47. IKSP.1.6.5 Indeks Profesionalitas ASN

Uraian	Tahun						Nilai Indeks yang belum dicapai 2024
	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Target		NA	71,00	74,00	76,00	80,00	0,60
Realisasi	NA	NA	66,45	70,135	60,97	79,40	-
(%)		NA	93,59%	94,78%	80,22%	99,25%	0,75%

Ketidaktercapaian IKSP Nilai IP ASN ini disebabkan oleh belum optimalnya capaian kinerja dari 3 (tiga) dimensi yaitu hasil penilaian kinerja, kompetensi dan kualifikasi. Hanya dimensi riwayat hukuman disiplin yang mencapai 100,00%. Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan IP ASN yakni (1) anggaran untuk peningkatan kompetensi ASN masih kurang, (2) masih rendahnya minat pegawai untuk mengikuti peningkatan kompetensi, (3) sistem perhitungan IP ASN pada aplikasi Simpeg/SIASN untuk dimensi kompetensi belum update (terkadang nilai kompetensi pegawai berkurang).

### C. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Ditjen Bimas Hindu TA 2024 sebesar Rp479.903.401.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus satu ribu rupiah). Sedangkan realisasi anggaran Ditjen Bimas Hindu TA 2024 berdasarkan data OM SPAN 2024 sebesar Rp474.108.392.893,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau 98,79% dari pagu anggaran. Adapun rincian

realisasi anggaran Ditjen Bimas Hindu TA 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 48. Realisasi Alokasi Anggaran TA 2024

Pagu	Realisasi	Sisa	%
479.903.401.000	474.108.392.893	5.795.008.107	98,79

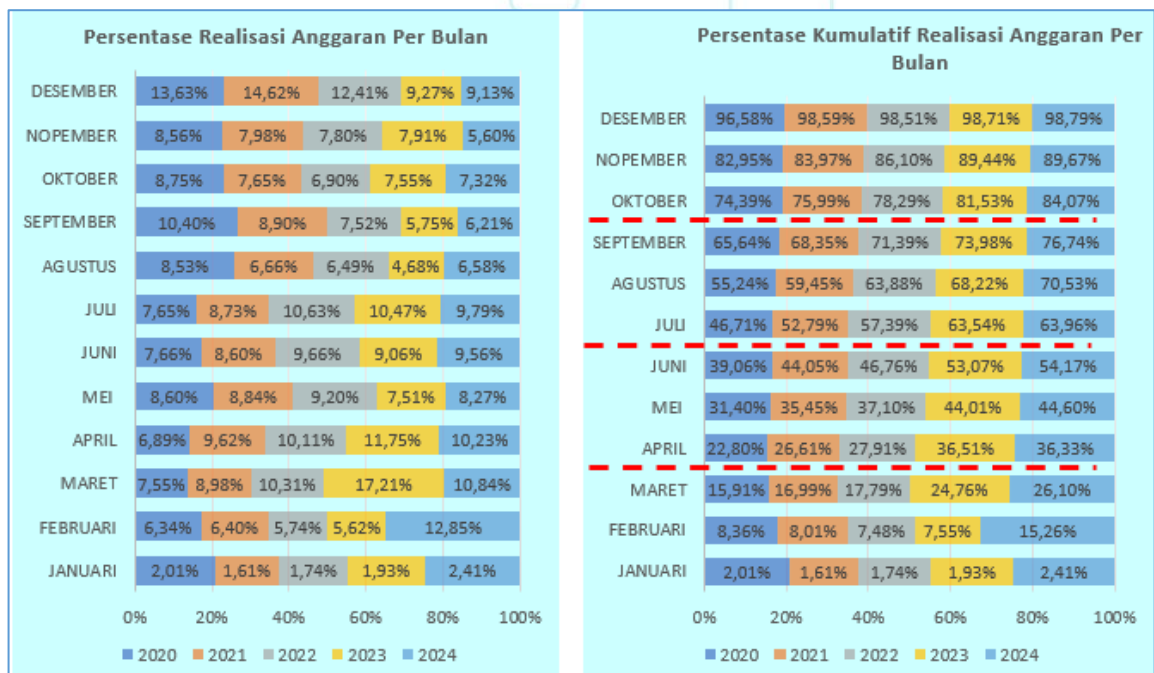
Persentase realisasi anggaran tahun 2024 paling tinggi selama 5 tahun terakhir yang mencapai sebesar 98,79% sedangkan tahun 2023 hanya mencapai 98,71%, tahun 2022 sebesar 98,51%, tahun 2021 sebesar 98,59%, dan tahun 2020 sebesar 96,58%. Namun bila dilihat dari alokasi dan realisasi jumlah anggaran maka alokasi dan realisasi jumlah anggaran tahun 2023 dan 2024 paling rendah dibandingkan dengan tahun 2022, 2021 dan 2020. Hal tersebut disebabkan karena terdapat integrasi pembayaran belanja pegawai dari DIPA Ditjen Bimas Hindu ke DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama khususnya pada satker Kantor Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun gambaran realisasi anggaran Ditjen Bimas Hindu tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020 sebagaimana grafik berikut:



Grafik 10. Tren Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Sesuai dengan perjanjian kinerja Ditjen Bimas Hindu telah menargetkan realisasi anggaran sampai pada bulan Juli 2024 sebesar 70%. Namun pada kenyataannya realisasi tersebut belum tercapai. Adapun realisasi sampai pada bulan Juli 2024 sebesar 63,59%. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah berupa blokir *Automatic Adjustment* (AA) pada anggaran Ditjen Bimas Hindu sebesar Rp49.094.159.000,- sehingga harus melakukan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, rencana penarikan dana serta revisi anggaran. Blokir anggaran ini baru

dapat dibuka pada bulan November 2024 untuk menutup kekurangan belanja pegawai dilingkungan Ditjen Bimas Hindu dan diserahkan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Namun demikian realisasi triwulanan tahun 2024 lebih tinggi bila dibandingkan realisasi triwulanan tahun 2023, 2022, 2021 dan 2020. Adapun realisasi triwulan I 2024 sebesar 26,10%, sedangkan triwulan I 2023 sebesar 24,76%, triwulan I 2022 sebesar 17,79%, triwulan I 2021 sebesar 16,99% dan triwulan I 2020 sebesar 15,91%. Selanjutnya triwulan II 2024 sebesar 54,17%, triwulan II 2023 sebesar 53,07%, triwulan II 2022 sebesar 46,76%, triwulan II 2021 sebesar 44,05% dan triwulan II 2020 sebesar 39,06%. Lebih lanjut triwulan III 2024 sebesar 76,74%, triwulan III tahun 2023 sebesar 73,98%, triwulan III tahun 2022 sebesar 71,39%, triwulan III 2021 sebesar 68,35% dan triwulan III 2020 sebesar 65,64%. Serta triwulan IV 2024 sebesar 98,79%, triwulan IV 2023 sebesar 98,71%, triwulan IV 2022 sebesar 98,51%, triwulan IV 2021 sebesar 98,59%, dan triwulan IV 2020 sebesar 96,58%. Adapun besaran realisasi setiap bulan dan triwulanan pada Ditjen Bimas Hindu terhadap pagu anggaran tahun 2020 s.d 2024 sebagaimana grafik berikut:



Grafik 11. Perbandingan Realisasi Anggaran Bulanan Terhadap Pagu Tahun 2020-2024

### 3. Realisasi Anggaran berdasarkan Fungsi

Realisasi anggaran fungsi agama TA 2024 sebesar 99,30% sedangkan realisasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 98,63%. Persentase realisasi TA 2024 pada fungsi agama mengalami peningkatan sebesar 0,38% sedangkan pada fungsi pendidikan tidak ada peningkatan persentase akan tetapi secara nominal meningkat yang disebabkan adanya penambahan pagu sebesar Rp29.963.758.000,- dari tahun 2023. Adapun realisasi anggaran berdasarkan

fungsi dapat dilihat pada berikut:

Tabel 49. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi Tahun 2020-2024

Fungsi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Agama	96,00%	98,72%	98,06%	121.365.001.000	120.056.911.710	98,92%	115.054.398.000	114.252.009.744	99,30%
Pendidikan	96,66%	98,56%	98,60%	334.885.245.000	330.307.363.222	98,63%	364.849.003.000	359.856.383.149	98,63%
Jumlah	96,58%	98,59%	98,51%	456.250.246.000	450.364.274.932	98,71%	479.903.401.000	474.108.392.893	98,79%

#### 4. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran belanja pegawai TA 2024 sebesar 99,47%. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2023 dari aspek persentase sebesar 1,61%. Begitu juga dari aspek jumlah pagu dan penyerapan anggaran belanja pegawai TA 2024 juga lebih tinggi dari tahun 2023. Sedangkan belanja barang TA 2024 terserap 97,96%. Serapan ini lebih rendah dari serapan tahun 2023 yang hanya sebesar 98,74%. Hal ini menunjukkan terdapat penurunan persentase serapan sebesar -0,78%. Untuk belanja modal terserap sebesar 99,87% yang menunjukkan adanya penurunan persentase serapan -0,10% dari tahun 2023. Selanjutnya belanja Bansos terserap sebesar 99,73% yang memperlihatkan adanya penurunan persentase penyerapan sebesar 0,19% dari tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 50. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020-2024

Jenis Belanja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	97,18%	99,06%	98,88%	143.666.654.000	140.770.009.020	97,86%	161.450.241.000	160.599.591.960	99,47%
Belanja Barang	94,16%	97,24%	97,49%	234.436.210.000	231.492.570.736	98,74%	233.598.851.000	228.823.564.238	97,96%
Belanja Modal	99,55%	99,32%	98,63%	35.552.307.000	35.540.770.176	99,97%	42.364.259.000	42.310.216.695	99,87%
Belanja Bansos	98,92%	99,96%	99,47%	42.595.075.000	42.560.925.000	99,92%	42.490.050.000	42.375.020.000	99,73%
Jumlah	96,58%	98,59%	98,51%	456.250.246.000	450.364.274.932	98,71%	479.903.401.000	474.108.392.893	98,79%

#### 5. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan

Persentase realisasi anggaran pada satker pusat TA 2024 sebesar 98,79%. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 0,57% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya persentase serapan anggaran pada satker daerah (Prov/Kab/Kota) sebesar 99,13%. Persentase ini mengalami penurunan sebesar -0,27%. Sedangkan untuk satker daerah (PTKHN) mengalami kenaikan pagu anggaran pada TA 2024 dan mampu menyerap anggaran sebesar 98,57%. Serapan ini

mengalami kenaikan sebesar 0,02% dari tahun sebelumnya. Secara rincian pagu dan realisasi berdasarkan kewenangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 51. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Tahun 2020-2024

Kewenangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Satker Pusat	95,04%	98,17%	97,09%	100.743.983.000	98.951.502.606	98,22%	94.805.851.000	93.828.745.464	98,79%
Daerah (Prov/Kab/Kot)	97,08%	99,00%	98,86%	124.793.255.000	124.042.326.556	99,40%	122.511.069.000	121.442.238.356	99,13%
Daerah (PTKHN)	95,86%	97,84%	98,40%	230.713.008.000	227.370.445.770	98,55%	262.586.481.000	258.837.409.073	98,57%
Jumlah	96,58%	98,59%	98,51%	456.250.246.000	450.364.274.932	98,71%	479.903.401.000	474.108.392.893	98,79%

#### 6. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Realisasi anggaran Ditjen Bimas Hindu TA 2024 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar 98,97% atau Rp454.309.728.207,- dari pagu anggaran sebesar Rp459.060.716.000,-. Persentase realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 0,22% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya realisasi anggaran bersumber dari PNPB sebesar 94,82% atau Rp19.120.664.686,- dari pagu Rp20.165.284.000,-. Persentase realisasi mengalami penurunan sebesar -2,89% dari tahun sebelumnya. Lebih lanjut realisasi anggaran Hibah Langsung DN sebesar 100,00% atau Rp678.000.000,- dari pagu anggaran. Persentase realisasi anggaran Hibah Langsung DN sama dengan tahun sebelumnya. Namun jumlah pagu dan realisasi anggaran Hibah Langsung DN mengalami penurunan dari tahun 2023. Secara rincian pagu dan realisasi anggaran berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 52. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020-2024

Sumber Dana	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	96,94%	98,79%	98,65%	438.062.721.000	432.576.156.636	98,75%	459.060.716.000	454.309.728.207	98,97%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	77,31%	87,83%	91,91%	17.467.525.000	17.068.118.296	97,71%	20.165.284.000	19.120.664.686	94,82%
Hibah Langsung Dalam Negeri	69,27%	100%	100%	720.000.000	720.000.000	100%	678.000.000	678.000.000	100%
Jumlah	96,58%	98,59%	98,51%	456.250.246.000	450.364.274.932	98,71%	479.903.401.000	474.108.392.893	98,79%

#### 5. Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan

Ditjen Bimas Hindu terdiri atas 5 (lima) program dan 6 (enam) kegiatan. Dari 5 (lima) program tersebut, terdapat 4 (empat) program memiliki 1 (satu) kegiatan. Dan terdapat 1 (satu) program memiliki 2 (kegiatan). Adapun rincian masing-

masing program yaitu:

- (1) program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun terdiri atas 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu (2142);
- (2) program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama terdiri atas 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu (2143);
- (3) program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran terdiri atas 1 (satu) kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu (4436);
- (4) program Pendidikan Tinggi terdiri atas 1 (satu) kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu (5104); dan
- (5) program Dukungan Manajemen (Dukman) terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu (5103), dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu (2144).

Realisasi anggaran masing-masing program digambarkan oleh realisasi anggaran kegiatan. Adapun realisasi masing-masing program dan kegiatan yaitu: (1) program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun dan kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu sebesar 99,18%. Persentase realisasi anggaran program dan kegiatan ini mengalami penurunan sebesar -0,73% dari tahun sebelumnya, (2) Selanjutnya realisasi anggaran program Kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama dan kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu sebesar 99,59%. Persentase realisasi anggaran mengalami peningkatan sebesar 0,46%. (3) Kemudian realisasi anggaran program kualitas pengajaran dan pembelajaran dan kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu sebesar 98,36%. Persentase realisasi anggaran program dan kegiatan ini mengalami peningkatan sebesar 1,01%. (4) Lebih lanjut realisasi anggaran program pendidikan tinggi dan kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu sebesar 97,87%. Persentase realisasi anggaran mengalami penurunan sebesar -1,42%. (5) Sedangkan realisasi anggaran program dukungan manajemen yang diperoleh dari rata-rata realisasi anggaran kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu, dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu mengalami penurunan realisasi anggaran. Adapun realisasi anggaran program Dukungan Manajemen sebesar 99,13%. Persentase realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 0,98% dari tahun 2023. Secara rinci realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 53. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024

Kode Program	Kode Kegiatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Realisasi (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
025.07.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	2142 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	97,38%	98,85%	99,05%	34.149.623.000	34.119.491.173	99,91%	31.624.455.000	31.363.709.751	99,18%
025.07.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	98,98%	99,22%	98,40%	84.459.129.000	83.724.155.120	99,13%	79.701.078.000	79.373.434.938	99,59%
025.07.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	4436 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	-	98,39%	96,68%	36.292.013.000	35.328.563.954	97,35%	34.716.458.000	34.147.312.543	98,36%
025.07.DK Program Pendidikan Tinggi	5104 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	96,33%	96,86%	97,88%	123.687.975.000	122.815.280.815	99,29%	138.051.352.000	135.116.923.727	97,87%
025.07.WA Program Dukungan Manajemen		96,35%	98,86%	98,74%	177.661.506.000	174.376.783.870	98,15%	195.810.058.000	194.107.011.934	99,13%
	5103 Penyenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	96,63%	98,96%	98,89%	140.755.634.000	138.044.027.280	98,07%	160.456.738.000	159.228.437.128	99,23%
	2144 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	93,37%	97,98%	97,57%	36.905.872.000	36.332.756.590	98,45%	35.353.320.000	34.878.574.806	98,66%
Jumlah		96,58%	98,59%	98,51%	456.250.246.000	450.364.274.932	98,71%	479.903.401.000	474.108.392.893	98,79%

#### 6. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program (SP)

Pagu pada Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 tertuang sebesar Rp104.629.733.000,-. Pagu tersebut hanya merupakan pagu satuan kerja pusat. Jumlah pagu ini tidak linier dengan pagu pada Dipa Induk Ditjen Bimas Hindu 2024 yang mencakup keseluruhan yakni satuan kerja pusat, satuan kerja Wilayah, dan satuan kerja PTKHN. Adapun pagu akhir Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 secara keseluruhan sebesar Rp479.903.246.000,-. Seluruh pagu anggaran diperuntukan

mendukung tercapainya SP Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 mulai dari aspek bidang agama, bidang pendidikan dan dukungan manajemen. Alokasi anggaran SP pada aspek bidang agama yang terdiri atas 6 (enam) SP sebesar 16,61% dari jumlah pagu, bidang pendidikan yang terdiri atas 10 (sepuluh) SP sebesar 42,59% dan pada bidang dukungan Manajemen terdiri atas 1 (satu) SP sebesar 40,80%. Dengan demikian alokasi anggaran SP pada aspek bidang pendidikan yang terdiri atas 10 (sepuluh) SP memperoleh alokasi anggaran paling tinggi dibandingkan dengan SP aspek bidang lainnya.

Rata-rata realisasi anggaran pada aspek bidang agama sebesar 99,59%. Realisasi anggaran SP tertinggi pada aspek bidang agama yaitu SP Meningkatkan kualitas pembinaan moderasi beragama sebesar Rp35.989.751.035,- atau 99,96% dari pagu Rp36.004.083.000,-. Sedangkan realisasi anggaran paling rendah pada SP Meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan Agama Hindu sebesar Rp16.033.324.442,- atau 98,73% dari pagu Rp16.239.199.000,-.

Rata-rata realisasi anggaran bidang Pendidikan sebesar 98,16%. Realisasi anggaran SP tertinggi pada aspek bidang pendidikan yaitu SP Meningkatkan kualitas PTKH yang bereputasi internasional sebesar Rp36.297.216.600,- atau 99,95% dari pagu Rp36.315.626.000,-. Sedangkan realisasi anggaran paling rendah pada SP Meningkatkan kualitas asesmen dan kemampuan berfikir siswa sebesar Rp1.524.489.086,- atau 93,47% dari pagu Rp1.630.959.000,-.

Rata-rata realisasi anggaran aspek bidang dukungan manajemen sama dengan realisasi SP nya. Adapun realisasi anggaran SP Meningkatkan tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel sebesar Rp194.107.011.934,- atau 99,13% dari pagu Rp195.810.058.000.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 menyebutkan efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program atau capaian RO. Lebih lanjut dalam pasal 8 disebutkan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan formula:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E merupakan efisiensi, PAKi adalah pagu anggaran keluaran i, RAKi adalah realisasi anggaran keluaran i, dan Cki adalah capaian keluaran i. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Batas maksimal Nilai Efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100% di ukur dengan formula:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Kategori nilai efisiensi dengan kriteria nilai efisiensi lebih dari (>90%), pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; nilai efisiensi 80% sampai 90% (80%-90%), pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi 50% sampai 79,99% (50%-79,99%), pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien, nilai efisiensi kurang dari 50% (<50%), pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata NE sasaran program Ditjen Bimas Hindu tahun 2023 sebesar 56,61% kategori Cukup Efisien. Lebih lanjut, nilai efisiensi tertinggi adalah meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berfikir siswa yang merupakan salah satu SP pada aspek bidang pendidikan dengan nilai efisiensi 0,07 atau 66,32% kategori Cukup Efisien. Sedangkan capaian SP dengan nilai efisiensi terendah adalah meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional yang merupakan salah satu SP pada aspek bidang pendidikan dengan nilai efisiensi 0,00 atau 50,07% kategori Cukup Efisien. Adapun lebih rinci, realisasi anggaran dan efisiensi Ditjen Bimas Hindu berdasarkan SP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 54. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Sasaran Program (SP) Tahun 2024

No	Sasaran Program	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
<b>Aspek Bidang Agama</b>		<b>79.701.078.000</b>	<b>79.374.357.538</b>	<b>99,59%</b>					
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu	16.239.199.000	16.033.324.442	98,73%	2.765	2.761	0,01	52,77%	Cukup Efisien
2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama	5.231.161.000	5.212.840.645	99,65%	1.460	1.460	0,00	51,12%	Cukup Efisien
3	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	36.004.083.000	35.989.751.035	99,96%	2.654	2.654	0,00	50,24%	Cukup Efisien

4	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	13.060.634.000	12.980.763.136	99,39%	36	36	0,06	64,25%	Cukup Efisien
5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	8.948.558.000	8.942.757.983	99,94%	14.480	14.480	0,00	50,16%	Cukup Efisien
6	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu	217.443.000	214.920.297	98,84%	8	8	0,01	52,90%	Cukup Efisien
<b>Bidang Pendidikan</b>		<b>204.392.265.000</b>	<b>200.658.192.466</b>	<b>98,17%</b>					
1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	22.186.015.000	21.339.980.855	96,19%	28.403	28.403	0,02	54,59%	Cukup Efisien
2	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berfikir siswa	1.630.959.000	1.524.489.086	93,47%	13	13	0,07	66,32%	Cukup Efisien
3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	21.818.035.000	21.448.342.731	98,31%	5.756	5.716	0,01	52,46%	Cukup Efisien
4	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	61.878.242.000	61.210.618.817	98,92%	8.927	8.868	0,04	58,86%	Cukup Efisien
5	Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Meningkatnya standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	47.066.814.000	45.756.524.220	97,22%	1.726	1.726	0,06	65,56%	Cukup Efisien
7	Menguatnya Pendidikan karakter siswa	4.059.856.000	4.038.395.263	99,47%	3.972	3.972	0,01	51,32%	Cukup Efisien
8	Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional	36.315.626.000	36.297.216.600	99,95%	6	6	0,00	50,07%	Cukup Efisien
9	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	4.643.335.000	4.383.517.985	94,40%	2.203	2.203	0,06	63,92%	Cukup Efisien
10	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	4.793.383.000	4.659.106.909	97,20%	140	140	0,03	57,00%	Cukup Efisien
<b>Bidang Manajemen</b>		<b>195.810.058.000</b>	<b>194.075.842.889</b>	<b>99,11%</b>					
1	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel	195.810.058.000	194.075.842.889	99,11%	1.620	1.619	0,06	64,29%	Cukup Efisien
<b>Jumlah</b>		<b>479.903.401.000</b>	<b>474.108.392.893</b>	<b>98,79</b>			<b>0,03</b>	<b>56,61%</b>	<b>Cukup Efisien</b>

Sumber Data: OM SPAN 2024 tanggal 17 Januari 2025

#### D. KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024

Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen Bimas Hindu TA 2024 sebesar 82,38 kategori Baik/4. NKA TA 2024 mengalami penurunan sebesar 10,01 dari tahun sebelumnya. Begitu juga paling rendah dibandingkan dengan NKA 4 tahun terakhir. NKA TA 2024 ini belum mencapai target NKA yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 sebesar 95. Adapun rincian NKA

Ditjen Bimas Hindu TA 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 55. NKA Ditjen Bimas Hindu Tahun 2020-2024

No	Nilai	Bobot	Tahun Anggaran					
			2020	2021	2022	2023	Bobot	2024
1	SMART/Monev Kemenkeu	60%	92,04	91,56	95,96	91,13	50%	67,94
2	IKPA	40%	96,27	96,05	94,68	94,28	50%	96,81
<b>Nilai Kinerja Anggaran</b>			<b>93,73</b>	<b>93,36</b>	<b>95,45</b>	<b>92,39</b>		<b>82,38</b>

Sumber Data: NK Aplikasi Smart dan Nilai IKPA pada OM SPAN 2023 tanggal 17 Januari 2025

Pada tahun 2024 terdapat perubahan regulasi Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Perubahan tersebut meliputi **(1) penggabungan regulasi** yaitu PMK 22/PMK.02/2021 tentang EKA Kementerian/Lembaga, PMK 204/PMK.02/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran Bendahara Umum Negara (EKA BUN), dan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksana Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disempurnakan melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. PMK ini kemudian diturunkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Kinerja Anggaran (PPKA) dan EKA perencanaan anggaran **(2) menghilangkan irisan penilaian** seperti penyerapan anggaran dan konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) menjadi fokus pemantauan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) guna melakukan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA, dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) fokus pada efektivitas dan efisiensi guna Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran/EKA. **(3) Penguatan sinergi dan peran** meliputi DJA fokus pada aspek perencanaan anggaran, DJPb fokus pada aspek pelaksanaan anggaran, dan hasil monev DJA dan DJPb dipertukarkan kemudian ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas belanja.

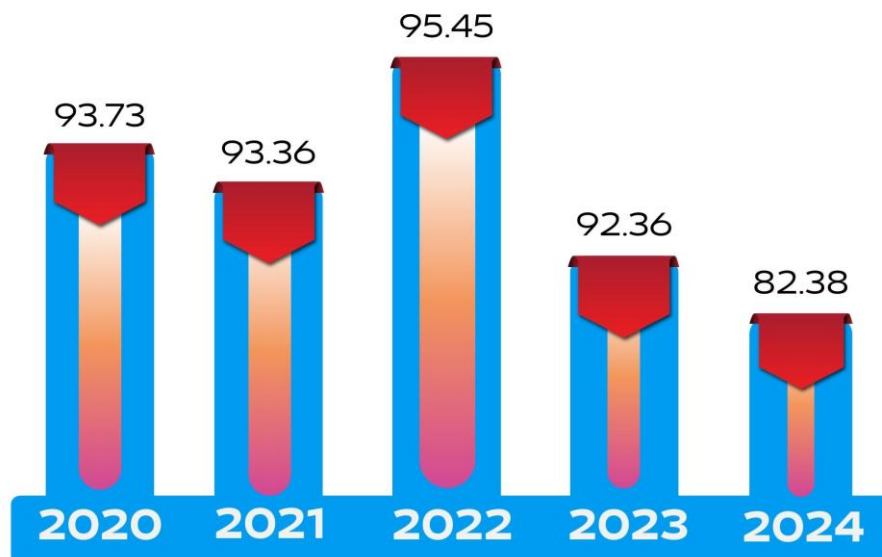
Selanjutnya pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (melalui aplikasi Monev Kemenkeu) berfokus pada penilaian Efektivitas dan Efisiensi. Penilaian Efektivitas terdiri atas 2 (dua) variabel yakni Indikator Kinerja Program (IKP) yang merupakan penilaian efektivitas tingkat Unit Eselon I, dan Capaian Rincian Output (CRO) yang merupakan penilaian terhadap efektivitas tingkat satker. Penilaian Efisiensi meliputi 2 (dua) variabel yaitu Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Efisiensi SBK. Sedangkan pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memiliki variabel yakni Revisi DIPA, Belanja Kontraktual, Dispensasi SPM, Deviasi Halaman 3 DIPA, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Penyerapan Anggaran, dan Pengelolaan UP dan TUP.

Lebih Lanjut perubahan regulasi ini juga berdampak pada komposisi jumlah bobot penilaian NKA Tahun 2024. Adapun jumlah bobot Nilai Kinerja Perencanaan

Anggaran (Monev Kemenkeu) sebesar 50% dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA pada OM-SPAN) sebesar 50%. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya Pengelolaan Anggaran (Nilai Kinerja pada aplikasi SMART) dengan bobot 60% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Aplikasi OM-SPAN sebesar 40%.

Ketidaktercapaian NKA Ditjen Bimas Hindu TA 2024 disebabkan oleh: (1) terdapat masalah pada penginputan laporan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) pada role Monev Sakti yang tidak dapat dilakukan karena ketidakterediaan IKP, sehingga Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tidak optimal khususnya variabel IKP (Efektifitas Unit Eselon I bobot 30%) memperoleh nilai 0 (Nol). Ketidakterediaan IKP pada rove Monev Sakti disebabkan kurang lengkapnya informasi kinerja pada aplikasi Renja Krisna khususnya tagging IKP pada "Unit Organisasi" dan Unit Organisasi yang terlibat". (2) Belum optimalnya perolehan dari penilaian Efisiensi khususnya variabel penggunaan SBK, yang disebabkan oleh belum semua Rincian Output (RO) pada Ditjen Bimas Hindu menggunakan SBK. Dari 69 RO yang ada hanya 19 RO yang tersebar di 8 satuan kerja yang menggunakan SBK.

Capaian NKA Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 paling rendah dibanding tahun sebelumnya. Capaian NKA tahun 2022 paling tinggi dibandingkan tahun 2020, 2021, 2023 dan 2024 yang mencapai 95,45 kategori Sangat Baik. Adapun tren capaian NKA Ditjen Bimas Hindu dari tahun 2020 – 2024 sebagaimana pada grafik berikut:



Grafik 12. NKA Ditjen Bimas Hindu Tahun 2020-2024

## E. CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN AGAMA Penguatan Moderasi Beragama (PMB)

Berdasarkan KMA Nomor 93 tahun 2022 Tentang Pedoman Penguatan Moderasi Beragama (MB) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama bahwa

seluruh PNS Kementerian Agama wajib mengikuti PMB. Hal ini bertujuan membentuk PNS Kementerian Agama yang mempunyai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. PNS Kementerian Agama dapat mengikuti PMB yang dilaksanakan oleh: (1) kelompok kerja PMB; (2) pusat Pendidikan dan pelatihan; (3) balai/loka pendidikan dan pelatihan keagamaan; (4) satuan kerja; dan/atau (5) rumah MB PTKN. Selanjutnya PMB dilaksanakan dalam bentuk; (1) lokakarya; (2) pelatihan; (3) orientasi; dan/atau (4) sosialisasi. Adapun kegiatan PMB yang telah dilaksanakan dilingkungan Ditjen Bimas Hindu yakni berupa orientasi, pelatihan, seminar, sosialisasi dan kuliah kerja nyata yang melibatkan penyuluh agama Hindu, tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, lembaga agama dan keagamaan, tokoh umat serta pengelola rumah ibadah Hindu. Adapun anggaran Moderasi Beragama Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 56. Realisasi Anggaran Moderasi Beragama Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024

No	Kegiatan yang diselenggarakan	Pagu Anggaran	Lokasi Anggaran	Realisasi	%
1	Dialog Kerukunan Antar Umat Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama	1.398.066.000	Ditjen Bimas Hindu	1.398.050.550	100,00
2	Bantuan operasional penguatan moderasi beragama	575.000.000	Ditjen Bimas Hindu	575.000.000	100,00
3	Launching Pasraman Sebagai Pusat Penguatan Karakter Berbasis Moderasi Beragama	448.850.000	Ditjen Bimas Hindu	440.000.000	98,03
4	Sosialisasi Moderasi Beragama Dalam Doa Bersama Lintas Agama	208.819.000	Ditjen Bimas Hindu	208.819.000	100,00
5	Dialog Moderasi Beragama di Lingkungan Mahasiswa	69.000.000	STAHN Mpu Kuturan	69.000.000	100,00
6	Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama bagi mahasiswa	86.570.000	IAHN Tampung Penyang	86.176.420	99,55
7	Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama bagi mahasiswa	29.109.000	IAHN Tampung Penyang	28.638.900	98,39
8	Orientasi Penguatan Moderasi Beragama Untuk pegawai	48.144.000	IAHN Tampung Penyang	47.893.980	99,48
9	Pelaksanaan KKN Moderasi Beragama	50.834.000	IAHN Tampung Penyang	50.422.660	99,19
10	Moderasi Beragama Guru Agama Hindu	20.230.000	KanKemenag Kab. Badung	20.227.200	99,99
11	Orientasi Pelopor Moderasi Beragama Lembaga Agama dan Keagamaan	211.467.000	Kanwil Prov. Bali	211.463.915	100,00
12	Penguatan Budaya dan Moderasi Beragama Siswa Hindu di Kab. Buleleng	163.275.000	Kanwil Prov. Bali	163.275.000	100,00
13	Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	206.690.000	Kanwil Prov. Bali	206.683.147	100,00
14	Penyiaran Moderasi Beragama Melalui Media Digital	10.200.000	KanKemenag Kab. Bangli	10.200.000	100,00

15	Dialog Tokoh Agama Hindu dalam Toleransi dan Moderasi Beragama	26.350.000	Kanwil Prov. Banten	26.350.000	100,00
16	Pembinaan Moderasi Beragama Pada Penyuluh Agama Hindu dan Tenaga Teknis Keagamaan Hindu	12.160.000	Kanwil Prov. Bengkulu	12.160.000	100,00
17	Dialog Kerukunan Intern dan Moderasi Beragama Antara Pemuka Agama dan Masyarakat Hindu	57.050.000	KanKemenag Kota Denpasar	57.050.000	100,00
18	Pembinaan Penguatan Moderasi Beragama dan Toleransi	17.730.000	Kanwil Prov. DI Yogyakarta	17.730.000	100,00
19	Bimbingan Teknis Penyuluhan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Hindu	19.720.000	Kanwil Prov. DKI Jakarta	19.720.000	100,00
20	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Dalam Rangka Penguatan Moderasi Beragama	24.000.000	Kanwil Prov. DKI Jakarta	23.998.000	99,99
21	Pembinaan Moderasi Beragama bagi guru Agama Hindu	22.220.000	KanKemenag Kab. Gianyar	22.220.000	100,00
22	Pembinaan Moderasi Beragama bagi Pengelola Pasraman/Sekolah Minggu	39.700.000	Kanwil Prov. Gorontalo	39.700.000	100,00
23	Pembinaan Moderasi Beragama bagi Guru Pasraman/Sekolah Minggu	39.850.000	Kanwil Prov. Gorontalo	39.850.000	100,00
24	Pengenalan Moderasi Beragama pada generasi muda Hindu	53.060.000	Kanwil Prov. Jambi	53.059.760	100,00
25	Workshop Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Hindu	55.420.000	Kanwil Prov. Jawa Barat	55.420.000	100,00
26	Orientasi Penguatan Pendidikan Karakter dan Moderasi Beragama pada Siswa Pasraman	59.200.000	Kanwil Prov. Jawa Timur	59.080.000	99,80
27	Pembinaan Tata Kelola Sekolah Minggu Yang Berwawasan Moderasi dan Kebangsaan	71.340.000	Kanwil Prov. Kalimantan Barat	70.910.000	99,40
28	Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama	137.057.000	Kanwil Prov. Kalimantan Selatan	137.057.000	100,00
29	Pembinaan Kerukunan Umat dan Moderasi Beragama melalui Utsawa Dharma Gita	104.488.000	Kanwil Prov. Kalimantan Tengah	104.485.500	100,00
30	Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu dan Moderasi Beragama	60.204.000	Kanwil Prov. Kalimantan Tengah	60.173.000	99,95
31	Workshop Pembinaan Moderasi Beragama Bagi Guru Pasraman	112.984.000	Kanwil Prov. Kalimantan Tengah	112.978.750	100,00
32	Pembinaan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama Hindu	22.000.000	KanKemenag Kab. Karangasem	22.000.000	100,00
33	Penyuluhan Kerukunan dan Moderasi Beragama melalui media Seni Bondres	77.445.000	KanKemenag Kab. Karangasem	77.445.000	100,00
34	Pembinaan Penguatan Karakter dan Moderasi Beragama Siswa Tk. SMA/K	50.000.000	KanKemenag Kab. Karangasem	50.000.000	100,00
35	Pembinaan Penguatan Kurikulum Pasraman Bermuatan Moderasi Beragama	50.000.000	KanKemenag Kab. Karangasem	50.000.000	100,00
36	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Budaya dan Seni Keagamaan Hindu	48.440.000	Kanwil Prov. Lampung	48.439.500	100,00
37	Pembinaan Pasraman Kilat dalam pemahaman moderasi	29.550.000	Kanwil Prov. Maluku	29.550.000	100,00
38	Dialog kerukunan intern umat beragama dan moderasi beragama hindu	54.150.000	Kanwil Prov. NTB	54.150.000	100,00
39	Penguatan peran guru pasraman dalam penanaman nilai toleransi dan moderasi beragama	40.550.000	Kanwil Prov. NTB	40.550.000	100,00

40	Kegiatan Penguatan Penyuluh Agama Hindu & Petugas Siaran Mimbar pada Media Elektronik Dalam Moderasi Beragama	18.890.000	Kanwil Prov. NTT	18.890.000	100,00
41	Kegiatan Pembinaan & Penguatan Karakter Siswa Pasraman Dalam Moderasi Beragama Se-Daratan Timor	60.370.000	Kanwil Prov. NTT	60.210.000	99,73
42	Kegiatan Pembinaan/Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pengurus Pasraman/Sekolah Minggu	56.392.000	Kanwil Prov. NTT	56.366.862	99,96
43	Pembinaan Moderasi Beragama Bagi Peserta Didik Pasraman di Manokwari	26.800.000	Kanwil Prov. Papua Barat	26.800.000	100,00
44	Pembinaan Tematik Moderasi Beragama untuk Lembaga Keagamaan Hindu	144.779.000	Kanwil Prov. Sulawesi Tenggara	144.779.000	100,00
45	Dialog Moderasi Beragama Bersama Tokoh Umat Hindu Sumbar	60.000.000	Kanwil Prov. Sumatera Barat	59.265.000	98,78
<b>TOTAL</b>		<b>5.178.153.000</b>		<b>5.166.238.144</b>	<b>99,77</b>

#### F. DUKUNGAN DITJEN BIMAS HINDU TERHADAP PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada Ditjen Bimas Hindu

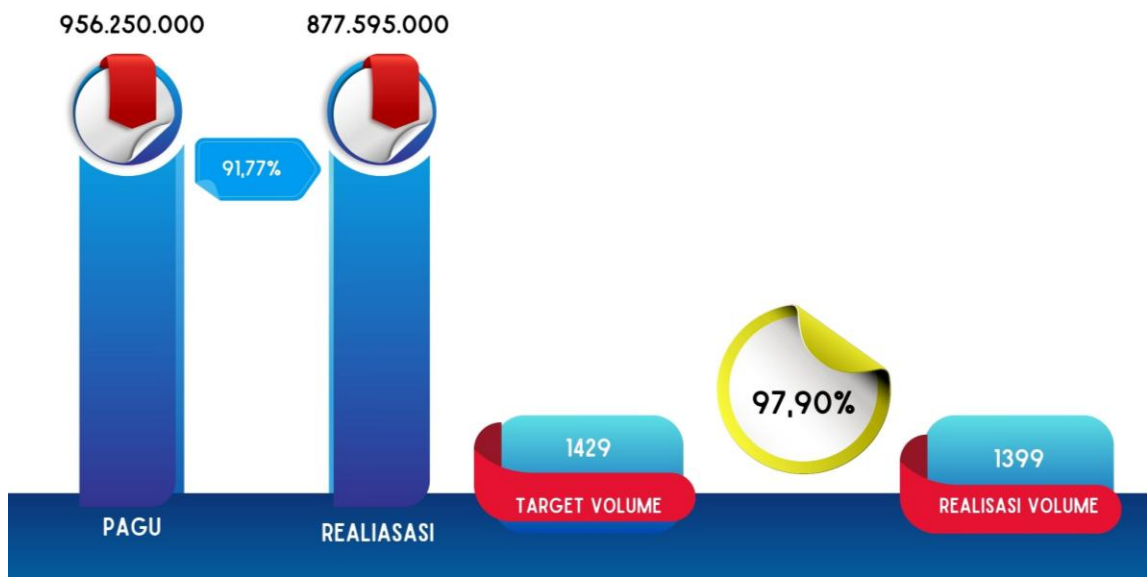
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerjasama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem agar dilaksanakan tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, (2) peningkatan pendapatan masyarakat, (3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Selanjutnya Inpres ini menugaskan Kementerian Agama untuk (a) meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan serta menyiapkan program/bantuan bidang Pendidikan secara tepat sasaran, (b) menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan bantuan pendidikan lainnya secara tepat sasaran, (c) mendorong peran perguruan tinggi keagamaan untuk melakukan pendampingan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui tri dharma perguruan tinggi. Adapun program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Ditjen Bimas Hindu yakni PIP/KIP Kuliah yang merupakan strategi kebijakan pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Adapun alokasi anggaran P3KE pada rencana kerja Ditjen Bimas Hindu dibuktikan dengan *budget tagging* aplikasi Krisna sebagaimana gambar berikut:

NO	KODE	NOMENKLATUR RINCIAN OUTPUT	ALOKASI 2024	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	SATUAN	STATUS	PENELAAH	
										PPN	DJA
1	5104.QEJ.001	Mahasiswa penerima PIP Kuliah	40.774.800,0	3.890,0	3.755,0	3.773,0	3.623,0	Orang	approved	✓	✓
<p>Dukungan Sasaran Kegiatan : 05 - Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat</p> <p>Unit Organisasi : 07 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu</p> <p>Unit Eselon 2 : 01 - Direktorat Pendidikan Hindu</p> <p>Nawacita : 05 - Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera</p> <p>Prioritas Nasional : 03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</p> <p>Program Prioritas : 04 - Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas</p> <p>Kegiatan Prioritas : 02 - Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun</p> <p>Proyek Prioritas Nasional : 02 - Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat</p> <p>Tematik : * 005 - Anggaran Pendidikan</p> <p>Janji Presiden : 017 - KIP Kuliah</p> <p>Major Project : 00 - Bukan Major Project</p> <p>Jenis Klasifikasi Rincian Output :</p> <p>Referensi : wilayah.kabupaten</p> <p>Target RKA : Dijumlahkan</p> <p>MYC : TIDAK</p> <p>File MYC :</p> <p>File Rab : 5104.QEJ.001 RAB KIP Kuliah tambahan.pdf</p> <p>File Tor : 5104.QEJ.001 TOR KIP Kuliah-tambahan.pdf</p> <p>Alokasi 2025 : 40,784,800</p> <p>Alokasi 2026 : 38,603,000</p> <p>Alokasi 2027 : 38,266,800</p> <p>Dynamic Tagging : * Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuil/ntil terbawah/t (indikator)</p> <p>* Pengurangan beban pengeluaran masyarakat (goal)</p> <p>* Implementasi Kartu Indonesia Pintar &amp; Beasiswa Bidik Misi / Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pelajar dari Keluarga Miskin (indikator)</p> <p>Proyek Prioritas RKP :</p>											

Gambar 2. Budget Tagging P3KE TA 2024

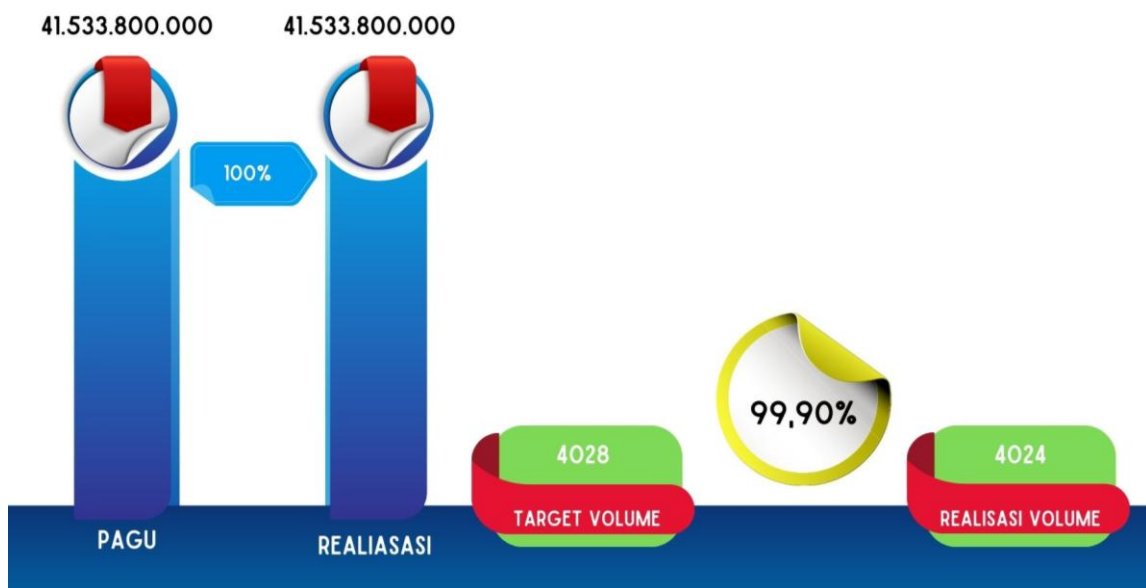
Pemberian Bantuan PIP pada Ditjen Bimas Hindu diberikan dalam bentuk uang kepada para peserta didik pada satuan pendidikan keagamaan Hindu dari Jenjang Adi Widya Pasraman, Madyama Widya Pasraman dan Utama Widya Pasraman yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan PIP. Adapun jumlah bantuan per jenjang yaitu: (1) jenjang Adi Widya Pasraman sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik pertahun, (2) jenjang Madyama Widya Pasraman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik pertahun, (3) jenjang Utama Widya Pasraman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per peserta didik pertahun. Bantuan PIP ini disalurkan dengan transfer langsung ke rekening peserta didik.

Alokasi anggaran dan volume target bantuan PIP Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 sebesar Rp1.013.500.000,- (satu miliar tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan volume 1.441 orang. Terdapat pemutakhiran pagu sehingga pagu akhir PIP tahun 2024 menjadi Rp956.250.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan volume 1.429 orang. Realisasi anggaran PIP tahun 2024 sebesar Rp877.595.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 91,77% dari pagu anggaran PIP. Sedangkan realisasi fisik sebesar 1.399 orang atau 97,90% dari target. Lebih rinci mengenai alokasi dan volume PIP tahun 2024 sebagaimana grafik berikut:



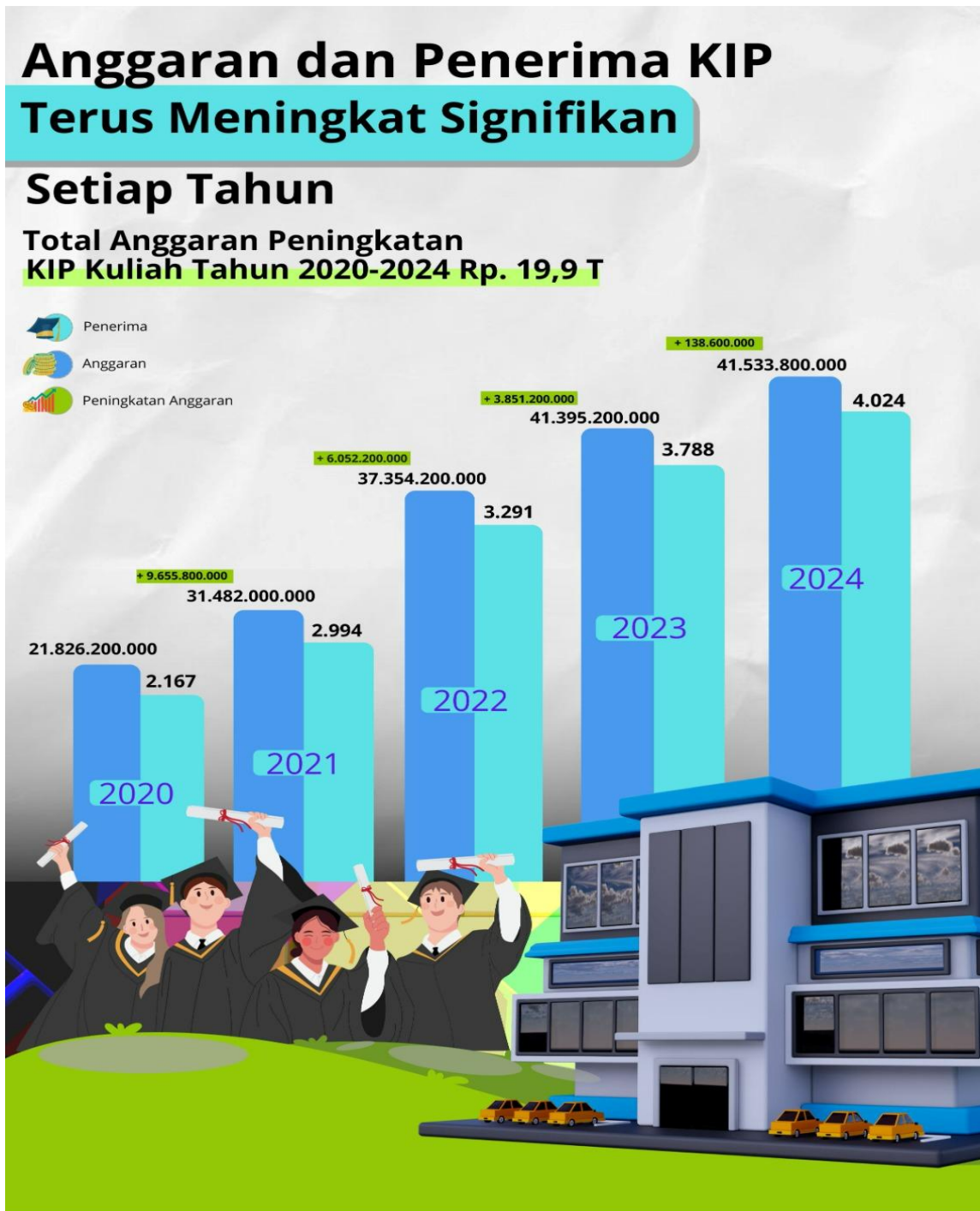
Grafik 13 Anggaran dan Target Volume PIP Tahun 2024

Selanjutnya KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Kegamaan Hindu (PTKH) Negeri dan Swasta diberikan kepada mahasiswa *ongoing* dan mahasiswa baru. KIP Kuliah diberikan sebesar Rp6.600.000 per semester. Penyaluran KIP Kuliah dengan transfer langsung ke rekening masing-masing mahasiswa. Adapun alokasi anggaran KIP Kuliah sebesar Rp41.533.800.000 dengan target volume sebanyak 4.028 orang mahasiswa. Adapun realisasi anggaran KIP Kuliah tahun 2024 sebesar Rp41.533.800.000 atau 100,00% dari pagu. Sedangkan realisasi volume sebanyak 4.024 orang mahasiswa atau 99,90% dari target volume 4.028 orang. Lebih rinci berikut gambaran anggaran dan volume KIP Kuliah tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 14. Anggaran dan Target Volume KIP Kuliah Tahun 2024

Tren anggaran dan penerima KIP Kuliah tahun 2020-2024 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan anggaran KIP Kuliah tahun 2024 sebesar Rp138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah). Kenaikan ini paling kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan kenaikan paling tinggi pada tahun 2021, sebagaimana disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 15. Anggaran dan Target Volume KIP Kuliah Tahun 2020-2024

### **Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) pada Ditjen Bimas Hindu**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, telah dilakukan pendaftaran dan pendataan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN). Adapun pendaftaran dan pendataan tersebut telah dilakukan pada 4 PTKHN yakni (1) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebanyak 104 orang, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya sebanyak 15 orang, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram sebanyak 36 orang, dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja sebanyak 68 orang. Jumlah keseluruhan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pendukung lainnya Non ASN yang telah terdaftar Jamsosnaker sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 223 orang.

### **Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Ditjen Bimas Hindu**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, telah dilakukan pendaftaran pendidik, tenaga kependidikan dan pendukung lainnya di PTKHN. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di PTKHN yang terdaftar pada BPJS Kesehatan sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 223 orang. Adapun jumlah rinciannya yakni (1) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebanyak 104 orang, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya sebanyak 15 orang, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram sebanyak 36 orang, dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja sebanyak 68 orang.

### **Program Penurunan Stunting pada Ditjen Bimas Hindu**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, telah dilakukan kegiatan Pembinaan Keluarga Sukinah dan Pembinaan Pranikah pada Remaja/Pemuda. Adapun bentuk aktivitas yang telah dilakukan yakni sosialisasi, bimbingan, workshop. Sasaran dari kegiatan tersebut yakni keluarga muda yang baru menikah, remaja, dan calon pengantin. Adapun metode pelaksanaan kegiatannya melalui luring, dengan melibatkan dinas kesehatan, pemuka agama, badan konseling.

## **G. CAPAIAN KINERJA LAINNYA**

### **Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya**

Capaian berikutnya yakni penyelenggaraan Tujuan Kementerian Agama yang keempat yakni peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas. Guna mewujudkan tujuan tersebut khususnya pendidikan umum berciri khas agama, Menteri Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya. Pendidikan Widyalyaya diselenggarakan untu mempersiapkan peserta didik memiliki akhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan ke jenjang

yang lebih lanjut. Adapun jenjang pendidikan Widyalya diselenggarakan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Widyalya dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, sedangkan pendirian Widyalya dapat berasal dari pendirian baru dan perubahan dari jenis satuan pendidikan lain. Pada tahun 2024, Ditjen Bimas Hindu pendidikan Widyalya telah di launching oleh Dirjen Bimas Hindu. Begitu juga Ditjen Bimas Hindu telah memberikan izin operasional kepada satuan Pendidikan Widyalya yang telah didirikan oleh masyarakat. Namun demikian saat ini juga sedang proses perubahan PMA Nomor 2 Tahun 2024 dengan menambahkan bagian batang tubuh pasal penegerian Widyalya.

### **Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa (STAHN Japa) Klaten Jawa Tengah**

Pada tanggal 13 Mei 2024 telah terbit PMA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah. Hal tersebut guna meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi keagamaan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam rumpun ilmu agama Hindu. Begitu juga telah terbit juga PMA tentang Ortaker dan Statuta STAHN Japa.

# LAUNCHING PENDIDIKAN HINDU

# WIDYALAYA

SATUAN PENDIDIKAN UMUM DENGAN BERKHAAS AGAMA HINDU



## LAUNCHING PENDIDIKAN HINDU WIDYALAYA

N JAWA TENGAH

a Hari Selasa, 9 Juli 202

Oleh:

ma Re Indonesia

**KLATEN JAWA TENGAH**

**Diresmikan pada Hari Selasa, 9 Juli 2024**

Oleh:

Ment Agama Rep Indonesia



**PERESMIAN  
STAHN JAPA**

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

**B. Saran**

## Bab IV Penutup

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas Ditjen Bimas Hindu terhadap tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran tahun 2024. Laporan ini disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan KMA Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Agama.

### A. KESIMPULAN

Secara umum, capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 atas 17 (tujuh belas) sasaran program dan 36 (tiga puluh enam) IKSP yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja menunjukkan kinerja yang BAIK. Namun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Bimas Hindu Tahun 2024 antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap setiap indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian rerata sasaran program Ditjen Bimas Hindu sebesar **89,40%** dengan kategori BAIK. Capaian tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023 yang sebesar 94,43% begitu juga dari tahun 2022 yang sebesar 101,67%.
2. Capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu diperoleh dari rerata dari hasil 17 SP. Capaian 17 SP diperoleh dari hasil pengukuran dari 36 IKSP. Adapun rincian hasil dari 17 SP sebagai berikut 7 (sepuluh) SP kategori sangat baik dengan capaian >100-120%, 6 (enam) SP kategori baik dengan capaian antara 80-100%, 2 (dua) kategori cukup dengan capaian antara 50-79,99%, 2 (dua) SP kategori kurang.

Sasaran program yang menunjukkan rerata capaian kinerja sangat baik (>100-120%) adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program 7, yaitu menguatkan sistem pendidikan yang berperspektif moderat, sebesar 113,50%
- 2) Sasaran Program 10, yaitu Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan sebesar 120,00%.
- 3) Sasaran Program 11, yaitu Meningkatnya Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP sebesar 120,00%.
- 4) Sasaran Program 12, Meningkatnya Meningkatnya standar dan system penjaminan mutu pendidikan sebesar 120,00%
- 5) Sasaran Program 15, Meningkatnya Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja sebesar 120,00%.
- 6) Sasaran Program 16, yaitu Meningkatnya Meningkatnya kualitas

pemanfaatan penelitian sebesar 120,00%.

- 7) Sasaran Program 17, yaitu Meningkatnya Meningkatkan tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel sebesar 119,57%.

Sasaran program yang menunjukkan rerata capaian kinerja baik (80-100%) adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program 1, yaitu Meningkatnya Meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu sebesar 86,81%
- 2) Sasaran Program 2, yaitu Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama sebesar 100,00%
- 3) Sasaran Program 3, yaitu Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama sebesar 94,74%.
- 4) Sasaran Program 4, yaitu Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama sebesar 100,00%.
- 5) Sasaran Program 9, yaitu Menguatnya Pendidikan karakter siswa sebesar 86,72%.
- 6) Sasaran Program 13, yaitu Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama sebesar 84,42%

Sasaran program yang menunjukkan rerata capaian kinerja cukup (50-79,99%) adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program 5, yaitu Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan sebesar 70,83%
- 2) Sasaran Program 8, yaitu Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berfikir siswa sebesar 57,04%

Sasaran program yang menunjukkan rerata capaian kinerja kurang (<50%) adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program 6, yaitu Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu sebesar 6,26%.
- 2) Sasaran Program 14, yaitu Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional sebesar 0,00%

3. Sedangkan hasil pengukuran atas 36 IKSP diperoleh hasil yakni 19 (sembilan belas) IKSP berkategori sangat baik dengan capaian >100-120%, 8 (delapan) IKSP berkategori baik dengan capaian antara 80-100%, 2 (dua) IKSP berkategori cukup dengan capaian antara 50-79,99%, 6 (enam) IKSP berkategori kurang, dan 1 (satu) IKSP yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2024 yaitu Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Adapun penyebabnya yakni berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-2274/SJ.B-IV/OT.003/3/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi

Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi yang menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dihentikan, sehingga mulai tahun 2023 tidak lagi dilakukan kegiatan PMPRB baik pada tingkat Kementerian maupun tingkat Unit Eselon I Kementerian Agama.

4. Realisasi anggaran Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 sebesar **Rp474.108.392.893,-** (empat ratus tujuh puluh empat miliar seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau **98,79%** dari pagu anggaran sebesar Rp479.903.401.000,- (empat ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus seribu rupiah) yang terdistribusi pada 124 satker. Persentase realisasi anggaran tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 yang mencapai 98,71%.
5. Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 sebesar 82,38 kategori Sangat Baik. NKA tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -10,01 dari tahun 2023 yang sebesar 92,39. NKA Tahun 2024 tidak mencapai target pada perjanjian kinerja yang sebesar 95,00. Ketidaktercapaian NKA Ditjen Bimas Hindu TA 2024 disebabkan oleh: (1) terdapat masalah pada penginputan laporan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) pada role Monev Sakti yang tidak dapat dilakukan karena ketidakterediaan IKP, sehingga Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tidak optimal khususnya variabel IKP (Efektifitas Unit Eselon I bobot 30%) memperoleh nilai 0 (Nol). Ketidakterediaan IKP pada rove Monev Sakti disebabkan kurang lengkapnya informasi kinerja pada aplikasi Renja Krisna khususnya tagging IKP pada "Unit Organisasi" dan Unit Organisasi yang terlibat". (2) Belum optimalnya perolehan dari penilaian Efisiensi khususnya variabel penggunaan SBK, yang disebabkan oleh belum semua Rincian Output (RO) pada Ditjen Bimas Hindu menggunakan SBK.

## **B. SARAN**

Terhadap beberapa permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target SP dan IKSP Ditjen Bimas Hindu pada periode renstra berikutnya, terdapat beberapa saran yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

secara periodik per bulan atau sesuai kebutuhan yang dilakukan oleh leading sektor berkolaborasi dengan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran untuk mengawal kegiatan pendukung guna pencapaian SP dan IKSP Ditjen Bimas Hindu.

2. Leading sektor dapat menjadikan hasil pengukuran SP dan IKSP tahun 2024 sebagai baseline dalam penyusunan target renstra Ditjen Bimas Hindu 2025-2029.
3. Leading sektor dapat melakukan digitalisasi dan integrasi data bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kesekretariatan guna memudahkan memperoleh data untuk pengukuran capaian IKSP Renstra Ditjen Bimas Hindu.
4. Leading sektor agar memprioritaskan alokasi anggaran berdasarkan capaian SP dan IKSP.
5. Leading sektor melakukan koordinasi dan pendampingan kepada para operator seluruh satker Ditjen Bimas Hindu mengenai laporan data capaian RO yang menjadi pendukung Sasaran Program dan Kegiatan untuk dilaporkan pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan (Sakti dan Monev Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (eMonev).

Demikian Laporan Kinerja Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Bimas Hindu. Begitu juga harapannya dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Ditjen Bimas Hindu. Disamping itu dapat dijadikan salah satu acuan dalam proses perencanaan selanjutnya sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Nengah Duija  
Jabatan : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yaqut Cholil Qoumas  
Jabatan : Menteri Agama Republik Indonesia

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

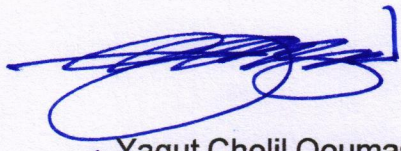
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

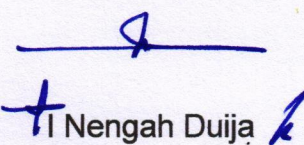
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama melakukan penyerapan anggaran sampai pada bulan ke 7 (tujuh) dengan target senilai 70% (persen).

Pihak Kedua,

Jakarta, 5 Desember 2023  
Pihak Pertama,

  
Yaqut Cholil Qoumas

  
I Nengah Duija

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**

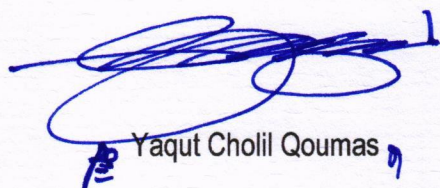
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningktanya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Hindu	1. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapat bimbingan agama Hindu	1:5
		2. Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	90%
2	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama	1. Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	100%
3.	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1. Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	95
4.	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakana agama	1. Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	100%
5.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1. Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	80%
		2. Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	100%
6.	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sumbangan keagamaan Hindu	1. Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan	90%
7.	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	1. Rerata nilai UASBN Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang bermuatan moderasi beragama	7
		2. Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTKH/PTU yang bermuatan moderasi beragama	7
8.	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berfikir siswa	1. Rerata Nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi	Literasi 430 Numerasi 390
		2. Rerata nilai asesmen siswa dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA	Membaca 430 Matematika 390 Sains 400
9.	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	1. Persentase guru bersertifikat pendidik	80%
		2. Persentase dosen bersertifikat pendidik	70%
		3. Persentase dosen berkualifikasi S3	30%
10.	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	1. Persentase peningkatan siswa pada Pratama Widya Pasraman	10%
		2. Persentase peningkatan siswa pada Adhi Widya Pasraman	7%
		3. Persentase peningkatan siswa pada Madyama Widya Pasraman	5%
		4. Persentase peningkatan siswa pada Utama Widya Pasraman	5%
		5. Persentase peningkatan mahasiswa pada PTKH	10%
11.	Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	1. Persentase propinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP perjenjang	8%
12.	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	1. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memenuhi 8 SNP	10%
		2. Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul	15 %
		3. Persentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	10%
		4. Persentase PTKH yang melaksanakan Prosedur Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Kelembagaan	70%
13.	Menguatnya Pendidikan karakter siswa	1. Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh nilai karakter minimal baik	90%

14.	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima didunia kerja	1. Persentase PTKH yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri dalam seleksi dan penempatan lulusan	30%
		2. Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan mahasiswa PTKH	
		a. S1	3.25
		b. S2	3.25
		c. S3	3.50
		3. Rerata masa tunggu lulusan PTKH sebelum memperoleh pekerjaan	12 Bulan
15.	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	1. Persentase jurnal ilmiah terakreditasi nasional	22,5%
16	Meningkatnya kualitas PTKH yang bereputasi internasional	1. Persentase PTKH yang memperoleh peringkat reputasi internasional	5 %
17.	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang efektif dan akuntabel	1. Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	85%
		2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80.04
		3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80.05
		4. Nilai Maturitas SPIP	2.04
		5. Indeks Profesionalitas ASN	80

**Nilai Kinerja Anggaran : 95**

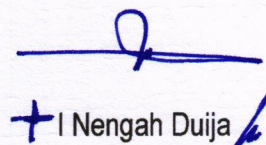
No	Program	Anggaran
1.	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Rp32.612.777.000,-
2.	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp15.364.655.000,-
3.	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp 5.455.570.000,-
4.	Program Pendidikan Tinggi	Rp28.137.679.000,-
5.	Program Dukungan Manajemen	Rp23.059.052.000,-
<b>Jumlah seluruh</b>		<b>Rp104.629.733.000,-</b>

Menteri Agama



Yaqut Cholil Qoumas

Jakarta, 5 Desember 2023  
Direktur Jenderal Bimas Hindu



I Nengah Duija

h

